

**PERAYAAN PEMERINTAHAN RATU WILHELMINA
DI HINDIA BELANDA (1923-1948)**

SKRIPSI



Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Zainiah
NIM. 211104040008
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
OKTOBER 2025**

**PERAYAAN PEMERINTAHAN RATU WILHELMINA
DI HINDIA BELANDA (1923-1948)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam



Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
OKTOBER 2025**

**PERAYAAN PEMERINTAHAN RATU WILHELMINA
DI HINDIA BELANDA (1923-1948)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Zainiah
NIM. 211104040008
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



**Dahimatul Afidah, M.Hum
NIP. 199310012019032016**

**PERAYAAN PEMERINTAHAN RATU WILHELMINA
DI HINDIA BELANDA (1923-1948)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam

Hari: Kamis

Tanggal: 11 Desember 2025

Tim Pengaji

Ketua

Dr. Win Usuluddin, M.Hum
NIP. 197001182008011012

Sekretaris

Siti Qurra'un Aini, I.C., M.Hum
NIP. 198504202019032005

Anggota:

1. Dr. Aslam Sa'ad M.Ag.
2. Dahimatul Afidah, M.Hum.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



Rektor, Dr. H. Abdul Astor, M.A.
NIP. 197406062000031003

MOTTO

تُؤْتَى الْمُلْكُ مِنْ تَشَاءُ وَتُنْزَعُ الْمُلْكُ مِنْ تَشَاءُ

Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkaukehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkaukehendaki (QS. Ali ‘Imran [3]: 26)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), 53.

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk Prodi Sejarah dan Peradaban Islam
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
serta para akademisi dan praktisi sejarah di Indonesia.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kepada Allah swt, karena dengan limpahan Rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nyalah, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Sebagai tanda rasa syukur penulis, semua pengalaman selama proses penulisan skripsi akan penulis jadikan sebagai refleksi atas diri penulis untuk kemudian akan penulis implementasikan dalam bentuk sikap dan perilaku konstruktif dan produktif untuk kebaikan dan perbaikan semua warga bangsa.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis sadari karena bantuan dan peran berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M.Ag. dan seluruh jajaran Dekanat yang lain atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam pada Program Sarjana Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN KHAS Jember Dr. Win Usuluddin, M.Hum. atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama proses perkuliahan.

4. Koordinator Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd. atas bimbingan, motivasi serta diskusi-diskusi yang menarik dan membangun selama proses perkuliahan.
5. Dosen Pembimbing Dahimatul Afidah, M.Hum yang selalu memberikan motivasi dan meyakinkan penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, saran, bantuan, dan motivasi beliau penulisan skripsi ini tidak akan selesai.
6. Seluruh dosen di Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang dengan sukarela mentransfer, membagi teori-teori dan ilmu-ilmu serta pengalamannya selama proses perkuliahan.
7. Seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas informasi-informasi yang diberikan yang sangat membantu penulis mulai dari awal kuliah sampai bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Terutama kepada kedua orang tua penulis, Ibu Maryani dan Almarhum Bapak Muhamni, penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu tercinta, perempuan hebat yang telah berjuang dan membiayai pendidikan penulis hingga saat ini. Untuk Almarhum Bapak, terima kasih atas kasih sayang dan doa yang tetap hidup dalam setiap langkah penulis. Tanpa mereka karya ini tidak akan pernah terwujud.
9. Terima kasih kepada ketiga saudara penulis, Suharyanto, Ahmad Syaiful Nur Mustafa, dan Ahmad Deni Setyo Sularso, atas segala dukungan dan

perhatiannya dalam membantu Ibu serta memberikan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

10. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Angkatan 2021, terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, serta dukungan yang tak ternilai harganya.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Tidak disebutkannya nama bukan berarti peran dan jasanya kurang berarti. Tanpa mengurangi rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan.

Akhirnya semoga segala amal baik yang telah dilakukan mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah swt. Atas segala kekurangan serta kekhilafan yang ada, sepenuh hati penulis minta maaf yang sebesar-besarnya.

Jember, 11 Oktober 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Penulis
J E M B E R

ABSTRAK

Zainiah. 2025. *Perayaan Pemerintahan Ratu Wilhelmina di Hindia Belanda (1923-1948)*.

Pada masa pemerintahan Ratu Wilhelmina (1898-1948), Hindia Belanda menjadi salah satu wilayah jajahan penting bagi Kerajaan Belanda karena memiliki sumber daya alam yang melimpah dan letak yang strategis. Pemerintah kolonial berupaya meneguhkan kekuasaannya melalui berbagai kebijakan dan kegiatan yang menampilkan kekuasaan dan kesan kedekatan dengan rakyat jajahan, meskipun banyak kebijakan tersebut tidak memberikan hasil yang memuaskan. Salah satu bentuk kegiatannya adalah perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina yang diselenggarakan di berbagai daerah Hindia Belanda. Perayaan tersebut mencerminkan strategi politik pemerintah kolonial dalam mempertahankan legitimasi kekuasaan di tengah munculnya berbagai pergolakan rakyat yang menentang dominasi Belanda.

Fokus dalam penelitian ini ada tiga yaitu: (1) Apa latarbelakang diadakannya perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina di Hindia Belanda? (2) Apa bentuk-bentuk perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina di Hindia Belanda (1923-1948)? (3) Bagaimana dampak perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina terhadap aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Hindia Belanda (1923-1948)?

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami latar belakang, bentuk-bentuk, dan dampak perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina di Hindia Belanda pada tahun 1923-1948. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah Kuntowijoyo yang meliputi tahapan pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Analisis didasarkan pada teori kekuasaan Michel Foucault yang memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang produktif dan tersebar melalui wacana, digunakan untuk menelaah bagaimana perayaan tersebut menjadi strategi politik kolonial dalam mempertahankan legitimasi kekuasaan melalui praktik-praktik budaya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina diselenggarakan sebagai strategi politik kolonial untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan serta menampilkan kestabilan wibawa kerajaan di tengah berbagai pergolakan masyarakat di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung. Bentuk perayaan di berbagai wilayah menunjukkan perpaduan unsur lokal dan kolonial. Di Besuki ditampilkan kesenian aduan sapi, di Yogyakarta diselenggarakan jamuan makan malam resmi, Surabaya mengadakan *Jaarmarkt*, dan Batavia menghadirkan Pasar Gambir. Dampaknya terlihat pada bidang politik melalui upaya memperkuat loyalitas masyarakat pribumi terhadap pemerintah kolonial. Pada bidang ekonomi, perayaan mendorong meningkatnya perdagangan, keramaian pasar, penjualan hasil bumi, serta aktivitas pelaku usaha lokal. Pada bidang sosial budaya, perayaan membuka ruang percampuran budaya melalui pertunjukan seni lokal yang tampil berdampingan dengan hiburan ala Eropa, sehingga memunculkan interaksi dan pengenalan budaya antarkelompok dalam masyarakat Hindia Belanda.

Kata Kunci: Ratu Wilhelmina, Perayaan, Legitimasi Kekuasaan, Hindia Belanda.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR ISTILAH.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Studi Terdahulu	10
G. Kerangka Konseptual	19
H. Metode Penelitian.....	23

I.	Sistematika Pembahasan	27
BAB II PERAYAAN PEMERINTAHAN RATU WILHELMINA SEBAGAI RESPON PERGOLAKAN RAKYAT	30	
A.	Penobatan Ratu Wilhelmina sebagai Ratu Kerajaan Belanda	30
B.	Kondisi Politik Hindia Belanda Pada Akhir Abad XIX	36
C.	Pergolakan di Berbagai Daerah Hindia Belanda Awal Abad XX	44
BAB III BENTUK-BENTUK PERAYAAN PEMERINTAHAN RATU WILHELMINA DI HINDIA BELANDA (1923-1948).....	53	
A.	Pementasan Budaya di Karesidenan Besuki	55
B.	Jamuan Makan Malam dan Pertunjukan Kesenian Jawa di Yogyakarta ...	64
C.	Pasar Gambir di Batavia.....	72
D.	<i>Jaarmarkt</i> (Pasar Tahunan) dan Parade Militer di Surabaya	77
BAB IV DAMPAK PERAYAAN PEMERINTAHAN RATU WILHELMINA TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DI HINDIA BELANDA (1923-1948).....	85	
A.	Dampak Politik.....	85
B.	Dampak Ekonomi.....	88
C.	Dampak Sosial dan Budaya	96
BAB V PENUTUP	104	
A.	Kesimpulan	104
B.	Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107	
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Pengunjung dan Pendapatan Pasar Gambir 1923-1926..... 91

Tabel 4. 2 Jumlah Pengunjung dan Pendapatan Pasar Gambir 1927-1934..... 91



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Aduan Sapi di Jember Tahun 1923	57
Gambar 3. 2 Wayang Wong di Jember Tahun 1923	59
Gambar 3. 3 Demonstrasi Polisi Lapangan di Bondowoso Tahun 1923	60
Gambar 3. 4 Pesta Dansa Masyarakat Eropa di Bondowoso Tahun 1923	61
Gambar 3. 5 Perayaan Komunitas Cina di Situbondo Tahun 1923	62
Gambar 3. 6 Perayaan Komunitas Arab di Situbondo Tahun 1923	62
Gambar 3. 7 Residen H.A. Voet dan Para Staf di Besuki Tahun 1923.....	63
Gambar 3. 8 Kantor Warga di Besuki Tahun 1923	63
Gambar 3. 9 Denah Meja Makan di Bangsal Sari Tahun 1938.....	67
Gambar 3. 10 Kartu Menu Gala Dinner 40 Tahun Pemerintahan Ratu Wilhelmina di Yogyakarta Tahun 1938.....	68
Gambar 3. 11 Jamuan Makan di Yogyakarta, 1938.	69
Gambar 3. 12 Daftar Menu Gala Dinner 40 Tahun Pemerintahan Ratu Wilhelmina di Yogyakarta Tahun 1938.....	70
Gambar 3. 13 Pertunjukan Tarian Srimpi di Keraton Yogyakarta Tahun 1938.....	71
Gambar 3. 14 Perayaan 25 Tahun Pemerintahan Ratu Wilhelmina di Pasar Gambir Tahun 1923	75
Gambar 3. 15 Gedung Pameran di Pasar Gambir Tahun 1938	75
Gambar 3. 16 Parade Militer Perayaan Ulang Tahun Ratu Wilhelmina di Surabaya Tahun 1948	82

Gambar 4. 1 Aduan Sapi di Jember Tahun 1923.....	97
Gambar 4. 2 Wayang Wong di Jember Tahun 1923	98
Gambar 4. 3 Tarian Arab di Situbondo Tahun 1923.....	98
Gambar 4. 4 Jamuan Rijsttafel di Keraton Yogyakarta Tahun 1938	100
Gambar 4. 5 Perayaan (Panjat Pinang) di Alun-alun Situbondo Tahun 1923	102



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISTILAH

- Afdeeling* : Satuan wilayah administratif di bawah residen, setingkat kabupaten pada masa Hindia Belanda.
- Algemeene Secretarie* : Sekretariat Umum pemerintahan Hindia Belanda yang menangani urusan administratif pusat.
- Amtenar Bumiputra* : Pegawai pribumi yang bekerja dalam administrasi pemerintahan kolonial Belanda.
- Benteng Stelsel* : Strategi pertahanan Belanda pada masa Perang Diponegoro yang mengandalkan jaringan benteng kecil di Jawa.
- Burgemeester* : Wali Kota pada masa pemerintahan Hindia Belanda.
- Conduct of Conduct* : Istilah Michel Foucault untuk menggambarkan praktik pengendalian perilaku individu oleh kekuasaan.
- Contleur* : Pejabat pengawas pemerintahan Belanda di tingkat distrik atau *afdeeling*.
- Czaar-Peterhuisje* : Bangunan peninggalan bersejarah di Belanda yang melambangkan hubungan monarki dan sejarah nasional.
- Decentralisatie Wet* : Undang-undang desentralisasi di Hindia Belanda yang memberi kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah.

- Delpher* : Portal digital berisi surat kabar, majalah, dan buku Belanda yang dikelola oleh *Koninklijke Bibliotheek* (Perpustakaan Nasional Belanda)
- Disciplinary Power* : Konsep kekuasaan Foucault yang bekerja melalui pengawasan, pembiasaan, dan disiplin terhadap individu.
- Een Eereschuld* : Tulisan Van Deventer di majalah *De Gids* (1901) yang menjadi dasar munculnya politik etis.
- Etische Richting* : Kebijakan balas budi Belanda terhadap rakyat Hindia yang menekankan pendidikan, irigasi, dan migrasi.
- f (gulden)* : Simbol mata uang Belanda yang berlaku di Hindia Belanda sebelum digantikan oleh rupiah.
- Galla Dinner* : Jamuan makan resmi dan mewah dalam rangka perayaan kenegaraan atau kerajaan.
- Gemeente* : Pemerintahan kota pada masa kolonial Belanda.
- Officieel Gedenkboek* : Buku kenangan atau buku resmi yang diterbitkan untuk memperingati suatu peristiwa penting.
- Governmentality* : Konsep Foucault tentang cara pemerintah mengatur masyarakat melalui pengelolaan perilaku (*conduct of conduct*).
- House of Orange* : Dinasti Kerajaan Belanda tempat Ratu Wilhelmina berasal.

<i>Indische Staatsregeling</i>	: Peraturan dasar pemerintahan Hindia Belanda yang menggantikan <i>Regeeringsreglement</i> tahun 1854.
<i>Jaarmarkt</i>	: Pasar tahunan atau pekan raya yang menjadi bagian dari kegiatan ekonomi dan hiburan kolonial.
<i>Jubileum</i>	: Perayaan ulang tahun kekuasaan atau pemerintahan monarki.
<i>Jubileum Emas</i>	: Perayaan 50 tahun kekuasaan seorang raja atau ratu.
<i>Jubileum Perak</i>	: Perayaan 25 tahun kekuasaan seorang raja atau ratu.
Kanca Sewidak	: Sebutan bagi abdi dalem dalam struktur istana tradisional Jawa.
<i>Kweekschool</i>	: Sekolah guru pada masa Hindia Belanda yang menghasilkan tenaga pendidik pribumi.
<i>Legitimate</i>	: Keterimaan kekuasaan atau pemerintahan oleh masyarakat yang diperintah.
<i>Liang Liong</i>	: Pertunjukan Barongsai Naga khas Tionghoa yang sering hadir dalam perayaan kolonial.
<i>Max Havelaar</i>	: Novel karya Multatuli (Douwes Dekker) yang mengkritik sistem tanam paksa (<i>Cultuurstelsel</i>).

<i>Onderneming</i>	: Usaha pertanian atau perkebunan swasta di bawah kebijakan ekonomi liberal Belanda.
<i>Oranjebal</i>	: Pesta dansa bertema Kerajaan Belanda dalam rangka memperingati dinasti Oranye.
<i>Oranje-Nassau</i>	: Garis keturunan bangsawan Belanda yang menaungi keluarga kerajaan.
<i>Prestise</i>	: Gengsi sosial yang ditampilkan melalui simbol dan gaya hidup kolonial.
<i>Regentschap</i>	: Wilayah administratif yang dikepalai oleh seorang bupati.
<i>Reglement</i>	: Aturan dasar pemerintahan Hindia Belanda sebelum digantikan oleh <i>Indische Staatsregeling</i> .
<i>Revolutionaire</i>	: Organisasi buruh revolucioner di Hindia Belanda.
<i>Vakcentrale</i>	
<i>Rijsttafel</i>	: Tradisi jamuan makan khas kolonial yang menampilkan aneka hidangan Nusantara.
<i>Sinfoni Beethoven</i>	: Karya musik klasik yang sering dimainkan pada acara kenegaraan atau pesta kolonial.
<i>Stadsgemeente</i>	: Pemerintahan kota dengan otonomi sendiri pada masa Hindia Belanda.
<i>Staatblad</i>	: Lembaran negara tempat dimuat peraturan resmi Hindia Belanda.

- Swapraja/Zelfbesturende Landschappen* : Daerah kerajaan atau kesultanan lokal yang memiliki pemerintahan sendiri di bawah pengawasan Belanda.
- Terusan Suez* : Jalur laut penting yang mempercepat pelayaran antara Eropa dan Asia sejak dibukanya tahun 1869.
- Volksraad* : Dewan Rakyat Hindia Belanda yang berdiri tahun 1918 sebagai lembaga perwakilan kolonial.
- Waterlooplein* : Lapangan di Batavia yang menjadi lokasi berbagai kegiatan publik dan militer.
- Weltevreden* : Kawasan elit di administratif di Batavia, pusat pemerintahan kolonial Belanda.
- Wijk* : Lingkungan atau wilayah permukiman di kota pada masa Hindia Belanda.
- Wilhelmus* : Lagu kebangsaan Belanda yang dinyanyikan pada acara resmi kerajaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR SINGKATAN

KITLV : *Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.*

NIROM : *Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij.*

PFB : Personeel Fabriek Bond.

PKI : Partai Komunis Indonesia.

PPPB : Persatuan Pegawai Pegadaian Bumi Putera.

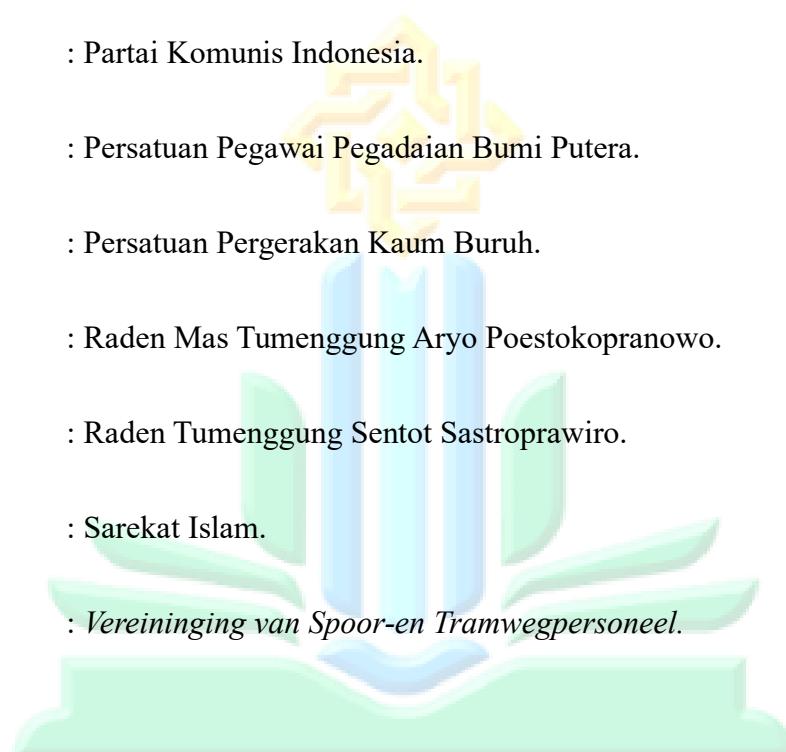
PPKB : Persatuan Pergerakan Kaum Buruh.

R.M.T.A. : Raden Mas Tumenggung Aryo Poestokopranowo.

R.T. : Raden Tumenggung Sentot Sastroprawiro.

SI : Sarekat Islam.

VSTP : *Vereinigung van Spoor-en Tramwegpersoneel.*



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kolonialisme merupakan upaya penaklukan suatu negara terhadap negara lain dengan cara mendominasi bidang ekonomi, politik, serta sosial budaya, dengan tujuan untuk memperluas kekuasaan ke wilayah di luar batas teritorialnya, bahkan hingga lintas benua.¹ Pada Abad XV sampai awal Abad XX, wilayah-wilayah di luar Eropa mulai memasuki era kolonialisme yang ditandai oleh kedatangan bangsa-bangsa Barat, seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda, yang memperebutkan kekuasaan atas sumber daya alam serta jalur perdagangan yang strategis. Di samping pendudukan wilayah, kolonialisme juga mencakup perubahan sosial, budaya, dan pemerintah di bawah kendali negara penjajah.²

Belanda menjadi salah satu koloni terbesar yang memiliki wilayah jajahan di berbagai belahan dunia. Di Amerika Selatan, Belanda menguasai Suriname;³ di Afrika Selatan, mereka mempekerjakan masyarakat Tanjung di Perkebunan;⁴

¹ Esa Nur Hidayat, “Perjuangan Soewardi Soerjaningrat Dalam Bidang Pers Tahun 1912-1920” (*Skripsi*: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, 2006), 10, didownload melalui: <https://share.google/bqmp5ja0RNWwajkBP>.

² Asep Achmad Hidayat, dkk, “Masa Kolonialisme Kawasan Asia Tenggara”, dalam jurnal: *Sharia*, Vol. 1. No. 2 (2024): 1-2, didownload melalui: 10.59757/sharia.v1i2.39.

³ Muh Asyakri Hasbullah, “Pengaruh Budaya Jawa Terhadap Hubungan Antara Indonesia dan Suriname” (*Skripsi*: Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021), 37, didownload melalui: <https://etd.ums.ac.id/id/eprint/6732/>.

⁴ Irma Sulistiowati, “Gejolak Politik dan Ekonomi Afrika Pasca Perang Dunia II”, dalam jurnal: *ISTORIA*, Vol. 17, No. 1 (2021): 2, didownload melalui: <https://journal.uny.ac.id/index.php/istoria>.

sedangkan di Asia Tenggara, Belanda menguasai banyak wilayah dengan mendirikan Hindia Belanda sebagai bagian dari pusat kekuasaannya.⁵ Dari berbagai wilayah jajahan tersebut, Hindia Belanda menempati posisi penting karena letaknya strategis dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang menjadi penopang kekuatan politik dan ekonomi Belanda. Dalam sistem pemerintahan kolonial, kekuasaan tertinggi berada di tangan Ratu Belanda, sementara pelaksanaan pemerintahan di tanah jajahan dijalankan oleh Gubernur Jenderal sebagai wakil kerajaan.⁶

Pada masa pemerintahan Ratu Wilhelmina (1898-1948),⁷ Hindia Belanda merupakan bagian dari koloni Eropa yang berada di bawah kekuasaan imperium Kerajaan Belanda yang sedang berupaya meneguhkan identitas dan wibawanya sebagai kekuatan kolonial. Sebagai bentuk tanggung jawab moral kerajaan terhadap masyarakat jajahan, Ratu Wilhelmina menetapkan politik etis pada tahun 1901 yang menekankan kewajiban pemerintahan Belanda dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di Hindia.⁸ Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan *Decentralisatie Wet* 1903 sebagai landasan otonomi daerah.⁹

⁵ Siti Aisyah, dkk, “Situasi dan Kondisi Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia Ketika Belanda Datang,” dalam jurnal: *Tashdiq*, Vol. 1, No. 2 (2023): 2, didownload melalui: 10.333/Tashdiq.v1i1.571.

⁶ M. Nur Hasan, “Corak Budaya Birokrasi Pada Masa Kerajaan, Kolonial Belanda Hingga di Era Desentralisasi Dalam Pelayanan Publik,” dalam jurnal: *Hukum*, Vol. 28, No. 2 (2012): 1078.

⁷ Bambang Sadono, dkk, Pertanggungjawaban Kepala Pemerintahan dalam Preferensi Pemerintahan di Beberapa Negara (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017), 109.

⁸ Nur Laely, “Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di *Onderafdeling Bonthain* 1905-1942” (*Doctoral Dissertation*: Pendidikan IPS, Kekhususan Pendidikan Sejarah Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar, 2018), 3, didownload melalui: <https://share.google/WTS2tIpSucgdUbKC>.

⁹ Teti Hestiliani, “Secentralisatie Wet Van Nederland Indies 1903,” dalam jurnal: *ISTORIA*, Vol. 15, No. 2 (2019): 212.

Kedua kebijakan tersebut memperlihatkan bagaimana kekuasaan kolonial berusaha membangun legitimasi pemerintahan di hadapan rakyat jajahan.

Ratu Wilhelmina yang dinobatkan menjadi Ratu Belanda pada 6 September 1898,¹⁰ merupakan penerus dinasti kerajaan dengan mewarisi takhta dari ibunya Ratu Emma, yang menjabat sebagai wali penguasa dari tahun 1890 hingga 1898 dan meninggal dunia pada 20 Maret 1934.¹¹ Keberadaan Ratu Wilhelmina sebagai pemimpin yang baru bagi Belanda, termasuk bagi negara-negara jajahan, membawa harapan baru terhadap kehidupan rakyat Belanda maupun rakyat pribumi di Hindia Belanda.¹² Menanggapi atas momentum politik tersebut, pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan perayaan kenaikan tahta sang ratu untuk menandai awal pemerintahan dan momen penting bagi kekuasaan kolonial.¹³

Selama 50 tahun memerintah, Ratu Wilhelmina menjadi penguasa dengan masa jabatan terpanjang dibandingkan dengan raja atau ratu lainnya dalam monarki Kerajaan Belanda. Kepemimpinannya berlangsung di tengah berbagai dinamika besar yang mempengaruhi jalannya sejarah Belanda dan dunia, seperti Perang Dunia I dan II serta krisis ekonomi tahun 1933. Di Hindia Belanda sendiri, masa pemerintahannya diwarnai berbagai pergolakan, mulai dari aksi-

¹⁰ Habib Akbar Nurhakim, Annas Ma'ruf Pramuhamam, dan Muhammad Iqbal Birsyada, “Dari Sekolah Kolonial (*Kweekschool*) ke Gerakan Nasional: Politik Etis dan Pengaruhnya Terhadap Transformasi Sosial di Indonesia”, dalam jurnal: *Sejarah Citra Lekha*, Vol. 9, No. 2 (2024): 167, didownload melalui: <https://doi.org/10.14710/jscl.v9i2.46789>.

¹¹ Faizal Arifin, “Eksistensi Gerakan Freemasonry di Karawang, 1926-1942”, dalam jurnal: *Alwatzikhoebillah*, Vol. 4, No. 1 (2018): 52.

¹² Djoko Marihandono, dkk, Sisi Lain Kartini (Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016), 71.

¹³ Muhammad Rafi Rabbani, “Pengaruh Peristiwa Skandal Donner Terhadap Situasi Politik di Kabupaten Madiun 1899-1902” (*Skripsi*: Program Studi Sejarah, FKIP, Universitas Siliwangi, 2014), 37, didownload melalui: <https://repository.unsil.ac.id>.

aksi petani akibat tekanan ekonomi, gerakan keagaamaan di pedesaan Jawa, hingga situasi menjelang kejatuhan Belanda pada awal pendudukan Jepang.¹⁴ Kehadirannya tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi simbol legitimasi kekuasaan, yang salah satunya dimanifestasikan melalui penyelenggaraan perayaan monarki.

Salah satu bentuk manifestasi tersebut, terlihat dalam perayaan publik yang diselenggarakan di Hindia Belanda untuk memperingati masa pemerintahan Ratu Wilhelmina. Perayaan ini berlangsung berulang kali dan mendapat perhatian luas lantaran dihadiri secara rutin oleh banyak orang serta diberitakan melalui berbagai media.¹⁵ Di Batavia, misalnya, perayaan berlangsung meriah dengan kehadiran para pengusaha, seniman, aparat pemerintah, dan masyarakat pribumi. Kota dihiasi dengan lampu warna-warni, bendera Belanda, serta pesta kembang api. Selama pemerintahan Ratu Wilhelmina, perayaan ini terus dilakukan setiap tanggal 31 Agustus yang juga bertepatan dengan hari ulang tahun sang ratu.¹⁶

Perayaan tersebut tidak hanya berlangsung di Batavia sebagai pusat pemerintahan yang identik dengan peringatan hari ulang tahun Ratu saja, tetapi juga diselenggarakan di berbagai daerah lain dengan konteks yang berbeda. Salah satu yang menarik adalah Karesidenan Besuki, yang ikut serta dalam

¹⁴ Satriadi Ady, “*Formal Analysis of Wilhelmina Statue Collection of Makassar City Museum*”, dalam jurnal: *Pakarena*, Vol. 6, No. 2, (2021): 156, didownload melalui: 10.26858/p.v6i2.26333.

¹⁵ Susie Protschky, “*Photography and the Making of a Popular, Colonial Monarchy: The Netherlands East Indies during Queen Wilhelmina’s Reign 1898-1948*”, *BMGN – Low Countries Historical Review*, Vol. 130-4 (2015): 3.

¹⁶ Retno Galih, “Pasar Gambir 1906-1942: Arena Ekonomi dan Rekreasi Masyarakat Kota Batavia” (*Skripsi*: Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015), 6-7, didownload melalui: <https://share.google/3Inor3W2sdmaRopql>.

perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina pada 1923. Di wilayah ini, perayaan diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat umum, seperti seniman, pengusaha, guru, dan pelajar. Beragam kegiatan seperti pameran, pesta, pasar dadakan, lomba tarik tambang, dan pertunjukan wayang digelar untuk menghidupkan suasana.¹⁷ Perpaduan antara budaya lokal dan simbol kolonial dalam perayaan ini, memperlihatkan bagaimana kekuasaan kolonial berusaha menampilkan kesan kedekatan dengan rakyat melalui beragam budaya dan seremoni publik.

Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas sejarah peristiwa terkait Ratu Wilhelmina di Hindia Belanda masih sangat terbatas. Umumnya, pembahasan hanya sebatas tentang perayaan ulang tahun dan perayaan penobatan. Namun, kajian yang mengaitkan perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina sebagai bentuk strategi dari legitimasi kekuasaan pemerintah kolonial melalui perayaan seremoni tersebut dapat dikatakan belum ada. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina dalam konteks sejarah politik di Hindia Belanda, ditinjau dari perspektif historis.

Berangkat dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina di wilayah yang jarang menjadi fokus penelitian sebelumnya. Di samping karena belum banyak ditemukannya penelitian terdahulu yang mengkaji secara spesifik dengan

¹⁷ Krisnadi, Asrumi, dan Supiastutik, “*The Existence of Jember Fashion Carnaval (Jfc) in Jember Regency-Indonesia 2003-2021*”, dalam jurnal: *International Journal of Social Science and Human Research*, Vol. 6, No. 8 (Agustus 2023): 4947, didownload melalui: 10.47191/ijsshr/v6-i8-45, Impact factor- 6.686.

menggunakan metode sejarah tentang latar belakang perayaan tersebut diadakan, respon masyarakat, bentuk-bentuk perayaan pada setiap daerah, dan pengaruhnya terhadap aspek kehidupan masyarakat di wilayah yang akan penulis kaji. Maka dari itu penulis mengangkat sebuah studi dengan judul **“Perayaan Pemerintahan Ratu Wilhelmina di Hindia Belanda (1923-1948)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa latarbelakang diadakannya perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina di Hindia Belanda?
2. Apa bentuk-bentuk perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina di Hindia Belanda (1923-1948)?
3. Bagaimana dampak perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina terhadap aspek kehidupan masyarakat di Hindia Belanda (1923-1948)?

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Spasial

Penelitian ini fokus pada perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina di wilayah Hindia Belanda, dengan penelusuran data yang secara khusus terdokumentasi di beberapa kota besar dan daerah administratif seperti Batavia, Yogyakarta, Surabaya, dan Karesidenan Besuki. Adapun daerah-

daerah yang mencakup Karesidenan Besuki yaitu *Regentschap* Besuki, *Regentschap* Bondowoso, *Regentschap* Panarukan, dan *Afdeeling* Jember.¹⁸ Batasan spasial ini dipilih berdasarkan kepentingan historis terkait dengan perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina, yang diselenggarakan di wilayah tersebut pada masa Hindia Belanda. Keempat wilayah yang dipilih memiliki hubungan erat dengan segala aktivitas pemerintahan Belanda, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya yang dilandasi oleh peran strategis masing-masing wilayah. Batavia, selain menjadi pusat pemerintahan Belanda, juga berkembang menjadi pusat administrasi perdagangan, perekonomian, dan kebudayaan.¹⁹ Yogyakarta diakui sebagai daerah *Zelfbesturende Landschappen* oleh pemerintahan Belanda, yang berarti wilayah tersebut memiliki otonomi untuk mengatur pemerintahannya sendiri.²⁰ Surabaya sebagai pusat pelabuhan utama di Jawa Timur, juga menjadi tempat distribusi perdagangan pemerintahan Belanda dan dikenal sebagai kota Madya (*Gemeente*).²¹ Sementara itu, Karesidenan Besuki yang terletak di ujung timur Jawa merupakan daerah yang kaya dan strategis dari segi administratif, sehingga memudahkan pemerintah kolonial dalam

¹⁸ Jati Saputra Nuriansyah, Intan Aninditya, dkk, “Dari Besuki ke Bondowoso: Perkembangan Kawasan *Frontier* Terakhir di Jawa 1800-1930”, dalam jurnal: *Historiography*, Vol. 2, No. 4 (Oktober 2022): 475-478.

¹⁹ Hendra Kusuma, “Situs Kota Tua di Batavia (1619-1942) Sebagai Bahan Ajar Mata Pelajaran Sejarah Peminatan”, dalam jurnal: *KRINOK*, Vol. 3, No. 3 (2021): 111, didownload melalui: 10.22437/krinok.v3i3.39329.

²⁰ Aulia Nurisyana Arkanti, dkk, Sejarawan Dalam Pusaran Keistimewaan: Biografi Djoko Suryo (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Sekolah Vokasi Program Studi Kearsipan, 2018), 37.

²¹ Muhammad Lingga Andana, Izza Yuspriana Afhimma, dan Silvia Nurul Ashiva, “Perkembangan Tata Kota Surabaya Pada Tahun 1870-1940”, dalam jurnal: *HISTORIOGRAPHY*, Vol. 1, No. 2 (2021): 14.

penguasaan wilayah sekitarnya.²² Dengan demikian, batasan spasial penelitian ini tidak hanya merepresentasikan cakupan wilayah Hindia Belanda secara umum, tetapi juga mengacu pada wilayah yang memiliki dokumentasi historis signifikan terkait perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina.

2. Temporal

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dari tahun 1923 hingga tahun 1948, dengan menitikberatkan pada momen-momen penting pemerintahan Ratu Wilhelmina yang dirayakan di Hindia Belanda. *Jubileum* sendiri dipahami sebagai perayaan untuk memperingati suatu peristiwa atau masa tertentu yang telah mencapai bilangan tahun khusus, misalnya kedua puluh lima atau kelima puluh, yang biasanya diperingati secara istimewa.²³ Dalam konteks pemerintahan Ratu Wilhelmina, tahun-tahun penting tersebut terjadi pada 1923 sebagai *Jubileum Perak* (25 tahun) yang salah satunya dirayakan di Karesidenan Besuki.²⁴ Perayaan 25 tahun ini terhitung dari dinobatkannya Ratu Wilhelmina sebagai Ratu Belanda pada tahun 1898.²⁵ Selanjutnya, tahun 1938 sebagai *Jubileum* 40 tahun yang antara lain diadakan di Yogyakarta,²⁶ dan tahun 1948 sebagai *Jubileum*

²² G. A. Ohorella dan Restu Gunawan, *Sejarah Lokal Peranan Rakyat Jawa Timur Pada Masa Perang Kemerdekaan 1945-1950* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001), 2.

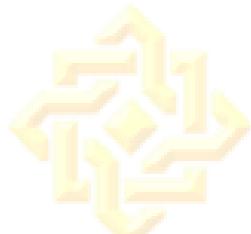
²³ t.p., "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus versi online/daring (dalam jaringan)," diakses pada 28 September 2025, <https://kbbi.web.id/yubileum>.

²⁴ Krisnadi, "The Existence", 4947.

²⁵ Miftahul Habib Fachrerozi, "Politik Etis dan Bangkitnya Kesadaran Baru Pers Bumiputra", dalam jurnal: *Bihari*, Vol. 2, No. 1 (2019): 19.

²⁶ Ajid Thohir dan Bambang Muhammad Fasya Azhara, "Pengaruh Islam dan Eropa Dalam Budaya Kuliner di Keraton Yogyakarta dan Surakarta Abad ke-19 dan ke-20 Masehi," dalam jurnal: *Kawistara*, Vol. 12, No. 2 (Agustus 2022): 215, didownload melalui: <https://doi.org/10.22146/kawistara.70935>.

Emas (50 tahun) yang diselenggarakan di Surabaya.²⁷ Tahun 1948 juga sekaligus menjadi batas akhir pembahasan karena bertepatan dengan berakhirnya masa pemerintahan Ratu Wilhelmina.²⁸ Atas dasar hal tersebut, penelitian ini menggunakan tahun-tahun penting *jubileum* sebagai penanda ruang lingkup kajian.



D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini tidak terlepas dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan latar belakang diadakannya perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina di Hindia Belanda.
2. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina di Hindia Belanda (1923-1948).
3. Untuk menganalisis dampak perayaan Ratu Wilhelmina terhadap aspek kehidupan masyarakat di Hindia Belanda (1923-1948).

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini tidak terlepas dari tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁷ J. Hepkema, "Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's courant", 20 September 1948, 2. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010762078>.

²⁸ Sadono, *Pertanggungjawaban Kepala*, 109.

1. Memberikan pemahaman mengenai latar belakang diadakannya perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina di Hindia Belanda, sehingga dapat menjadi referensi bagi kajian sejarah kolonial Indonesia.
2. Menambah wawasan terkait bentuk-bentuk perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina di Hindia Belanda (1923-1948), sehingga dapat dijadikan bahan penyempurnaan bagi penelitian serupa di bidang sejarah peristiwa, khususnya dalam konteks kolonial.
3. Memberikan kontribusi terhadap pemahaman dampak perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina terhadap aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Hindia Belanda (1923-1948), sehingga dapat memperkaya khazanah pengertian tentang dampak kebijakan kolonial.

F. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian lain yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti. Peneliti menggunakan penelitian sebelumnya guna membantu dalam menentukan apakah kebaruan informasi tersebut sudah atau belum ditemukan. Hasil dari penelitian terdahulu diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat lebih kritis dan sistematis dalam melakukan penelitian.²⁹

Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti:

²⁹ Annita Sari, dkk, Dasar-dasar Metodologi Penelitian (Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023), 65-66.

1. Retno Galih, “Pasar Gambir 1906-1942: Arena Ekonomi dan Rekreasi Masyarakat Kota Batavia”

Penelitian yang dilakukan oleh Retno Galih dalam skripsinya membahas tentang Pasar Gambir yang selain dijadikan tempat untuk aktivitas ekonomi seperti pasar pada umumnya, juga berfungsi sebagai sarana rekreasi bagi masyarakat Kota Batavia pada waktu itu.

Hasil penelitian ini menunjukkan jika Pasar Gambir merupakan proyek dari pemerintah kolonial yang dibangun sebagai bagian dari perayaan penobatan Ratu Belanda. Faktor pembangunannya juga terinspirasi oleh perayaan besar keagamaan, sehingga hanya kalangan tertentu saja yang dapat menyaksikannya. Oleh karena itu, untuk merayakan penobatan sang ratu, Pasar Gambir diadakan sebagai tempat hiburan agar masyarakat Batavia, yang memiliki latar belakang berbeda dapat menikmati berbagai hiburan dalam perayaan tersebut.³⁰

Meski memiliki konteks sejarah dan wilayah penelitian yang sama, yaitu perayaan besar pemerintahan Belanda yang digelar di beberapa wilayah Hindia Belanda, termasuk Batavia, terdapat perbedaan penelitian yang terletak pada fokus kajian. Penelitian terdahulu berfokus pada Pasar Gambir yang diadakan oleh pemerintah kolonial pada sebuah acara besar di ibukota Hindia Belanda.

³⁰ Galih, “Pasar Gambir,” 6.

Penelitiannya membahas bagaimana Pasar Gambir yang selain sebagai arena ekonomi, juga dijadikan sebagai tempat hiburan dan rekreasi bagi masyarakat Batavia. Sedangkan pada penelitian kali ini merujuk pada latar belakang diselenggarakannya perayaan tersebut, bentuk-bentuk perayaannya yang mencerminkan keberagaman budaya, dan pengaruhnya terhadap aspek kehidupan masyarakat di Hindia Belanda.

2. Nasution, “*Jaarmarkt* di Surabaya Masa Pemerintahan Hindia-Belanda”

Nasution sebagai penulis dalam jurnal pendidikan sejarah ini, memberikan penjelasan mengenai *Jaarmarkt* yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda sebagai produksi pameran di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan gambaran informasi terkait alasan pemerintah Belanda menyelenggarakan *Jaarmarkt*, berbagai hiburan dan hasil industri yang dipamerkan, serta awal pengelolaan yang secara keseluruhan dikelola oleh birokrasi pemerintah.³¹

Terdapat persamaan penelitian yang terletak pada wilayah Surabaya, yang termasuk ke dalam salah satu wilayah pilihan peneliti di Hindia Belanda, serta pada penyelenggaraan pasar tahunan yang diadakan untuk merayakan ulang tahun Ratu Wilhelmina, yang searah dengan fokus kajian penelitian ini. Namun, penelitian terdahulu lebih

³¹ Nasution, “*Jaarmarkt* di Surabaya Masa Pemerintahan Hindia-Belanda”, dalam jurnal: *AVATARA*, Vol. 1, No. 2 (2013): 1.

menitikberatkan pada *Jaarmarkt* yang selain diselenggarakan untuk perayaan hari ratu, juga dijadikan sebagai tempat dalam memperoleh keuntungan finansial. *Jaarmarkt* dipahami sebagai ajang yang memadukan antara aktivitas ekonomi, interaksi sosial, hiburan, dan ekspresi identitas lokal masyarakat Surabaya. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian kali ini, yang secara khusus berfokus pada bentuk perayaan pemerintahan yang diselenggarakan di beberapa wilayah di Hindia Belanda.

3. Bambang Muhamad Fasya Azhara, dan Desita Dwi Utami, “Pemberitaan Seremoni Keraton Yogyakarta di Surat Kabar Yang Terhimpun Dalam Situs Delpher (1923-1940)”

Jurnal yang diterbitkan dalam bentuk bunga rampai ini, menjelaskan tentang ciri khas Keraton Yogyakarta dalam menyelenggarakan seremoni yang menjadi bagian dari kebudayaan lokal. Dengan menggunakan metode sejarah, penulis berusaha untuk mengungkapkan perkembangan seremoni tersebut yang sempat terpengaruh oleh budaya luar pada masa Hindia Belanda, dengan memanfaatkan sudut pandang dari pemberitaan surat kabar antara tahun 1923-1940. Dimana pemberitaannya dibagi menjadi dua jenis kegiatan upacara, yaitu seremoni tradisional dan seremoni yang telah mengalami proses modernisasi.³²

³² Bambang Muhamad Fasya Azhara dan Desita Dwi Utami, “Pemberitaan Seremoni Keraton Yogyakarta di Surat Kabar Yang Terhimpun Dalam Situs Delpher (1923-1940)”, dalam Masami Okabe, *International Symposium on Javanese Culture* (Kraton Yogyakarta, 2024): 16.

Meskipun terdapat perbedaan yang mencolok antara judul penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, baik dari objek, fokus, dan rentang waktu penelitian. Namun terdapat persamaan pada metode sejarah yang digunakan, selain itu pembahasan pada penelitian terdahulu disinggung terkait perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina dalam pemberitaan surat kabar mengenai penyelenggaraan seremoni pada tahun 1901-1942.

Penelitian tersebut menyebutkan bahwa di Keraton Yogyakarta pernah diadakan acara jamuan makan untuk merayakan pemerintahan Ratu Belanda yang kedua puluh lima hingga keempat puluh tahun, yang termasuk dalam pembahasan pada penelitian kali ini.

4. Satriadi Ady, “*Formal Analysis of Wilhelmina Statue Collection of Makassar City Museum*”

Penelitian yang dilakukan oleh Satriadi Ady dalam jurnalnya ini bertujuan memberikan penjelasan kepada para pengamat seni, khususnya pengunjung Museum Kota Makassar, mengenai keberadaan salah satu patung yang menjadi koleksi didalam museum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan jika patung yang dimaksud merupakan penggambaran figur seorang Ratu Belanda, yaitu Ratu Wilhelmina. Dimana, keberadaannya menjadi bukti sejarah yang mengingatkan bahwa dahulu kolonial pernah menjadikan Kota Makassar sebagai wilayah politik pemerintahan mereka.³³

³³ Ady, “*Formal Analysis*, ” 154.

Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis lakukan adalah keduanya sama-sama berfokus pada aspek sejarah yang berkaitan dengan Ratu Wilhelmina sebagai subjek penelitian. Keduanya juga bertujuan untuk menunjukkan jika kolonialisme dahulu pernah terjadi di Hindia Belanda, dengan masing-masing peneliti memilih daerah tertentu sebagai objek penelitian. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada peristiwa historis dan perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina di Hindia Belanda, sementara penelitian terdahulu lebih menekankan pada analisis formal patung Ratu Wilhelmina di Museum Kota Makassar, sebagai representasi figur tersebut.

5. Susie Protschey, “Photography and The Making of a Popular, Colonial Monarchy: The Netherlands Eat Indies During Queen Wilhelmina’s Reign (1898-1948)”

Dalam penelitiannya, Susie Protschey berusaha mengungkapkan album foto yang memiliki gambaran kompleks dan

beragam mengenai kehidupan masyarakat di wilayah Hindia Belanda.

Salah satunya seperti foto perayaan publik di Hindia Belanda untuk merayakan *House of Orange* yang terjadi pada masa pemerintahan Ratu Wilhelmina. Perayaan tersebut merupakan perayaan besar yang dihadiri oleh banyak orang dan diberitakan di surat kabar. Untuk memahami makna keterlibatan orang-orang biasa di Hindia Belanda

dengan Rumah Oranye tersebut, Susie Protschey menggunakan berbagai sumber foto populer dan foto monarki Belanda yang dipublikasikan dalam album pribadi, serta sumber dari buku peringatan untuk memahami makna keterlibatan orang-orang biasa di Hindia Belanda dengan Rumah Oranye melalui foto.³⁴

Meski keduanya memiliki fokus pembahasan dan fokus geografis yang sama mengenai perayaan publik yang diadakan untuk memperingati pemerintahan Ratu Wilhelmina, serta bagaimana kegiatan ini diterima dan dihadiri oleh masyarakat di Hindia Belanda. Namun, untuk skala penelitian dan pendekatan yang digunakan berbeda. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek penggunaan fotografi di wilayah Hindia Belanda dalam rentang waktu yang cukup panjang, yaitu 1898-1948. Sementara penelitian yang akan peneliti kaji membahas perayaan pemerintahan di Hindia Belanda pada rentang waktu 1923-1948. Hal ini menjadi pembeda utama karena adanya pembatasan pada konteks waktu dan pendekatan yang ditentukan oleh masing-masing peneliti.

6. Syarifuddin, Irene Maria, dan Magraini, “Eksistensi Telok Abang Sebagai Tradisi Agustusan di Kota Palembang, Sumatera Selatan Tahun 2010-2020”

Jurnal pendidikan sejarah ini membahas tentang telok abang atau telur merah yang menjadi salah satu tradisi masyarakat

³⁴ Protschky, “Photography and,” 3.

Palembang di dalam memperingati kemerdekaan Indonesia. Pada saat Belanda menduduki Palembang, telur ini dijadikan simbol perlawanan terhadap penjajah. Hal ini tercermin dari warna merah pada telur yang memiliki arti keberanian dan perlawanan. Hasil dari penelitian memaparkan terkait sejarah perayaan tradisi telok abang di Kota Palembang dan menafsirkan hasil akulturasi budaya dalam perayaan tersebut.³⁵

Terdapat kesamaan pada bentuk perayaan dalam kedua penelitian ini, di mana dalam penelitian terdahulu sebelum tradisi telok abang digunakan pada acara Agustusan, tradisi tersebut pada masa penjajahan Belanda pernah digunakan untuk memperingati ulang tahun Ratu Wilhelmina, yang kemudian setelah itu telok abang dijadikan sebagai simbol perlawanan. Masyarakat Palembang menggunakan tradisi tersebut sebagai ciri khas dalam merayakan sesuatu, sesuai dengan kebudayaan yang mereka miliki. Hal yang sama juga dilakukan oleh masyarakat di beberapa wilayah Hindia Belanda, yang menggunakan tradisi setempat dalam merayakan pemerintahan sang ratu. Perbedaan utama terletak pada macam-macam tradisi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, yang tentu saja berbeda antara tradisi telok abang di Kota Palembang dengan keberagaman tradisi yang ada di wilayah lain di Hindia Belanda.

³⁵ Syarifuddin, Irene Maria, dan Magraini, “Eksistensi Telok Abang Sebagai Tradisi Agustusan di Kota Palembang, Sumatera Selatan Tahun 2010-2020”, dalam jurnal: *Widya Winayata*, Vol. 10, No. 2, (Agustus 2022): 86, didownload melalui: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPS>.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian sejarah terkait perayaan Ratu Wilhelmina lebih banyak terfokus pada pasar di Batavia yang juga dijadikan sebagai tempat rekreasi, penggambaran asal mula *Jaarmarkt* dan pengelolaannya oleh pemerintahan Belanda, pemberitaan seremoni keraton Yogyakarta, patung Ratu Wilhelmina sebagai simbol kolonial, pengaruh monarki kolonial melalui fotografi, dan tradisi Agustusan di Palembang. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih belum mengupas pada aspek-aspek lain yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas latar belakang penyelenggaraan perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina, bentuk-bentuk perayaan yang dilakukan, serta dampaknya terhadap aspek kehidupan masyarakat di Hindia Belanda.

Penelitian tentang perayaan Ratu Wilhelmina bukan merupakan penelitian yang baru, sudah ada beberapa peneliti-peneliti sebelumnya yang juga meneliti terkait tema yang sama, tetapi fokus penelitiannya hanya terbatas pada wilayah tertentu, seperti Batavia (sekarang Jakarta), Surabaya, Yogyakarta, Makassar, dan Palembang. Sedangkan perayaan pemerintahan yang ada di wilayah Hindia Belanda masih belum pernah diteliti oleh para peneliti. Oleh karena itu, penelitian ini akan berusaha mengupas bagaimana bentuk perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina serta dampaknya terhadap aktivitas politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Hindia Belanda pada tahun 1923-1948.

G. Kerangka Konseptual

Untuk memperjelas fokus dan arah penelitian, diperlukan adanya teori atau konsep sebagai acuan agar pembahasan tetap berkaitan dengan topik yang dibahas. Dikarenakan penelitian ini merupakan kajian sejarah politik, maka peneliti menggunakan teori kekuasaan Michel Foucault sebagai landasan konseptual utama, atau pisau analisis untuk membedah makna dibalik perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina di Hindia Belanda. Sementara dalam menganalisis bentuk-bentuk perayaan dan dampaknya terhadap aspek kehidupan masyarakat Hindia Belanda, penelitian ini memperdalam pemahaman kekuasaan pada ranah kebudayaan.

Dalam pandangan Michel Foucault, kekuasaan tidak dipahami sebagai sesuatu yang bersifat negatif, melainkan bersifat positif, produktif, dan ia tersebar dimana-mana.³⁶ Kekuasaan hadir pada setiap relasi, karena di mana ada relasi, di sana pula kekuasaan beroperasi melalui wacana.³⁷ Menurut Foucault, kekuasaan dipandang sebagai suatu strategi, yaitu jaringan mekanisme yang membuat suatu keputusan diterima dan dilaksanakan secara otomatis, tanpa melalui pertimbangan atau kemungkinan penolakan.³⁸

Foucault juga menekankan bahwa kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan. Pengetahuan tidak lahir secara netral, tetapi terbentuk melalui

³⁶ Sari Monik Agustin, “Foucault dan Komunikasi (Telaah Konstruksi Wacana dan Kuasa Foucault Dalam Lingkup Ilmu Komunikasi),” dalam jurnal: *Ilmu Komunikasi*, Vol. 7, No. 3 (September-Desember 2009): 202, didownload melalui: www.pdffactory.com.

³⁷ Abdullah Khozin Af., “Konsep Kekuasaan Michel Foucault,” dalam jurnal: *Toesofi*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2012): 140.

³⁸ Martinus S. Barasa dan F.X. Armada Riyanto, “Analisis Teori Kekuasaan Michel Foucault atas Propaganda Media dalam Membangun Diskursus Politik,” dalam jurnal: *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*, Vol. 6, No. 1 (Agustus 2023): 191, didownload melalui: 10.34007/jehss.v6i1.1785.

praktik sosial yang di dalamnya terdapat relasi kuasa. Dalam kerangka ini kebenaran tidak berdiri sebagai sesuatu yang mutlak, melainkan dibentuk melalui seperangkat aturan dan prosedur yang menentukan pernyataan mana yang dianggap sah dan dapat diterima. Mekanisme inilah yang oleh Foucault dipahami sebagai rezim kebenaran.³⁹

Di Hindia Belanda, perayaan Ratu Wilhelmina diperingati dengan mengadakan beragam acara sebagai bentuk partisipasi masyarakat atas pemerintahan sang ratu yang membawa kegembiraan di tanah jajahan.⁴⁰ Perayaan tersebut bisa dimaknai sebagai strategi politik kolonial Belanda dalam membentuk dan mempertahankan legitimasi kekuasaannya di wilayah jajahan, dengan mendorong masyarakat agar memperlihatkan partisipasi mereka sebagai bentuk penghormatan kepada Ratu Wilhelmina, selaku pemimpin tertinggi di Belanda dan wilayah jajahan.

Dalam konteks ini, perayaan tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi simbolik kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan pengetahuan politik kolonial. Praktik perayaan menghadirkan gambaran tertentu mengenai kekuasaan Belanda sebagai sesuatu yang wajar dan pantas untuk diakui. Proses ini bekerja melalui apa yang disebut Foucault sebagai permainan kebenaran, yakni mekanisme sosial yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap apa yang dianggap benar dalam realitas kolonial.⁴¹

³⁹ Barasa, “Analisis Teori Kekuasaan,” 190-191.

⁴⁰ Krisnadi, “*The Existence*,” 497.

⁴¹ Barasa, “Analisis Teori Kekuasaan,” 190.

Legitimasi kekuasaan ini didapat dari proses simbolisasi yang terlihat pada perayaan pemerintahan tersebut. Saat masyarakat hadir, menyaksikan, dan ikut berpartisipasi dalam perayaan, secara tidak langsung mereka terlibat dalam pengakuan atas kekuasaan kerajaan. Inilah makna kekuasaan yang disebutkan oleh Michel Foucault, sebagai sesuatu yang menyebar dan tanpa disadari bagaimana caranya ia beroperasi. Dengan kata lain, kekuasaan sebagai bentuk hegemoni atas kesadaran dan pikiran manusia terhadap kondisi atau peristiwa yang terjadi di masa tertentu.⁴²

Pada tahap ini, kekuasaan tidak lagi beroperasi melalui paksaan langsung, melainkan melalui pembentukan kesadaran dan pengetahuan sosial. Apa yang dipertontonkan dalam perayaan diterima sebagai kebenaran yang berlaku, sehingga kekuasaan hadir sebagai sesuatu yang tampak alamiah dalam kehidupan masyarakat.⁴³ Dengan demikian, kekuasaan dapat dipahami sebagai mekanisme yang memengaruhi cara berpikir dan memaknai realitas sosial pada suatu periode tertentu.

Selain itu, dalam kerangka konseptual penelitian ini, kebudayaan dimaknai sebagai sarana untuk menjalankan dominasi. Budaya tidak hanya mengekspresikan kehidupan masyarakat, tetapi juga menjadi ruang perebutan makna yang digunakan oleh penguasa sebagai alat dalam menguatkan kekuasaannya. Pernyataan tersebut selaras dengan konsep Anatomi Gramsci mengenai hegemoni, yang bekerja melalui artefak budaya yang meluas ke ranah

⁴² Ani Cahyati, “Konstruksi Pengetahuan Tentang Mitologi Perang Bubat Dalam Membentuk Stereotipe Masyarakat Jawa Dan Sunda di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap,” (*Skripsi*: Program Studi Sejarah, FKIP, Universitas Siliwangi, 2020), 13.

⁴³ Barasa, “Analisis Teori Kekuasaan,” 190-191.

politik.⁴⁴ Konsep ini kerap digunakan dalam mengungkap mekanisme budaya yang berfungsi sebagai sarana kekuasaan yang tersembunyi. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Foucault, yang melihat kekuasaan beroperasi melampaui cara-cara hegemonik, yang kemudian ia konsepsikan sebagai *governmentality*.⁴⁵

Dalam perspektif Foucault, praktik kebudayaan tersebut juga berperan dalam membentuk pengetahuan dan kebenaran sosial. Budaya menjadi ruang di mana relasi kekuasaan dan pengetahuan saling terkait dan saling mengukuhkan.⁴⁶ Pemikiran ini berkaitan dengan konsep *govermentality* yang dikembangkan Foucault, yaitu cara berpikir mengenai bagaimana negara mengelola dan mengarahkan masyarakatnya.

Governmentality merupakan wujud rasionalisasi tentang bagaimana cara negara menjalankan kekuasaannya, agar kekuasaan tersebut diakui atau diterima (*legitimate*). Konsep ini juga dimaknai *conduct of conduct*, yang berarti cara negara dalam mengarahkan perilaku masyarakat melalui internalisasi penundukan, sehingga mereka menjadi populasi yang patuh terhadap kekuasaan.⁴⁷

Dalam kerangka ini, pengaturan perilaku masyarakat tidak dapat dilepaskan dari produksi pengetahuan. Kekuasaan hanya dapat dijalankan

⁴⁴ Rosmah Tami, dkk, Hegemoni: Negosiasi dan Konsensus Produk Budaya Indonesia (Makassar: Alauddin University Press, 2021), 35.

⁴⁵ Abdil Mughis Mudhoffir, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik," dalam jurnal: *Masyarakat*, Vol. 18, No. 1 (2013): 1, didownload melalui: 10.7454/MJS.v18i1.1253.

⁴⁶ Barasa, "Analisis Teori Kekuasaan," 190-191.

⁴⁷ Mudhoffir, "Teori Kekuasaan," 12.

secara efektif apabila didukung oleh pengetahuan dan kebenaran yang diterima serta diinternalisasi oleh masyarakat.⁴⁸ Karena itu, teori kekuasaan Michel Foucault menjadi relevan dengan penelitian ini karena tidak hanya menguraikan struktur kekuasaan kolonial, tetapi juga mengkaji bagaimana kekuasaan direalisasikan melalui praktik-praktik budaya yang sekaligus memproduksi pengetahuan. Kekuasaan dan pengetahuan saling membentuk dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pelanggengan legitimasi kekuasaan kolonial.

H. Metode Penelitian

Pada pembahasan kali ini, peneliti menggunakan metode penelitian sejarah sebagai metode penelitian yang akan diterapkan. Metode sejarah menurut Gilbert J. Garraghan, diartikan sebagai serangkaian aturan dan prinsip yang sistematis yang bertujuan untuk mendukung dalam mengumpulkan berbagai sumber sejarah, mengujinya dengan kritis, dan menyajikan hasil yang diperoleh.⁴⁹ Dalam penelitian sejarah, Kuntowijoyo menyebutkan ada lima tahapan yang harus dilakukan⁵⁰, yaitu sebagai berikut:

1. Pemilihan Topik

Pemilihan topik adalah tahapan awal dalam penelitian sejarah. Topik yang tepat akan membantu peneliti dalam melakukan penelitiannya. Oleh karena itu, pemilihan topik sebaiknya berdasarkan kepada kedekatan emosional dan kedekatan intelektual, kemudian setelahnya dilanjut dengan membuat rencana

⁴⁸ Barasa, “Analisis Teori Kekuasaan,” 190-191.

⁴⁹ Nina Herlina, Metode Sejarah (Bandung: Satya Historika, 2020), 1-2.

⁵⁰ Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018), 69.

penelitian. Jika pemilihan topik sesuai dengan syarat tersebut, maka peneliti akan mudah memahami dan mengembangkan topik yang dipilih.⁵¹

Maka dari itu, penulis memilih topik sejarah dengan judul penelitian “Perayaan Pemerintahan Ratu Wilhelmina di Hindia Belanda (1923-1948)”. Selain topik tersebut belum pernah dikaji, pemilihan topik ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana masyarakat melakukan perayaan yang digelar untuk memperingati masa pemerintahan sang ratu di Hindia Belanda. Dengan cakupan wilayah yang luas, tentunya terdapat keragaman budaya yang tercermin dalam perayaan tersebut. Untuk itu, penulis menggunakan berbagai sumber yang relevan terkait dengan topik penelitian agar dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana perayaan tersebut berlangsung, serta apa pengaruhnya terhadap aspek kehidupan masyarakat pada masa itu.

2. Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Heuristik adalah tahapan yang dilakukan setelah menentukan topik penelitian. Dalam tahap pengumpulan sumber, data yang diperoleh mesti sesuai dengan topik penelitian yang dipilih, baik itu berupa sumber tertulis maupun tidak tertulis. Dalam penelitian sejarah, sumber dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah data sejarah yang diperoleh sezaman dengan peristiwa yang diteliti, sementara sumber sekunder merupakan sumber pendukung yang dibuat setelah suatu peristiwa terjadi dan disampaikan oleh pihak yang bukan saksi langsung.⁵²

⁵¹ Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu, 70.

⁵² Dahimatul Afidah, Diktat Metodelogi Penelitian Sejarah (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 24.

Pada tahap pengumpulan sumber, penelitian ini menggunakan sejumlah sumber primer, antara lain buku dan *gedenkboek* seperti karya G. L. Kepper, Regicola, Dr. N. Japikse, serta arsip resmi *Officieel Gedenkboek* (1898) dan *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 16 tahun 1819, kemudian surat kabar dari Delpher seperti *De Sumatra Post* (1923), *De Indische Courant* (1923), *Batavia Nieuwsblad* (1927), *De Volkskrant* (1938), *Nieuwe Courant* (1948), dan *Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's Courant* (1948); serta foto-foto perayaan dari KITLV Universitas Leiden yang merekam suasana perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina di Hindia Belanda. Sementara untuk sumber sekunder, penulis melakukan penelusuran di beberapa perpustakaan seperti Perpustakaan UINSA, Perpustakaan UIN KHAS Jember, dan Perpustakaan Kabupaten Bondowoso terkait data penelitian kepustakaan yang mencakup buku, skripsi, jurnal, artikel penelitian, dan berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Verifikasi

Verifikasi atau kritik sumber adalah tahapan ketiga yang harus dilakukan peneliti dalam memverifikasi keabsahan sumber yang telah diperoleh pada tahapan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber tersebut berdasarkan pada kenyataan yang ada. Tahapan verifikasi terbagi menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan pada sisi atau faktor luar dari sumber,

sementara kritik intern adalah proses pemeriksaan terhadap isi dari sumber yang ditemukan.⁵³

Kritik ekstern dalam penelitian ini dilakukan dengan meninjau dari faktor luar atau fisik sumber, seperti pada bahan dan asal usulnya, guna membuktikan keaslian baik pada dokumen tertulis, foto atau artefak. Sedangkan kritik intern dilakukan dengan menyelidiki keabsahan data untuk mengetahui kontekstualisasi pada sumber tulisan, foto, artefak dan sumber lainnya, guna memastikan apakah data mengenai perayaan Ratu Wilhelmina di Hindia Belanda bersifat konkret dan kredibel.

4. Interpretasi

Setelah melakukan verifikasi sumber, tahap selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi merupakan proses pengkajian terhadap sumber-sumber yang didapat peneliti sebelum akhirnya direkonstruksi ke dalam bentuk tulisan sejarah. Tanpa melalui proses ini, hasil verifikasi tidak dapat dilanjutkan karena sumber belum dianggap otentik atau masih kurang sempurna. Oleh karena itu, proses interpretasi bertujuan untuk menganalisis sumber secara mendalam guna memperoleh keotentikan dalam penulisannya.⁵⁴ Terdapat dua jenis interpretasi, yaitu analisis dan sintesis.⁵⁵ Pada proses analisis, peneliti melakukan penguraian atau pemaparan terhadap sumber sejarah yang diperoleh. Setelah itu,

⁵³ Nurmaya Dewi, “Romantika Tiga Zaman Kehidupan Masyarakat Keturunan Etnis Tionghoa di Kota Bandung” (*Skripsi*: Departemen Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2015), 31, didownload melalui: https://repository.upi.edu/20176/1/S_SEJ_0900882_Title.pdf.

⁵⁴ Aditia Muara Padiatra, Ilmu sejarah: Metode dan Praktik (Gresik: JSI Press, 2020), 19-110.

⁵⁵ Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu, 78.

dilanjutkan proses sintesis, yaitu pengumpulan sumber-sumber sejarah sehingga membentuk satu kesatuan data yang komprehensif. Dengan tahapan ini, fakta-fakta sejarah yang di peroleh dari berbagai sumber dapat disatukan menjadi suatu gambaran sejarah yang lengkap.

5. Penulisan Sejarah (Historiografi)

Dalam metode penelitian sejarah, historiografi merupakan tahapan terakhir yang harus dilakukan oleh peneliti. Historiografi atau penulisan sejarah adalah cara untuk menyusun, melaporkan, atau memaparkan temuan-temuan dari penelitian sejarah yang telah dilakukan. Seperti halnya dalam penelitian ilmiah, penulisan hasil penelitian sejarah seharusnya dapat memberikan gambaran yang jelas dan terperinci, mulai dari awal perencanaan penelitian hingga pada tahap akhir, yaitu penarikan kesimpulan.⁵⁶ Pada saat penulisan sejarah, penulis akan berusaha menyajikan hasil penelitian secara jelas dan terstruktur berdasarkan sumber sejarah yang ditemukan. Dengan menggunakan sistematika penulisan yang tepat, diharapkan hasil penelitian mengenai perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina di Hindia Belanda tahun 1923-1948 dapat mudah dipahami dan diterima oleh pembaca.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis, dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup, guna memperoleh deskripsi

⁵⁶ Dudung Abdurahman, Metodelogi Penelitian Sejarah Islam (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), 113-114.

data yang jelas dan mudah dipahami terkait dengan hasil penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Berikut adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab I (Pendahuluan)

Pada bab pertama akan dibahas mengenai beberapa bagian yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi terdahulu, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II (Perayaan Pemerintahan Ratu Wilhelmina Sebagai Respon Pergolakan Rakyat)

Bab ini menjelaskan alasan diadakannya perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina di Hindia Belanda. Pembahasan mencakup penobatan Ratu Wilhelmina sebagai penguasa, kondisi politik Hindia Belanda menjelang Abad XX, serta berbagai pergolakan yang terjadi di sejumlah daerah. Uraian ini menunjukkan bagaimana pemerintah kolonial berupaya memperkuat legitimasi kekuasaannya melalui penyelenggaraan perayaan.

Bab III (Bentuk-bentuk Perayaan Pemerintahan Ratu Wilhelmina di Hindia Belanda 1923-1948)

Bab ini mendeskripsikan berbagai bentuk perayaan yang diselenggarakan pemerintah kolonial untuk memperingati pemerintahan Ratu Wilhelmina. Kegiatan tersebut meliputi pementasan budaya di Karesidenan Besuki yang meliputi Jember, Bondowoso, Situbondo dan Besuki. Jamuan makan malam dan pertunjukan kesenian di Yogyakarta, Pasar Gambir di Batavia, serta

Jaarmarkt dan Parade Militer di Surabaya. Penjelasan disajikan dengan menyoroti pemilihan tempat pelaksanaan, bentuk kegiatan, tujuan, pihak yang terlibat, dan makna pada setiap kegiatan perayaan.

Bab IV (Dampak Perayaan Pemerintahan Ratu Wilhelmina Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat di Hindia Belanda 1923-1948)

Bab ini menganalisis dampak dari perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina terhadap kehidupan masyarakat. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama yaitu aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya dari tahun 1923-1948. Pembahasan mencakup bagaimana perayaan tersebut dimanfaatkan pemerintah kolonial untuk memperkuat legitimasi kekuasaan, mendorong aktivitas ekonomi melalui penyelenggaraan pasar dan hiburan, serta memberikan pengaruh terhadap dinamika sosial-budaya masyarakat setempat.

Bab V (Penutup)

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait pembahasan keseluruhan hasil penelitian. Kesimpulan merangkum temuan utama terkait latar belakang diadakannya perayaan, bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan, serta dampak yang ditimbulkan. Saran berisi masukan yang dapat diambil untuk memperluas kajian pada penelitian berikutnya.

BAB II

PERAYAAN PEMERINTAHAN RATU WILHELMINA SEBAGAI RESPON PERGOLAKAN RAKYAT

A. Penobatan Ratu Wilhelmina sebagai Ratu Kerajaan Belanda

Tanggal 31 Agustus 1880 menjadi hari yang sangat penting bagi Kerajaan Belanda. Di kota Den Haag, Ratu Emma, permaisuri Raja Willem III, melahirkan seorang putri yang diberi nama Wilhelmina Helena Paulina Maria. Kabar kelahiran tersebut diumumkan pada sore menjelang malam, sekitar pukul enam, yang ditandai dengan tembakan meriam pertama dari kediaman kerajaan sebagai penanda hadirnya pewaris takhta. Berita gembira ini tersebar cepat di kalangan rakyat, baik di sekitar istana maupun dari berbagai penjuru negeri. Pada malam yang sama, sebuah edisi surat kabar diterbitkan, mengabarkan secara resmi kelahiran sang putri kepada seluruh rakyat Belanda.¹

Di berbagai kota, rakyat mengadakan pesta. Di Den Haag, bendera nasional berkibar di seluruh penjuru kota, sementara di jalan-jalan berlangsung pawai panjang anak-anak yang dihiasi pita dan ornamen berwarna oranye sambil menyanyikan lagu-lagu nasional. Dewan kota dari berbagai daerah juga mengirimkan telegram ucapan selamat, dan dengan berbagai cara bangsa ini menunjukkan kegembirannya. Pada hari kelahirannya, sang putri didaftarkan di Kantor Catatan Sipil di hadapan pejabat yang bertugas, F.M. Baron van der

¹ G. L. Kepper, *Gedenkboek: Koningin Wilhelmina in haar Openbaar Leven*, ('S-Gravenhage: M. M. Couvee, t.th.), 7.

Duyn van Maasdam, dengan para saksi Menteri Kehakiman Tuan Modderman dan Menteri Luar Negeri van Lijnden van Sandenburg.²

Semasa kecil, Putri Wilhelmina tumbuh dalam lingkungan istana yang penuh kasih sayang, di bawah asuhan Ratu Emma dan perhatian Raja Willem III. Masa kecilnya diwarnai dengan aktivitas di Istana Het Loo, di mana ia menikmati alam terbuka, memelihara hewan, berkuda, berperahu, dan terbiasa melakukan kegiatan sederhana seperti memanggang kue, sehingga perkembangan fisik dan mentalnya berlangsung secara sehat. Kedekatannya dengan Raja Willem III turut memperkuat kesadaran identitas dinasti, sebab sang Raja sering menuturkan kisah heroik leluhur *Oranje-Nassau* yang berperan penting dalam sejarah Belanda.³

Selain itu, Wilhelmina memperoleh pendidikan dasar di bawah pengawasan Jonkvrouw van de Poll dan pengasuh asal Inggris, Miss Saxton Winter. Keduanya berperan dalam menanamkan disiplin dan tata krama istana sekaligus memperluas wawasannya. Hubungan dengan Winter tidak selalu harmonis, namun hal tersebut justru menegaskan kemandirian berpikir sang putri, misalnya ketika ia menggambar peta Eropa dengan menampilkan Belanda lebih besar dari Inggris. Interaksinya dengan lingkungan militer, seperti kunjungan ke Barak Grenadier, turut membentuk wawasan dan kedekatannya

² t.p., *Officieel Gedenkboek van de Feestelijke Ontvangst en de Inhuldiging van hare Majesteit Koningin Wilhelmina Helena Pauline Maria binnen Amsterdam in 1898* (Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, 1898), 12.

³ G. L. Kepper, *Wilhelmina: Koningin der Nederlanden Populair geschetst* (Rotterdam: Nijgh & van Ditmar, 1898), 11-15.

dengan rakyat sejak usia dini.⁴ Pondasi awal inilah yang menjadi landasan penting sebelum pendidikan Wilhelmina disusun secara lebih sistematis.

Sejak Januari 1889, pendidikan Putri Wilhelmina mulai dirancang secara lebih sistematis dengan menghadirkan sejumlah pengajar khusus. Pada tahap awal, mata pelajaran sejarah nasional dan geografi diberikan oleh Mr. Gediking sejak Mei 1888 hingga Juli 1890. Setelah itu, tugas tersebut dialihkan kepada Dr. Salverda de Grave yang sejak Oktober 1889 juga membimbing keterampilan bahasa Prancis, termasuk membaca, menulis, dan tata bahasa. Pada paruh kedua tahun 1890, Dr. Salverda mengambil alih hampir seluruh kurikulum, sehingga ia menjadi tokoh sentral dalam pendidikan sang putri pada periode ini. Dedikasi dan ketekunannya mendapat pengakuan dari Ratu Emma, karena dianggap berhasil memenuhi amanah besar dalam mempersiapkan putri mahkota secara menyeluruh.⁵

Di bawah bimbingan Dr. Salverda, Putri Wilhelmina memperoleh pendidikan menengah yang berlangsung hingga 1896. Kurikulumnya mencakup bahasa dan sastra Belanda, sejarah nasional, sejarah umum, serta bahasa dan sastra Prancis. Selain itu, ia juga mempelajari geografi hingga 1894 sebelum dilanjutkan oleh Prof. Kann, sementara mata Pelajaran fisika diberikan oleh Mr. Gediking dan kemudian oleh Dr. H. van der Stadt. Pada periode yang sama, sejumlah pengajar lain turut serta memperluas bidang studi, seperti Miss Saxton Winter untuk bahasa dan sastra Inggris, Dr. E. F. Kossmann untuk

⁴ Kepper, *Wilhelmina: Koningin der Nederlanden*, 17-19.

⁵ t.p., *Officieel Gedenkboek*, 20-21.

bahasa dan sastra Jerman, serta Dr. H. Blink yang mengajarkan kosmografi. Kehadiran para pengajar ini menunjukkan bahwa pendidikan Wilhelmina telah mencakup berbagai disiplin ilmu, mulai dari humaniora hingga sains, sebagai bekal untuk kedudukannya di masa depan.⁶

Pada tahap berikutnya, pendidikan sang putri semakin diperkaya dengan pelajaran yang berhubungan langsung dengan administrasi negara dan militer. Prof. Kramer dan Dr. P. Hofstede de Groot memberikan materi sejarah seni, sementara Prof. De Louter mengajarkan hukum tata negara, ekonomi domestik, serta sistem pemerintahan Hindia Belanda. Untuk memperkuat pemahaman dalam bidang pertahanan, Letnan Jenderal Kool memberikan pengantar mengenai organisasi dan fungsi angkatan darat, sedangkan Laksamana Muda Stokhuyzen menjelaskan struktur serta penggunaan angkatan laut. Dengan cakupan yang luas tersebut kurikulum pendidikan Putri Wilhelmina tidak hanya berorientasi pada pembentukan intelektual, tetapi juga diarahkan pada pengetahuan praktis mengenai politik, administrasi kolonial, dan strategi militer.⁷ Pendidikan yang diterimanya pada dekade awal kehidupan inilah yang membentuk fondasi penting bagi peranannya sebagai pewaris takhta Kerajaan Belanda.

Perjalanan masa kecilnya mengalami perubahan besar ketika Raja Willem III jatuh sakit dalam waktu yang panjang dan akhirnya wafat pada tanggal 23 November 1890 di Istana Het Loo, Apeldoorn. Ia di makamkan di Gereja Baru

⁶ t.p., *Officieel Gedenkboek*, 21-22.

⁷ t.p., *Officieel Gedenkboek*, 22.

Delft.⁸ Peristiwa tersebut tidak hanya mengakhiri masa kebersamaan Wilhelmina dengan sang ayah, tetapi juga menandai tanggung jawab baru sebagai pewaris takhta pada usia yang masih sangat muda. Di bawah bimbingan Ratu Emma sebagai wali, Wilhelmina mulai diperkenalkan secara langsung kepada rakyat melalui kunjungan resmi ke berbagai daerah, untuk memperkuat legitimasi dan citranya sebagai calon ratu. Sejak usia dini, ia telah disiapkan untuk memahami fungsi pemerintahan dan tanggung jawab kenegaraan, serta mengukuhkan posisinya sebagai penerus dinasti *Oranje-Nassau*.⁹

Setelah wafatnya Raja Willem III, Ratu Emma menjalankan peran sebagai wali dan pemangku takhta dengan ketelitian serta pemahaman mendalam terhadap sistem parlementer dan negara hukum modern yang berlaku di Belanda. Masa regensinya, yang berlangsung selama 8 tahun, ditandai oleh stabilitas politik dalam negeri, dimana isu demokrasi, hubungan antarpertai, dan undang-undang sosial lebih menonjol dibandingkan persoalan luar negeri dan kolonial. Dengan sikap teliti dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk keputusan penting seperti pembubaran parlemen pada 1894, Ratu Emma memastikan bahwa Ratu Wilhelmina mendapatkan pendidikan politik dan kepercayaan diri yang memadai untuk memerintah. Tibaalah pada 31 Agustus 1898, ia menyerahkan kekuasaan dengan rasa syukur karena putrinya telah siap memerintah sesuai ketentuan konstitusi.¹⁰

⁸ Regicola, *Koningin Wilhelmina: Schetsen uit haar leven. Voor de Nederlandsche Jeugd* ('s-Hertogenbosch: G. Mosmans Zoon, 1901), 33.

⁹ Kepper, *Wilhelmina: Koningin der Nederlanden*, 17-23.

¹⁰ N. Japikse, *De Geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau* (Den Haag: Zuid-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1948), 231-233.

Setelah menyerahkan kekuasaan kepada putrinya, prosesi pengesahan Ratu Wilhelmina berlangsung khidmat pada 6 September 1898 di Gereja Baru, Den Haag, yang dihadiri keluarga kerajaan, pejabat tinggi, bangsawan, dan perwakilan dari berbagai wilayah jajahan. Upacara dimulai dengan dentuman 101 meriam, dentang lonceng, serta pawai kehormatan. Di hadapan anggota Senat dan Dewan Jenderal, Ratu Wilhelmina menyampaikan pidato yang menegaskan tekadnya untuk memerintah demi kesejahteraan rakyat, mempertahankan konstitusi, kemerdekaan, serta hak-hak warga negara. Sumpah setia diucapkan secara timbal balik antara Ratu dan perwakilan rakyat, menandai pengukuhan kembali ikatan historis antara monarki Belanda dan rakyatnya. Momen tersebut diakhiri dengan sorak-sorai, nyanyian lagu kebangsaan, dan pengumuman resmi kepada publik yang disertai tembakan kehormatan serta dentang lonceng di seluruh kota.¹¹

Pada tahun-tahun awal pemerintahannya, Ratu Wilhelmina secara konsisten mengadakan kunjungan resmi ke berbagai kota di Belanda, dengan Amsterdam menjadi pusat kegiatan utama. Kunjungan tahunan ke Istana di Dam pada bulan April ditandai dengan berbagai agenda seremonial, mulai dari jamuan makan malam kenegaraan, konser *gala*, hingga kunjungan ke museum dan lembaga filantropi. Kehadiran Ratu tidak hanya menjadi simbol kebersamaan antara monarki dan rakyat, tetapi juga memicu suasana perayaan yang merata di seluruh kota. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat menunjukkan antusiasme melalui hiasan kota, parade, dan sambutan meriah,

¹¹ Regicola, *Koningin Wilhelmina*, 145-151.

sementara pemerintah daerah memanfaatkan momentum ini untuk menegaskan peran penting kota mereka dalam kehidupan nasional.

Selain Amsterdam, Ratu Wilhelmina bersama Ratu Emma juga melakukan perjalanan singkat ke Haarm dan wilayah Zaan, termasuk Zaandam, Wormerveer, Zaandijk, dan De Koog. Kunjungan tersebut diwarnai dengan prosesi penyambutan rakyat, peninjauan pusat-pusat industri, museum, serta peninggalan seperti Czaar-Peterhuisje. Meski sebagian besar perjalanan bersifat seremonial, interaksi langsung dengan masyarakat dan penekanan pada kemajuan industri maupun kesejahteraan rakyat memperlihatkan gambaran Ratu sebagai penguasa yang dekat dengan rakyatnya. Secara keseluruhan, kunjungan-kunjungan tersebut meliputi Rotterdam, Haarlem, dan sejumlah kota lain di Belanda maupun Jerman, yang secara umum bertujuan memperkuat reputasi monarki dan hubungan diplomatik.¹²

B. Kondisi Politik Hindia Belanda Pada Akhir Abad XIX

Pemerintahan Hindia Belanda menerapkan sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik, feodalistik, dan birokratis yang dibuat demi kepentingan penjajahan. Belanda membentuk sebuah struktur hierarki yang menempatkan bumiputra maupun kelompok asing di bawah kendali Gubernur Jenderal. Dalam menjalankan administrasi sehari-hari, Gubernur Jenderal dibantu oleh sebuah lembaga bernama *Algemeene Secretarie* yang berkedudukan di kantor Gubernur

¹² t.p., *De Regeering van Koningin Wilhelmina: Hare Ihuldiging, Hare Eerste Regeeringsjaren, Hare Verloving* (Rotterdam: Mucha & Ditmar, t.th.), 431-435.

Jenderal. Lembaga ini memiliki peran penting dalam menangani urusan korespondensi serta merumuskan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah kolonial di Hindia Belanda.¹³

Sistem administrasi pemerintahan kolonial memiliki sifat dualistik, yaitu terdiri atas dua lapisan birokrasi. Lapisan pertama adalah pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dikendalikan oleh Gubernur Jenderal sebagai perpanjangan tangan Kerajaan Belanda. Struktur ini dilanjutkan oleh para Residen di tingkat provinsi, serta dibantu *Contleur* (pengawas) dan asisten *Controleur*. Lapisan kedua adalah birokrasi pribumi yang tetap dipertahankan, di mana Bupati menempati posisi tertinggi, kemudian dilanjutkan oleh Wedana dan Asisten Wedana sebagai pelaksana di tingkat bawah.¹⁴

Sebagai negara administrasi, praktik pemerintahan kolonial lebih menekankan pada kepentingan birokrasi daripada kebutuhan masyarakat. Hal ini tampak pada penyimpangan tujuan pembaruan pemerintahan yang awalnya untuk memberi otonomi lebih besar kepada daerah, tetapi pada praktiknya justru memperluas kewenangan pejabat Belanda, memberi ruang lebih bagi pejabat pribumi, serta melibatkan unsur progresif lokal. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan rakyat, langkah ini justru makin memperkuat dominasi kekuasaan Belanda di Hindia.¹⁵

¹³ Ira Sugiarnik, “Gubernur Jenderal Hindia-Belanda dan Kebijakannya Pada Tahun 1900-1945 Serta Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi,” dalam jurnal: SINDANG, (Lubuklinggau: LP4MK & Prodi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Silampari, 2022), 152.

¹⁴ Nur Laely, “Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di *Onderafdeling Bonthain* 1905-1942” (*Doctoral Dissertation*: Pendidikan IPS, Kekhususan Pendidikan Sejarah Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar, 2018), 9-10, didownload melalui: <https://share.google/WTS2tIpBSucgdUbKC>.

¹⁵ Akadun, “Perkembangan Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pada Era Pemerintahan Hindia Belanda,” dalam jurnal: *Civius*, Vol. 10, No. 1 (Juni 2010): 5.

Birokrasi tidak hadir untuk memberikan pelayanan, melainkan menempatkan diri sebagai pihak yang harus dilayani. Model pemerintahan yang digunakan menempatkan kekuasaan utama di tangan pemerintah pusat, sementara daerah hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, sehingga pemerintahan lebih berfungsi sebagai alat penguatan kekuasaan kolonial. Dominasi sentralisasi tersebut menyebabkan otonomi daerah tidak pernah terwujud secara nyata, karena wilayah lokal hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mempertahankan kekuasaan Belanda.¹⁶ Pada akhirnya, pola pemerintahan yang sentralistik ini memunculkan kritik dan tuntutan pembaruan, yang kemudian mendorong pemerintah kolonial merumuskan kebijakan baru.

Pada awal Abad XX, kondisi politik di Hindia Belanda ditandai oleh lahirnya kebijakan baru dari pemerintah kolonial yang dikenal sebagai Politik Etis. Kebijakan ini muncul sebagai respon dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh penerapan Sistem Tanam Paksa. Dalam praktiknya, sistem tersebut banyak mengalami penyimpangan dari ketentuan awal. Alih-alih menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan rakyat, hasil keuntungan justru lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan Belanda semata.¹⁷

Salah satu bentuk penyimpangan tersebut terlihat dari perubahan ketentuan penyerahan hasil panen, yang semula ditetapkan sebesar 20%

¹⁶ Akadun, “Perkembangan Pemerintahan,” 6-7.

¹⁷ Nastiti Muhasabah, Subaryana, dan YB Jurahman, “Politik Etis dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Politik di Hindia Belanda,” dalam jurnal: *RINONTJE*, Vol. 2, No. 1 (April 2021): 13.

mengalami perubahan hingga menjadi 33%.¹⁸ Selain itu, pelaksanaannya juga diwarnai oleh praktik kekerasan terhadap rakyat, serta pemaksaan penggunaan lahan pertanian yang sering kali mencapai setengah atau bahkan lebih dari total tanah milik penduduk. Tentu kondisi ini jelas merugikan dan membahayakan rakyat, karena mereka kehilangan tenaga serta lahan untuk menanam pangan untuk kehidupan sehari-hari.¹⁹

Kondisi tersebut menyebabkan kritik dari Douwes Dekker melalui *Max Havelaar* yang mengkritik Sistem Tanam Paksa hingga akhirnya diganti dengan menerapkan sistem ekonomi eksplorasi atau yang biasa dikenal sebagai Politik Liberal. Dalam hal ini, pemerintah kolonial Belanda mendorong berkembangnya perkebunan besar yang dikelola perusahaan swasta Eropa. Melalui kebijakan yang membuka peluang modal asing, Perkebunan di Jawa dan Sumatra dioperasikan secara intensif. Sistem ini memperkenalkan corak ekonomi kapitalis di Hindia Belanda, di mana tanah dan tenaga kerja diperlakukan sebagai komoditas. Akibatnya, banyak lahan petani pribumi dialihkan kepada perusahaan, sementara rakyat menjadi buruh berupah rendah. Eksplorasi kopi, teh, karet, dan kelapa sawit memang memberi keuntungan besar bagi Belanda, tetapi menimbulkan perampasan tanah serta kerusakan lingkungan yang serius di Hindia.²⁰

¹⁸ M. C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), 260.

¹⁹ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia IV: Kemunculan Penjajah di Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 356-357.

²⁰ Tiara Niammusyafah Pasaribu, Juan Carlos Ginting, dan Adinda Dwi Saputri, "Dampak Kebijakan Politik Etis Belanda Terhadap Masyarakat Indonesia," dalam jurnal: *AR RUMMAN*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2024): 603.

Namun demikian, kebijakan tersebut tetap tidak meningkatkan kesejahteraan pribumi, justru semakin memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi di Hindia Belanda. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan kritik dari golongan etis Belanda, salah satunya Van Deventer melalui tulisannya *Een Eereschuld* yang diterbitkan di majalah *De Gids* tahun 1901. Dalam tulisan tersebut ia menuntut agar Belanda membayar hutang budi kepada penduduk pribumi melalui Politik Etis yang meliputi 3 sila utama, yaitu irigasi, emigrasi, dan pendidikan.²¹

Tuntutan dan kritik dari berbagai golongan tersebut mendorong Belanda mengubah politik kolonialnya. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina melalui pidato kenegaraan *Etische Richting* memperkenalkan politik kolonial baru yang dikenal sebagai Haluan Etika, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pribumi.²² Akan tetapi, dalam praktinya, kebijakan tersebut kembali mengalami berbagai penyimpangan dari tujuan awal yang telah ditetapkan. Pembagunan irigasi, misalnya, tidak ditujukan untuk persawahan rakyat, melainkan lebih difokuskan pada lahan perkebunan (*onderneming*) seperti tebu. Akhirnya, irigasi tersebut tidak diarahkan bagi kesejahteraan rakyat, melainkan untuk kepentingan Belanda sendiri.²³

²¹ Nur Febriyanto, "Perjuangan Politik K.H. Ahmad Dahlan Dalam Muhammadiyah di Yogyakarta 1912-1923" (*Skripsi: Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017*), 50-52, didownload melalui: <https://share.google/3qsyEDMX5MNCGRR2K>.

²² Muhasabah, "Politik Etis," 14.

²³ Pebrianti, "Dampak Penerapan Politik Ethis Dalam Kehidupan Masyarakat Palembang Tahun 1900-1942" (*Skripsi: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019*), 5, didownload melalui: https://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/3344/1/352014010_BAB%20I_DAFTAR%20PUSATAKA.pdf.

Penyimpangan juga terjadi dalam program emigrasi yang dijalankan dengan memindahkan penduduk ke perkebunan di luar Jawa untuk dijadikan pekerja paksa melalui sistem tanam paksa. Sementara itu, dari ketiga program Politik Etis, hanya pendidikan yang memberi manfaat bagi pribumi. Namun, praktiknya tetap disertai kebijakan non-populis yang menimbulkan penolakan, terutama dari kalangan pendidikan Islam. Selain itu, penerapan program pendidikan juga menimbulkan pertentangan terhadap keberadaan lembaga-lembaga pendidikan tradisional, seperti pesantren dan sekolah-sekolah lokal. Hal ini terjadi karena kebijakan yang menyertai politik pendidikan lebih berpihak pada kepentingan kolonial daripada kepentingan penduduk pribumi.²⁴

Di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, muncul pandangan bahwa berbagai urusan dan persoalan akan lebih efektif apabila sistem Desentralisasi diterapkan. Kebijakan ini merupakan konsekuensi langsung dari Politik Etis yang mulai gencar di kampanyekan pada akhir Abad XIX. Penerapan Desentralisasi kemudian melahirkan sejumlah dewan daerah sebagai wadah perwakilan. Salah satu wujud pelaksanaannya adalah pembentukan *Volksraad* (Dewan Rakyat) pada 18 Mei 1918, ketika van Limburg Stirum menjabat sebagai Gubernur Jenderal.²⁵

Volksraad dibentuk sebagai lembaga perwakilan satu majelis dengan kewenangan terbatas, yaitu memberi nasihat kepada Gubernur Jenderal, termasuk dalam urusan keuangan yang harus dikonsultasikan kepadanya. Pada

²⁴ M. Syarif, "Politik Etis Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Pesantren," dalam jurnal: *inovatif*, (Februari 2019): 13-14, didownload melalui: <https://doi.org/10.55148/inovatif.v5i1.94>.

²⁵ Sugiarnik, "Gubernur Jenderal," 153.

awal pembentukannya, *Volksraad* beranggotakan 39 orang, terdiri dari 19 anggota hasil pemilihan melalui wali pemilih (10 diantaranya orang pribumi), dan 19 anggota yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal (termasuk 5 orang pribumi). Sementara jabatan ketua ditetapkan langsung oleh Ratu Belanda.²⁶

Sejak berdirinya, anggota pribumi di *Volksraad* menempatkan diri sebagai oposisi dan menjadi kekuatan dominan dalam Fraksi Hindia, meski awalnya belum terorganisasi dengan baik karena konflik kepentingan agama, suku, dan kelompok. *Volksraad* lebih berperan memberi nasihat kepada Gubernur Jenderal daripada menyuarakan kepentingan rakyat. Lembaga ini tidak memiliki kewenangan setara parlemen, seperti menetapkan anggaran atau melakukan penyelidikan. Perkembangannya pun bergantung pada situasi politik Hindia Belanda, terutama setelah perubahan aturan dasar dari *Reglement* (1854) menjadi *Indische Staatsregeling*, yang memengaruhi komposisi dan misi *Volksraad*. Walaupun ruang gerak politik Bupati sangat terbatas, *Volksraad* tetap menjadi wadah aspirasi dan perjuangan kaum pribumi.²⁷

Kehadiran *Volksraad* juga tidak terlepas dari kritik kalangan Belanda, khususnya terkait keterlibatan pribumi. Kritik tersebut menekankan bahwa *Volksraad* seharusnya mencerminkan gagasan persamaan hak dalam Politik Etis, namun praktiknya justru dikuasai pegawai pemerintah. Kondisi ini

²⁶ Bernas Sobari, "Partai Politik dan Pergerakan Nasional di Hindia Belanda Awal Abad XX" (*Skripsi*: Universitas Indonesia, 2008), 17.

²⁷ Diva Nancy Audissa Simarmata, dkk, "The Role of the Volksraad in the Dutch East Indies Period", dalam jurnal: *Nasional Holistic Science*, Vol. 4, No. 1 (April 2024): 141, didownload melalui: <https://jurnal.larisma.or.id/index.php/HS>.

menimbulkan kekhawatiran bahwa *Volksraad* hanya akan menjadi lembaga formalitas tanpa fungsi perwakilan yang nyata.²⁸

Pada praktiknya, keanggotan *Volksraad* memang lebih banyak ditentukan oleh Gubernur Jeneral, sehingga jumlah pribumi tetap minoritas. Pemerintah kolonial juga hanya merespon tuntutan rakyat ketika situasi memaksa, bukan karena adanya niat untuk memperluas hak politik. Ketika anggota pribumi menyampaikan kritik melalui surat kabar, pemerintah segera membantah untuk menjaga wibawa kolonial. Bahkan, tokoh-tokoh pribumi yang dianggap terlalu kritis bisa dikeluarkan dari keanggotaan.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa *Volksraad* pada saat itu tidak sepenuhnya mampu memenuhi harapan sebagai lembaga perwakilan rakyat, melainkan lebih berfungsi sebagai alat legitimasi politik kolonial.

Dari keseluruhan faktor yang terjadi, kondisi politik Hindia Belanda pada akhir Abad XIX menunjukkan ketidakstabilan dan ketidaksesuaian antara wacana pembaruan dengan praktik kolonial. Berbagai kebijakan yang diperkenalkan pemerintah kolonial lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas kekuasaan daripada aspirasi masyarakat, sehingga ruang politik pribumi masih terbatas. Kondisi inilah yang menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan yang menjadi latar munculnya pergolakan di berbagai daerah.

²⁸ Susanto Zuhdi, dkk, Seabad Rakyat Indonesia Berparlemen: Sejarah DPR RI (Jakarta Pusat: Biro Pemberitaan Parlemen, 2021), 19.

²⁹ Simarmata, *The Role of the Volksraad*, 144.

C. Pergolakan di Berbagai Daerah Hindia Belanda Awal Abad XX

Sejak Abad XIX hingga awal Abad XX, Hindia Belanda sering dilanda berbagai bentuk pergolakan, mulai dari kerusuhan, perlawanan petani, hingga gerakan berbasis agama yang muncul sebagai respon masyarakat akibat tekanan sistem kolonial. Pergolakan tersebut terjadi akibat dari kebijakan kolonial yang berdampak pada aspek kehidupan masyarakat pribumi, khususnya dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Penerapan sistem perpajakan, kepemilikan tanah, hingga aturan pemburuhan semakin membebani rakyat. Dalam kondisi tersebut, keresahan masyarakat terwujud dalam aksi protes yang beragam, baik melalui perlawanan bersenjata, gerakan religius, maupun bentuk-bentuk perlawanan pasif yang berkembang di berbagai daerah.³⁰

Pada bidang sosial, masyarakat pribumi mengalami tekanan sosial akibat sistem stratifikasi kolonial yang membagi penduduk ke dalam golongan Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Dalam struktur ini, pribumi ditempatkan pada lapisan sosial terbawah dengan akses terbatas terhadap ekonomi, kesehatan, serta pendidikan. Perlakuan diskriminatif tersebut menimbulkan rasa terpinggirkan dan ketidakadilan sosial yang mendalam, sehingga mendorong masyarakat pribumi untuk melakukan perlawanan terhadap tatanan sosial kolonial.³¹

Pada masa penjajahan, berbagai pergolakan muncul di sejumlah daerah sebagai upaya rakyat untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan kolonial.

³⁰ Poesponegoro, Sejarah Nasional Indonesia, 397-399.

³¹ Khaesyar Nisfhan Akbar Rosadi dan Eric Pradana Putra, "Stratifikasi Sosial: Penonton Bioskop di Hindia Belanda Awal Abad Ke-20", dalam jurnal: *Pangadereng*, Vol. 9, No. 2, (Desember 2024): 171, didownload melalui: 10.36869/pjhpish.v9i2.380.

Salah satu perlawanan terbesar dan paling berpengaruh adalah Perang Diponegoro yang berlangsung di Pulau Jawa pada tahun 1825-1830. Perang ini dipicu oleh kebijakan kolonial yang memberatkan rakyat, terutama beban pajak yang semakin menekan petani, serta campur tangan Belanda dalam urusan internal keraton. Ketegangan mencapai puncaknya ketika makam leluhur Diponegoro digusur untuk pembangunan jalan oleh pemerintah kolonial. Peristiwa ini tidak hanya mencerminkan tekanan ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk tekanan kolonial terhadap aspek budaya, karena tindakan tersebut dipandang melanggar nilai adat dan simbol kehormatan lokal. Intervensi terhadap tradisi inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu utama meletusnya Perang Jawa.³²

Perlawanan ini segera mendapat dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari keluarga keraton, priyayi, santri, petani, hingga pedagang kecil. Berlandaskan semangat religius, rakyat menggunakan senjata tradisional melawan kekuatan modern Belanda. Meski sempat menguasai pedesaan, perlawanan ini akhirnya melemah akibat strategi *Benteng Stelsel* dan keterbatasan logistik. Perang ini menjadi simbol persatuan politik, sosial, dan keagamaan dalam perjuangan melawan kolonialisme.³³

Setelah berakhirnya Perang Diponegoro, pergolakan rakyat tidak serta-merta mereda. Di Jawa Timur, ekspansi perkebunan tebu (*onderneming*) mendorong sistem pertanian yang semakin berorientasi komersial. Sementara

³² Hasnani Siri, Sejarah Pergerakan Nasional (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), 9-10.

³³ Siri, Sejarah Pergerakan Nasional, 9-28.

bebani pajak dan sewa tanah makin menekan, menyebabkan banyak petani kehilangan tanah garapan dan bergeser menjadi buruh tanpa lahan. Masuknya sistem ekonomi uang ke desa-desa tradisional mengubah struktur sosial pedesaan dan memperlebar kesenjangan antara rakyat pribumi dengan pemilik modal kolonial. Kondisi ini menimbulkan tekanan ekonomi berkepanjangan dan menjadi salah satu pemicu utama munculnya pergolakan sosial di berbagai daerah. Kehidupan yang bertabrakan dengan nilai-nilai Barat ini akhirnya menumbuhkan kebencian masyarakat terhadap dominasi asing.³⁴

Dalam kondisi tersebut, rakyat desa menolak tatanan kolonial dan mendambakan tatanan hidup baru yang selaras dengan tradisi pedesaan. Dari kondisi inilah muncul beragam bentuk protes kaum tani, ada yang memilih sikap pasif dengan menekankan aspek kerohanian, sebagaimana terlihat pada Gerakan Samin di Blora, namun ada pula yang mengambil jalan perlawanan terbuka dan radikal untuk menggulingkan kekuasaan kolonial serta menghidupkan kembali nilai-nilai tradisional.³⁵

Pergolakan tidak hanya muncul di desa-desa, tetapi juga meluas ke kalangan buruh perkotaan. Dalam bidang politik, kondisi ini diperparah oleh terbatasnya ruang partisipasi rakyat pribumi dalam sistem pemerintahan kolonial. Meskipun pemerintah Belanda membentuk *Volksraad* pada 1819 sebagai lembaga perwakilan, badan ini tidak memiliki kewenangan nyata dalam pengambilan keputusan politik dan lebih berfungsi sebagai alat legitimasi

³⁴ Heru Sukardi, dkk, Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Jawa Timur (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1982), 20.

³⁵ Sukardi, Sejarah Perlawanan, 20-21.

kekuasaan kolonial. Hak berserikat dan berkumpul rakyat sering dibatasi.³⁶

Situasi tersebut membuat saluran politik formal tidak mampu menampung aspirasi rakyat, sehingga aksi-aksi seperti pemogokan kaum buruh menjadi salah satu bentuk perlawanan yang dianggap paling efektif.

Berbagai aksi pemogokan mencerminkan perlawanan kelas pekerja terhadap sistem kolonial, terutama setelah memburuknya kondisi ekonomi rakyat Hindia Belanda setelah Perang Dunia I. Situasi ini mendorong lahirnya organisasi buruh, salah satunya Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB) pada 1919. Buruh mengalami kesenjangan yang mencolok dengan kaum modal, di mana keuntungan pegusaha terutama di sektor ekspor gula meningkat pesat, sementara upah buruh tetap rendah. Pada tahun yang sama, buruh pabrik di Yogyakarta yang tergabung dalam Personel Fabriek Bond (PFB) pada 1919, memulai pemogokan yang kemudian menyebar ke berbagai daerah di Jawa. PFB yang dipimpin Suryopranoto menuntut pengakuan sebagai wakil buruh dan kenaikan upah, tetapi tuntutan ini ditolak pengusaha. Pemerintah kolonial justru berpihak pada pemilik modal dengan melarang aksi mogok, meski mereka sendiri mengakui rendahnya upah buruh.³⁷

Pada 1920, diselenggarakan Kongres PPKB di Yogyakarta yang diikuti 22 serikat pekerja dengan 72.000 anggota. Namun, organisasi ini segera terpecah karena persaingan pengaruh antara kelompok Sarekat Islam (SI) dan kaum Komunis. Pada 1921, Semaun bersama 14 serikat pekerja keluar dan

³⁶ Simarmata, *The Role of the Volksraad*, 138-141.

³⁷ Bambang Suwondo, Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), 89-90.

membentuk *Revolutionaire Vakcentrale* (RV) di Semarang, sementara Suryopranoto dan Agus Salim melanjutkan PPKB di Yogyakarta. Perpecahan ini tidak menghentikan aksi buruh. Berbagai pemogokan tetap berlangsung, seperti aksi pegawai pengadaian di Yogyakarta pada 1922 yang dipicu perlakuan diskriminatif, hingga mogok besar pekerja kereta api di beberapa kota di Jawa termasuk Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta pada 1923 yang dipelopori oleh Semaun.³⁸ Dalam memperjuangkan hak-hak buruh, Semaun juga kerap menyuarakan tuntutan mengenai perbaikan kesejahteraan, mulai dari pengurangan jam kerja menjadi menjadi delapan jam sehari, pemberian tunjangan kemahalan, pembentukan dewan pendamai, hingga penetapan upah minimum sebesar satu *gulden* per hari. Tuntutan ini muncul karena adanya kesenjangan mencolok antara buruh Jawa dan buruh di Deli. Buruh perkebunan di Deli umumnya masih memperoleh gaji relatif layak, disertai tunjangan natura yang menjadikan hari pembayaran gaji sebagai momen istimewa. Sebaliknya, buruh di Jawa harus bekerja 10 hingga 12 jam per hari dengan bayaran rendah, rata-rata kurang dari f.14 untuk dua minggu kerja. Kondisi inilah yang mendorong aksi-aksi pemogokan semakin sering di Jawa.³⁹ Pemerintah kolonial merespon keras dengan membubarkan pemogokan, para pemimpin seperti Tan Malaka diasingkan, dan banyak buruh dipecat. Rentetan aksi buruh tersebut menunjukkan bahwa ketidakpuasan rakyat terhadap ketidakadilan

³⁸ Suwondo, Sejarah Kebangkitan, 91-92.

³⁹ Danan Tricahyono, "Buruh Dalam Sejarah Indonesia: Studi Tentang Aktivitas Buruh Pada Masa Pemerintah Kolonial Belanda Periode 1870-1942", dalam jurnal: *ISTORIA*, Vol. 16, No. 2 (September 2020): 8, didownload melalui: <https://journal.uny.ac.id/index.php/istoria>.

ekonomi semakin meluas, dan mendorong PKI untuk memperkuat gerakan buruh dalam kongres 1924 di Yogyakarta.⁴⁰

Selain di Yogyakarta, pergolakan politik dan sosial juga berkembang pesat di Bandung pada awal 1920-an. Peristiwa Cimareme (1919) sering dianggap sebagai pemicu munculnya gerakan radikal yang kemudian mendapat pengawasan dari pemerintah kolonial. Tokoh-tokoh seperti Semaun dan Tan Malaka, yang pada awalnya aktif di Yogyakarta, juga memainkan peran penting dalam pergerakan di Bandung. Bandung memiliki posisi penting karena menjadi tempat berkumpulnya kaum intelektual serta aktivis dari berbagai organisasi seperti Sarekat Islam, Indische Partij, Persatuan Pegawai Pegadaian Bumi Putera (PPPB), dan *Vereinigung van Spoor-en Tramwegpersoneel* (VSTP). Tokoh lain seperti H.O.S. Tjokroaminoto, Sosrokardono, Darsono, dan Moh. Sanoesi kerap hadir di Bandung dan menyuarakan kritik terhadap kebijakan kolonial. Kedekatan SI Bandung dengan SI Semarang juga menjadikan cabang ini berhaluan kiri dan dicap radikal, terlebih setelah PKI mulai menguat dan melakukan penetrasi ke tubuh SI.⁴¹

Gerakan radikal di Bandung berkembang melalui tiga tahap, yakni edukasi, agitasi, dan aksi. Tahap edukasi diwujudkan lewat sekolah rakyat ala Tan Malaka yang menanamkan kesadaran politik kepada kalangan muda dan buruh. Agitasi berlangsung lewat penerbitan surat kabar dan penyebaran pamflet, di mana tokoh-tokoh seperti Semaun, Alimin, dan Sugono turut

⁴⁰ Suwondo, Sejarah Kebangkitan, 92-93.

⁴¹ Agung Ramaadhan dan Yulia Sofiani, “Politik Reaksioner: Reaksi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda Terhadap Gerakan Radikal di Bandung Pada Tahun 1920-1927”, dalam jurnal: *Bihari*, Vol. 4, No. 2 (2021): 137-138.

memanfaatkan media untuk menyebarkan gagasan. Tahap aksi terlihat dari pemogokan yang semakin meluas: pemogokan pegawai PPPB di Cimahi (1922), mogok polisi pribumi (1923), hingga aksi besar VSTP yang digerakkan buruh kereta api di bawah pimpinan tokoh lokal seperti Sukrawinata dan Wirjatirta. Gelombang perlawanan semakin kuat dengan aksi pelemparan bom ke pendopo bupati (1926) yang kembali menegaskan Bandung sebagai salah satu pusat radikalisme di Jawa. Pemerintah kolonial merespon keras dengan langkah represif, mulai dari pemecatan massal, penangkapan tokoh-tokoh pergerakan, hingga pembuangan politik ke Boven Digul.⁴² Pola tindakan keras ini tidak hanya terjadi di Bandung, tetapi juga meluas di berbagai daerah lain di Jawa.

Pada pertengahan 1920-an, tekanan politik terhadap pergerakan semakin keras, khususnya kepada PKI yang dianggap berbahaya karena pengaruh komunisme kian meluas. Media pergerakan menyikap kebusukan sistem kolonial dan kapitalisme di hadapan rakyat. Simbol-simbol satir seperti karikatur Belanda digambarkan sebagai tuan gemuk yang menghisap tenaga rakyat melarat, menggambarkan jurang ketidakadilan sosial. Pada 1925, penangkapan besar-besaran terhadap tokoh PKI dilakukan, rapat umum selalu dibubarkan polisi, bahkan partai politik non-komunis juga mendapat tekanan. Hak bersidang dan berkumpul yang secara hukum dijamin, dalam praktik hampir tidak berlaku. Situasi semakin tegang di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal D. Fock yang menjalankan politik tangan besi. *Volksraad* pun dinilai

⁴² Ramaadhan, Politik Reaksioner, 138-140.

tidak berguna, hanya menjadi alat pengusaha asing untuk menambah keuntungan.⁴³

Memasuki akhir 1926, keresahan rakyat memuncak. Meskipun Gubernur Jenderal baru, A.C.D. de Graeff, mencoba mengambil hati rakyat dengan politik lunak, kaum pergerakan sudah kehilangan kepercayaan. Akhirnya pada 12-13 November 1926, pecah pemberontakan di Banten dan Jawa Barat yang awalnya diprakarsai kaum Komunis. Kerusuhan juga merembet ke Priangan, Jakarta, bahkan Jawa Tengah. Di Sumatera Barat, pemberontakan Meletus pada Januari 1927 yang dikenal sebagai Pemberontakan Silungkang. Rakyat menyerang pos polisi, merusak sarana transportasi, hingga membakar Perkebunan. Ribuan orang terlibat, termasuk buruh, haji, dan santri. Namun, pemberontakan ini tidak terkoordinasi dengan baik dan minim persenjataan, sehingga mudah dipatahkan. Banyak pemberontakan ditangkap, dipenjara, dibunuh, atau dibuang ke Digul. Meski gagal, peristiwa ini menjadi puncak akumulasi kemarahan rakyat terhadap penindasan kolonial.⁴⁴

Meskipun berbagai pergolakan tersebut berhasil ditumbas melalui penangkapan, pengasingan, dan bahkan pembunuhan terhadap para pemimpinnya, kenyataannya perlawanannya tersebut telah menunjukkan bahwa kekuasaan Belanda mulai diguncang oleh kesadaran politik masyarakat. Pemerintah kolonial menanggapinya bukan hanya tidak represif, tetapi juga dengan strategi simbolis berupa penyelenggaraan perayaan resmi. Perayaan

⁴³ Suwondo, Sejarah Kebangkitan, 93-94.

⁴⁴ Suwondo, Sejarah Kebangkitan, 94-95.

tersebut dijadikan sarana untuk menampilkan stabilitas, kekuatan, serta kesan kejayaan monarki Belanda di mata rakyat jajahan. Oleh karena itu, selain menekan melalui kekerasan, Belanda juga berusaha merebut hati rakyat melalui legitimasi simbolik, agar kekuasaan kolonial tetap diakui dan dianggap serta tidak tergeserkan oleh perlawanan-perlawanan yang kian meluas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

BENTUK-BENTUK PERAYAAN PEMERINTAHAN RATU WILHELMINA DI HINDIA BELANDA (1923-1948)

Perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina di Hindia Belanda pada tahun 1923 hingga 1948 tidak hanya diselenggarakan di satu tempat, melainkan juga di beberapa tempat lain yang dianggap penting oleh pemerintah kolonial, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Penyelenggaran perayaan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran Belanda akan terancamnya stabilitas kolonial akibat berbagai pergolakan yang terjadi masa itu. Dengan mengadakan perayaan di sejumlah daerah, pemerintah berusaha menampilkan kekuasaannya di tengah-tengah masyarakat. Dapat dikatakan bahwa perayaan ini menjadi salah satu strategi kolonial untuk memperkuat legitimasi kekuasaan, dengan melibatkan daerah-daerah strategis yang memiliki daya tarik tersendiri sebagai tempat penyelenggaraan.

Setiap daerah yang dipilih memiliki karakteristik yang mendukung tujuan perayaan. Karesidenan Besuki misalnya, dipandang strategis karena posisinya yang memudahkan pengawasan kolonial di ujung timur Jawa.¹ Yogyakarta memiliki kedudukan istimewa sebagai daerah otonom dan pusat budaya Jawa.²

¹ G. A. Ohorella dan Restu Gunawan, Sejarah Lokal Peranan Rakyat Besuki Jawa Timur Pada Masa Perang Kemerdekaan 1945-1950 (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001), 2.

² Aulia Nurisyana Arkanti, dkk, Sejarawan Dalam Pusaran Keistimewaan: Biografi Djoko Suryo (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Sekolah Vokasi Program Studi Kearsipan, 2018), 37.

Surabaya berperan sebagai pelabuhan utama dan pusat perdagangan,³ sedangkan Batavia menempati posisi penting sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian.⁴ Sementara itu, kota-kota besar dan wilayah administratif lainnya juga memiliki karakteristik tersendiri, meskipun tidak dibahas secara rinci dalam penelitian ini.

Lebih jauh lagi, pemilihan lokasi tidak semata-mata ditentukan oleh faktor strategis, melainkan juga mengandung makna politik dan kultural. Lokasi perayaan dijadikan sebagai alat kekuasaan, di mana pemerintah kolonial berupaya menampilkan kekuasaannya dan menarik simpati masyarakat melalui penyediaan hiburan. Dengan mengubah fungsi ruang publik menjadi arena pesta, penguasa berusaha membangun wibawanya sekaligus menunjukkan kesan kedekatan dengan rakyat jajahan. Pada akhirnya, momen ini berfungsi ganda, yaitu sebagai simbol legitimasi kolonial dan sarana propaganda untuk menegaskan tidak adanya jarak antara penguasa dan yang dikuasai.⁵ Dengan demikian, penyebaran lokasi perayaan mencerminkan upaya pemerintah kolonial memperluas kekuasaan dan pengaruhnya di mata masyarakat Hindia Belanda.

³ Muhammad Lingga Andana, Izza Yuspriana Afhimma, dan Silvia Nurul Ashiva, “Perkembangan Tata Kota Surabaya Pada Tahun 1870-1940”, dalam jurnal: *HISTORIOGRAPHY*, Vol. 1, No. 2 (2021): 147.

⁴ Hendra Kusuma, “Situs Kota Tua di Batavia (1619-1942) Sebagai Bahan Ajar Mata Pelajaran Sejarah Peminatan”, dalam jurnal: *KRINOK*, Vol. 3, No. 3 (2021): 111, didownload melalui: 10.22437/krinok.v3i3.39329.

⁵ Fabianus Hiapianto Koesoemadinata, “Pasar Malam Komidi Putar: Relasi Kuasa Dalam Dinamika *Fluid-Placemaking*” (*Disertasi: Program Ilmu Sasutra, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, 2022*), 49-50, didownload melalui: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920527952&lokasi=lokal>.

A. Pementasan Budaya di Karesidenan Besuki

Karesidenan Besuki menjadi salah satu wilayah di Hindia Belanda yang turut menyelenggarakan perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina pada tahun 1923. Pemilihan Besuki memperlihatkan bahwa wilayah di ujung timur Pulau Jawa ini dianggap penting dalam upaya menanamkan legitimasi kekuasaan Belanda. Secara administratif, Karesiden Besuki dibentuk pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van der Capellen berdasarkan Peraturan Komisaris Jenderal No. 3 tanggal 9 Januari 1819 yang dimuat dalam *Staatblad* No. 16 Tahun 1819, yang menetapkan pembentukan 20 karesidenan di Jawa, termasuk Besuki.⁶ Wilayah ini meliputi *Regentschap* Besuki, *Regentschap* Panarukan, *Regenschap* Bondowoso, dan *Afdeeling* Jember, dengan pusat pemerintahan yang pada tahun 1923 (masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dirk Fock, 1921-1926) masih berada di Panarukan, sebelum akhirnya dipindahkan ke Bondowoso tahun 1927.⁷

Pada perkembangannya, wilayah-wilayah di bawah Karesidenan Besuki mengalami perubahan status administratif. Pada tahun 1818-1819, Panarukan masih berada di bawah *Regentschap* Besuki dengan status *afdeeling*, yang saat itu dipimpin Bupati pertama, Raden Adipati Ario Prawira Diningrat. Pada 1850, Panarukan ditingkatkan menjadi *regentschap* dan pada 1923 jabatan Bupati dipegan oleh R.M.T.A. Poestokopranowo. Sementara itu, Bondowoso yang

⁶ *Staatblad Van Nederlandsch Indie* No. 16, tanggal 9 Januari 1819.

⁷ Eka Agustiningrum, “Pemanfaatan Kembali *Lost Space* di Ex-Kawasan Pusat Kegiatan Karesidenan Besuki Kabupaten Bondowoso” (*Skripsi*: Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, 2015), 1, didownload melalui: <https://share.google/QWmpbIWVwQD46PvkE>.

semula berstatus *afdeeling* di bawah Besuki ditetapkan sebagai *regentschap* pada 1819 dan pada 1923 dipimpin oleh R.T. Sentot Sastroprawiro. Wilayah Bondowoso kala itu masih mencakup Jember yang berstatus *afdeeling*, hingga akhirnya ditingkatkan menjadi *regentschap* tersendiri pada 1928.⁸

Perubahan administratif tersebut turut mempengaruhi pertumbuhan populasi di Karesidenan Besuki pada akhir Abad XIX hingga awal Abad XX yang sangat dipengaruhi oleh arus migrasi, terutama dari Madura. Faktor pendorong migrasi tersebut antara lain kondisi Madura yang kurang subur dan padat penduduk, serta kewajiban kerja paksa dan militer yang berat. Sementara itu, faktor penarik adalah ketersediaan lahan subur, peluang kerja di sektor perkebunan, serta hubungan historis antara Madura dengan wilayah Besuki, khususnya Bondowoso. Perkembangan infrastruktur transportasi seperti jalur kereta api dan perekutan tenaga kerja di perkebunan tembakau juga mempercepat proses perpindahan penduduk. Akibatnya, Besuki berkembang menjadi kawasan multi-etnis dengan dominasi kelompok Madura, Jawa, dan Using, yang masing-masing membentuk ciri budaya tersendiri di wilayah tersebut.⁹

Keberagaman masyarakat tersebut terbentuk melalui proses migrasi panjang yang telah berlangsung sejak akhir Abad XVIII. Orang Madura mulanya menetap di wilayah pesisir Besuki dan Panarukan, lalu meluas ke

⁸ Jati Saputra Nuriansyah, Intan Aninditya, dkk, “Dari Besuki ke Bondowoso: Perkembangan Kawasan *Frontier* Terakhir di Jawa 1800-1930”, dalam jurnal: *Historiography*, Vol. 2, No. 4 (Oktober 2022): 475-478.

⁹ Nawiyanto, Perekonomian Karesidenan Besuki Masa Kedudukan Jepang (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2019), 39-39.

Bondowoso dan Jember utara. Sementara itu, orang Jawa banyak mendiami bagian selatan Jember hingga kawasan Genteng (Banyuwangi), sedangkan masyarakat Osing merupakan penduduk asli Banyuwangi. Selain itu, hadir pula kelompok lain seperti Tionghoa, Arab, Eropa, Sunda, Bali, dan Makassar dalam jumlah yang lebih kecil. Akses transportasi melalui pelabuhan-pelabuhan di Besuki membuat wilayah ini menjadi tempat pertemuan berbagai kelompok, sehingga terbentuk kehidupan sosial yang beragam dan terbuka terhadap pengaruh luar.¹⁰ Dari interaksi tersebut lahirlah berbagai ekspresi budaya, khususnya dalam bentuk kesenian, yang kemudian dimanfaatkan sebagai sarana dalam perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina. Salah satu contoh bentuk budaya yang dimunculkan dalam perayaan tersebut adalah kesenian aduan sapi yang erat kaitannya dengan tradisi masyarakat Madura di Jember. (Lihat gambar 3.1)



Gambar 3. 1 Aduan Sapi di Jember Tahun 1923

Sumber: kitlv.nl 38983 diakses pada 24 Agustus 2025

¹⁰ Pradita Arliana, “Pendidikan Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda di Karesidenan Besuki 1901-1942” (*Skripsi*: Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember, 2020), 30-31, didownload melalui: <https://share.google/pafdq116R5Vlzy5of>.

Wujud keberagaman masyarakat Jember terlihat pada gambar kesenian diatas. Salah satu pertunjukan utama dalam peringatan 25 tahun pemerintahan Ratu Wilhelmina adalah aduan sapi. Tradisi ini erat kaitannya dengan dominasi masyarakat Madura di wilayah Jember utara, yang sejak lama mewariskan kebiasaan memelihara dan memperlombakan sapi. Kebiasaan tersebut didukung oleh kondisi ekologi Jember yang subur serta memiliki banyak padang rumput yang mendukung pemeliharaan sapi.¹¹ Gambar pertunjukan memperlihatkan arena yang dikelilingi penonton dengan posisi sapi saling berhadapan, menandakan bahwa aduan ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga kebanggaan masyarakat Madura. Dengan kata lain, penampilan aduan sapi dalam perayaan ini dapat dipahami sebagai ekspresi budaya Madura di Jember, yang lahir dari proses migrasi dan interaksi antar etnis. Keberagaman tersebut tidak hanya ditunjukkan oleh masyarakat Madura, tetapi juga tampak dari kehadiran kesenian Jawa. Salah satu bentuknya adalah pertunjukan wayang wong yang dihadirkan dalam rangka memperingati pemerintahan Ratu Wilhelmina. (Lihat gambar 3.2)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹¹ Sutjitro, “Aduan Sapi: Studi Tentang Perubahan Fungsi Aduan Sapi Pada Masyarakat di Kabupaten Jember” (*Tesis*: Airlangga, 2003), 2-3, didownload melalui: <http://lib.unair.ac.id>.



Gambar 3. 2 Wayang Wong di Jember Tahun 1923

Sumber: kitlv.nl 38990 diakses pada 24 Agustus 2025

Kesenian ini pada dasarnya merupakan adaptasi dari wayang kulit, namun tokoh-tokohnya diperankan langsung oleh manusia sehingga lebih menyerupai sebuah seni teater, seperti terlihat pada gambar diatas. Wayang wong berakar kuat dalam tradisi masyarakat Jawa, tetapi dalam perkembangannya di masa kolonial turut dipengaruhi unsur-unsur seni teater Barat, baik dari segi dekorasi panggung, naskah, maupun kostum yang digunakan.¹² Kehadirannya dalam perayaan tersebut tidak hanya memperlihatkan kelanjutan tradisi Jawa, melainkan juga mencerminkan adanya proses adaptasi budaya yang terjadi akibat interaksi dengan kolonialisme. Selain menghadirkan kesenian rakyat, perayaan di wilayah Karesidenan Besuki juga menghadirkan atraksi yang berhubungan dengan kekuatan kolonial. Salah satunya adalah demonstrasi polisi lapangan yang diadakan di Bondowoso. (Lihat gambar 3.3)

¹² Saidatun Nisak, “Akulturasi Budaya Timur Asing, Eropa dan Pribumi di Jember Tahun 1859-1942” (*Skripsi*: Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, FUAH, UIN KHAS Jember, 2025), 67-68, didownload melalui: <https://share.google/OmYJFeftv6mAqnKD0>.



Gambar 3. 3 Demonstrasi Polisi Lapangan di Bondowoso Tahun 1923

Sumber: kitlv.nl 38991 diakses pada 24 Agustus 2025

Gambar diatas memperlihatkan barisan polisi melakukan pertunjukan di lapangan, lengkap dengan persenjataan dan komando dari perwira. Kehadiran mereka menunjukkan peran aparat kolonial dalam menjaga keamanan pemerintahan kolonial di Bondowoso dan sekitarnya. Peran yang ditampilkan pun tidak jauh berbeda dengan *Amtenar Bumiputra* yang mengabdi kepada pemerintah kolonial. Karena itu, atraksi tersebut bukan sekedar hiburan, melainkan juga sarana untuk menampilkan kekuatan dan kedisiplinan kolonial kepada masyarakat. Selain pertunjukan yang bernuansa militer, perayaan di Bondowoso juga menyediakan ruang hiburan bagi kalangan Eropa. Salah satu bentuknya adalah pesta dansa yang digelar secara eksklusif, memperlihatkan bagaimana perayaan ini juga menjadi ajang interaksi sosial bagi golongan elit kolonial. (Lihat gambar 3.4)



Gambar 3. 4 Pesta Dansa Masyarakat Eropa di Bondowoso Tahun 1923

Sumber: kitlv.nl 38993 diakses pada 24 Agustus 2025

Berdasarkan gambar diatas, tampak digelar sebuah pesta dansa (*Oranjebal*) di gedung setempat, di mana orang-orang Eropa mengenakan pakaian resmi dan berdansa di bawah lampu indah dengan irungan musik. Kehadiran pesta dansa ini tidak terlepas dari keberadaan komunitas Eropa yang bermigrasi dan menetap di wilayah Karesidenan Besuki, salah satunya di Bondowoso. Lebih jauh, pesta ini juga menunjukkan adanya ruang sosial yang khusus bagi kalangan elit Eropa, di mana tradisi dan ekspresi budaya mereka dipelihara sebagai penanda identitas dan pembeda dari masyarakat pribumi. Hal ini selaras dengan penelitian yang menyebutkan bahwa etnis Eropa bermigrasi ke Bondowoso dengan membawa kebudayannya sendiri.¹³

Berbeda dengan Bondowoso yang perayaannya didominasi kalangan Eropa, di Situbondo tampak keterlibatan komunitas Tionghoa dan Arab dalam memeriahkan peringatan pemerintahan Ratu Wilhelmina. Kedua komunitas ini

¹³ Latifatul Izzah, Suharto, dan Neneng Afiah, “Puncak Keemasan Budaya Masyarakat Bondowoso Era Raden Bagoes Assra Sampai Era Kolonial,” dalam Novi Anoegrajekti dkk, *Sastra dan Perkembangan Media* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2018), 658.

memperlihatkan identitas budayanya melalui pertunjukan khas masing-masing.

(Lihat gambar 3.5 dan 3.6)



Gambar 3. 5 Perayaan Komunitas Cina di Situbondo Tahun 1923

Sumber: kitlv.nl 38968 diakses pada 24 Agustus 2025



Gambar 3. 6 Perayaan Komunitas Arab di Situbondo Tahun 1923

Sumber: kitlv.nl 38976 diakses pada 24 Agustus 2025

Pada gambar diatas, komunitas Tionghoa menampilkan pertunjukan *Liang Liong*, sebuah tarian tradisional khas mereka, sementara komunitas Arab tampak berbaris dengan busana tradisional khas Timur Tengah. Kehadiran dua komunitas ini tidak hanya menunjukkan partisipasi mereka dalam memeriahkan perayaan tersebut, tetapi juga memperlihatkan bagaimana identitas budaya

masing-masing diekspresikan di tengah perayaan kolonial, sekaligus menegaskan adanya penerimaan bagi berbagai etnis untuk turut serta dalam perayaan politik kolonial. Di sisi lain, di Besuki perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina juga tampak dalam keterlibatan pejabat kolonial dan penataan gedung pemerintahan, sebagaimana terlihat dari dokumentasi resmi yang menampilkan jajaran pemerintahan Karesidenan Besuki serta hiasan pada gedung pusat. (Lihat gambar 3.7 dan 3.8)



Gambar 3. 7 Residen H.A. Voet dan Para Staf di Besuki Tahun 1923

Sumber: kitlv.nl 38994 diakses pada 24 Agustus 2025



Gambar 3. 8 Kantor Warga di Besuki Tahun 1923

Sumber: kitlv.nl 38995 diakses pada 19 Oktober 2025

Berdasarkan informasi dari gambar diatas, perayaan 25 tahun pemerintahan Ratu Wilhelmina di Besuki turut dihadiri oleh pejabat kolonial setempat, antara lain Residen H.A. Voet beserta para stafnya yang berfoto bersama di depan gedung pusat pemerintahan Karesidenan Besuki. Sementara itu, gambar kantor yang dihiasi lampu pada malam hari memperlihatkan bentuk partisipasi publik dalam suasana perayaan yang lebih luas. Mengacu pada penelitian lain yang menyebutkan jika perayaan di wilayah Karesidenan Besuki diisi dengan pasar malam, karnaval, festival, hingga pertunjukan seni yang melibatkan masyarakat lintas etnis.¹⁴ Oleh sebab itu, sangat mungkin jika perayaan di Besuki juga mengikuti pola yang sama, yaitu terdiri atas acara resmi di tingkat pemerintahan serta kegiatan publik seperti pesta rakyat atau pertunjukan kesenian pada malam hari, yang tercermin dari dokumentasi gedung pemerintahan yang dihiasi lampu.

B. Jamuan Makan Malam dan Pertunjukan Kesenian Jawa di Yogyakarta

Perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina tidak hanya diselenggarakan di wilayah administratif kolonial seperti karesidenan pada umumnya, tetapi juga di pusat-pusat kebudayaan tradisional Jawa, salah satunya Yogyakarta. Kedudukan Yogyakarta bersifat istimewa karena menjadi pusat Kesultanan yang tetap menjalankan roda pemerintahannya secara otonom di bawah

¹⁴ Krisnadi, Asrumi, dan Supiastutik, “*The Existence of Jember Fashion Carnaval (Jfc) in Jember Regency-Indonesia 2003-2021*”, dalam jurnal: *International Journal of Social Science and Human Research*, Vol. 6, No. 8 (Agustus 2023): 4947, didownload melalui: 10.47191/ijsshr/v6-i8-45, Impact factor- 6.686.

pengawasan kolonial.¹⁵ Atas dasar itu, keterlibatan Keraton Yogyakarta dalam perayaan tersebut memperlihatkan strategi Belanda dalam mengaitkan legitimasi kekuasaannya dengan otoritas politik tradisional Jawa.

Secara administratif, Yogyakarta bukanlah karesidenan seperti Besuki, melainkan Daerah *Swapraja* yang dipimpin oleh sultan. Pada tahun 1921-1939, takhta Yogyakarta dipegang oleh Sri Sultan Hamengkubuwana VIII, seorang penguasa yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah kolonial. Status Yogyakarta ini membedakan Yogyakarta dari wilayah-wilayah administratif lainnya. Bersama Kasunanan Surakarta, Kadipaten Pakualam, yang semuanya merupakan pecahan dari Kerajaan Mataram Islam, Kesultanan Yogyakarta memiliki hak otonomi tertentu dalam mengelola wilayahnya. Hal ini membuat pemerintah kolonial tidak dapat secara sepikir menjalankan proyek atau memanfaatkan tanah tanpa persetujuan Sultan. Sebagai imbalannya, penguasa lokal memperoleh kompensasi berupa sewa atas tanah yang digunakan.¹⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa Yogyakarta menempati istimewa, tidak sepenuhnya merdeka, tetapi juga tidak tunduk sepenuhnya sebagai daerah administratif biasa.

Keraton Yogyakarta sendiri menempati posisi penting sebagai pusat kebudayaan Jawa yang adiluhung dan sarat nilai filosofis. Berbagai tradisi klasik dijaga dan dilestarikan di dalamnya, termasuk praktik jamuan makan

¹⁵ Suratmin, dkk, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Istimewa Yogyakarta* (Jakarta: Proyek IDSN, 1990), 8.

¹⁶ Dimas Wihardiyanto, Ahmad Sarwadi, dan Achmad Djunaedi, “*The Development of the Dutch Colonial Settlement in the City of Yogyakarta after the Implementation of the Decentralisation Wet Policy (1903-1942)*”, dalam jurnal: *Arsitektur*, Vol. 13, No. 2 (Juli 2023): 167, didownload melalui: <http://dx.doi.org/10.36448/ja.v13i2.2833>.

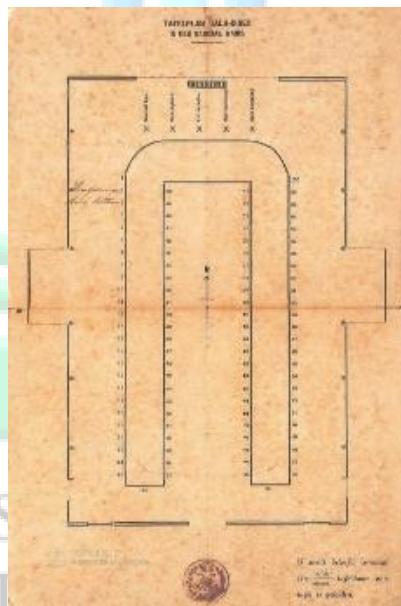
yang memiliki makna sosial maupun simbolis. Meski demikian, kebudayaan keraton tidak sepenuhnya tertutup akan pengaruh Barat yang masuk sejak awal Abad XX melalui politik asosiasi. Pergaulan antara kalangan keraton dan orang-orang Eropa melahirkan gaya hidup yang memadukan tradisi Jawa dengan budaya Barat, salah satunya tampak dalam pola perjamuan. Situasi ini mencerminkan keterbukaan masyarakat keraton terhadap unsur budaya asing tanpa menghilangkan identitas Jawa yang tetap dijadikan landasan utama.¹⁷

Tradisi jamuan makan di Keraton Yogyakarta dalam rangka perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina sebenarnya sudah terlihat sejak peringatan 25 tahun pada 1923. Berdasarkan laporan surat kabar Belanda, Sultan Yogyakarta saat itu menggelar jamuan makan malam di kraton yang dihadiri pejabat kolonial, termasuk Residen Kedoe dan Residen Djokja. Acara berlangsung meriah dengan tata ruang yang dihiasi warna oranye dan biru muda, simbol khas Belanda, serta dilengkapi berbagai hiburan hingga pesta dansa. Kemeriahan tersebut bahkan berlanjut hingga dini hari dengan pementasan wayang, mencerminkan perpaduan budaya Jawa dan Eropa dalam satu rangkaian acara resmi.¹⁸ Kehadiran sultan dan pejabat kolonial dalam satu panggung perayaan menunjukkan eratnya hubungan politik sekaligus strategi kolonial dalam mengaitkan legitimasi kekuasaan dengan otoritas tradisional Jawa.

¹⁷ Ayu Amalya Ma'as dan Dewi Yuliati, "Diplomasi Kebudayaan antara Keraton Yogyakarta dan Pemerintah Kolonial Belanda Pada Masa Pemerintahan Sultan Hamengku Buwana VIII, 1921-1939", dalam jurnal: *Historiografi*, Vol, 1, No. 2 (2020): 144-145.

¹⁸ J. Hallermann, "De Sumatra post", 21 September 1923, 5. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011023400>.

Salah satu bentuk akulturasi tersebut tampak pada jamuan makan malam yang digelar dalam rangka peringatan 40 tahun pemerintahan Ratu Wilhelmina pada 10 September 1938 di Bangsal Manis. Dalam seremoni resmi ini, keraton tidak hanya mempertahankan tata cara tradisional, tetapi juga mengadopsi etiket serta penggunaan meja makan ala Eropa. Bukti mengenai akulturasi ini dapat dilihat pada arsip denah meja makan dalam *gala dinner*, yang menunjukkan bagaimana pengaruh Barat masuk ke dalam tatanan budaya keraton tanpa sepenuhnya menghapus identitas Jawa yang melekat.¹⁹ (Lihat pada gambar 3.9)



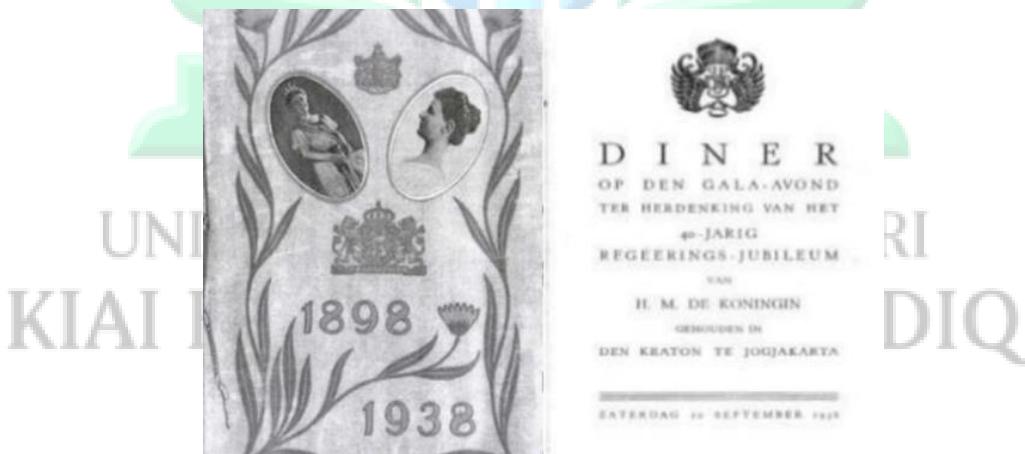
Gambar 3.9 Denah Meja Makan di Bangsal Sari Tahun 1938

Sumber: Fasya, 2024: 20.

Pergantian pola jamuan dari lesehan menuju penggunaan meja makan seperti pada gambar diatas menandai adanya penetrasi budaya kolonial. Dalam istilah Belanda, praktik ini dikenal dengan *rijsttafel*, sebuah model perjamuan

¹⁹ Bambang Muhammad Fasya Azhara dan Desita Dwi Utami, "Pemberitaan Seremoni Keraton Yogyakarta di Surat Kabar Yang Terhimpun Dalam Situs Delpher (1923-1940)", dalam Masami Okabe, *Internasional Symposium on Javanese Culture* (Kraton Yogyakarta, 2024): 20.

yang dipandang mewah karena menampilkan banyak hidangan dalam tata penyajian yang rapi. Bagi bangsawan keraton, jamuan tidak semata berfungsi sebagai ajang menjamu tamu, melainkan juga sebagai sarana untuk menunjukkan status sosial sekaligus partisipasi mereka dalam perayaan Kerajaan Belanda.²⁰ Selain itu, bentuk akulturasi lain juga tampak melalui kartu menu *gala dinner* yang digunakan dalam peringatan 40 tahun pemerintahan Ratu Wilhelmina di Yogyakarta. Kartu menu ini bukan sekedar daftar hidangan, melainkan juga merepresentasikan budaya kolonial yang ingin ditampilkan oleh keraton. Kehadirannya menandai pergeseran dari jamuan Jawa sederhana menuju tata cara makan Barat yang sarat simbol. Hal tersebut menjadi bukti bahwa akulturasi tidak hanya tampak pada bentuk fisik jamuan, tetapi juga merambah detail-detail kecil dalam perayaan. (Lihat gambar 3.10)



Gambar 3. 10 Kartu Menu Gala Dinner 40 Tahun Pemerintahan Ratu Wilhelmina di Yogyakarta Tahun 1938

Sumber: Wijanarko, 2021: 54.

²⁰ Fasya, Pemberitaan Seremoni, 20-21.

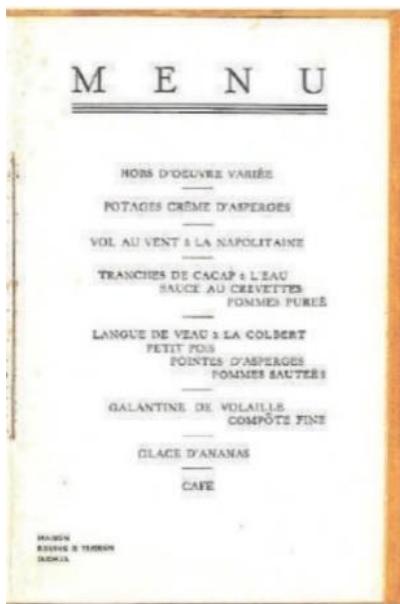
Pada kartu menu tersebut tampak foto sang ratu ditampilkan sebagai bentuk penghormatan. Selain itu, menu ditulis dalam bahasa Prancis dan Belanda, dua bahasa yang identik dengan *prestise* budaya Eropa.²¹ Pemilihan bahasa asing ini memperlihatkan bagaimana keraton menyesuaikan diri dengan standar kolonial, sekaligus menghubungkan perayaan lokal dengan simbol kekuasaan monarki Belanda. Salah satu momen yang mempertegas akulturasi tersebut terlihat pada jamuan makan malam resmi di Bangsal Manis, yang menampilkan tata aturan makan dan daftar menu bergaya Eropa. (Lihat gambar 3.11 dan 3.12)



Gambar 3.11 Jamuan Makan di Yogyakarta, 1938.

Sumber: Wijanarko, 2021: 55.

²¹ Ajid Thohir dan Bambang Muhammad Fasya Azhara, “Pengaruh Islam dan Eropa Dalam Budaya Kuliner di Keraton Yogyakarta dan Surakarta Abad ke-19 dan ke-20 Masehi,” dalam jurnal: *Kawistra*, Vol. 12, No. 2 (Agustus 2022): 224, didownload melalui: <https://doi.org/10.22146/kawistara.70935>.



Gambar 3. 12 Daftar Menu Gala Dinner 40 Tahun Pemerintahan Ratu Wilhelmina di Yogyakarta Tahun 1938

Sumber: Thohir, 2022: 223.

Jamuan makan malam tersebut dihadiri 105 tamu undangan, salah satunya adalah Gubernur J. Bijleveld, dengan susunan meja mengikuti aturan formal ala Eropa. Hidangan yang disajikan beragam, mulai dari sup krim asparagus, olahan ikan kakap, lidah sapi ala Colbert, galantine daging unggas, hingga es krim nanas dan kopi. Seluruh santapan disiapkan oleh penyedia kuliner Eropa, Bruinn en Tijssen, yang semakin menegaskan kemewahan acara sekaligus menunjukkan keterlibatan langsung pihak kolonial dalam perayaan tersebut.²²

Dalam setiap jamuan makan malam yang digelar di Keraton Yogyakarta, hiburan berupa kesenian selalu menjadi bagian penting untuk memeriahkan suasana. Beragam pertunjukan seperti tari Srimpi, gamelan, wayang wong,

²² Fajar Wijanarko, "Pistha Ageng: Perubahan Pola Jamuan Bangsawan Yogyakarta Tahun 1855-1939," dalam jurnal: *Prajnaparamita*, Vol. 10, No. 1 (Agustus 2021): 53.

musik orkestra, hingga lakon dipentaskan di hadapan para tamu.²³ Kehadiran seni pertunjukan ini menunjukkan bahwa meskipun tata cara jamuan semakin bercorak eropa, keraton tetap menghadirkan elemen budaya Jawa sebagai bentuk keterlibatan masyarakat pribumi.²⁴ Para penampil yang berasal dari kalangan lokal memperlihatkan bagaimana keikutsertaan pribumi dalam perayaan kolonial diwujudkan, meski hanya sebatas sebagai pengisi hiburan. Hal ini sejalan dengan arsip visual KITLV yang merekam pementasan tari srimpi pada resepsi 40 tahun pemerintahan Ratu Wilhelmina, membuktikan bahwa kesenian Jawa memang menjadi bagian integral dari rangkaian perayaan resmi di keraton. (Lihat gambar 3.13)



Gambar 3. 13 Pertunjukan Tarian Srimpi di Keraton Yogyakarta Tahun 1938

Sumber: kitlv.nl 35232 diakses pada 02 Oktober 2025

Gambar ditas memperlihatkan bagaimana kesenian Jawa dihadirkan dalam perayaan kolonial yang sarat etiket Eropa. Dengan melibatkan pribumi, salah satunya pada tari srimpi tersebut, keraton menegaskan eksistensi budaya lokal

²³ Thohir, Pengaruh Islam, 222.

²⁴ Fasya, Pemberitaan Seremoni, 22.

sekaligus menempatkannya dalam kerangka legitimasi kolonial. Sebagai konsekuensinya, jamuan makan malam dan pertunjukan kesenian Jawa di Yogyakarta tidak hanya merefleksikan kemewahan ala Barat, tetapi juga memperlihatkan peran budaya Jawa sebagai simbol yang menghubungkan kekuasaan tradisional dengan kekuasaan kolonial Belanda, sekaligus menjadi bagian dari strategi kolonial dalam mengukuhkan kekuasaan Ratu Wilhelmina di tanah Jawa.

C. Pasar Gambir di Batavia

Pada masa pemerintahan kolonial di Hindia Belanda, Batavia menjadi pusat pemerintahan sekaligus kota modern yang penting. Sebagai ibu kota, Batavia tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi kolonial, tetapi juga berkembang menjadi pusat perdagangan, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Sejak Abad XVIII, kota ini beralih dari sekedar pelabuhan besar untuk perdagangan rempah-rempah menjadi pusat kendali pemerintahan Belanda di Hindia. Perubahan status administratif pun terjadi, pada 1905 Batavia ditetapkan sebagai *gemeente* dan kemudian pada 1935 statusnya meningkat menjadi *Stadsgemeente Batavia*, yang semakin menegaskan kedudukannya sebagai pusat kota modern kolonial.²⁵

Dari segi perekonomian, Batavia berkembang pesat seiring meningkatnya arus perdagangan internasional. Dinamika global mendorong kota ini untuk melakukan berbagai penyesuaian, terutama setelah dibukanya *Terusan Suez*

²⁵ Kusuma, Situs Kota Tua, 111-112.

pada 1869 yang mempersingkat jalur pelayaran antara Eropa dan Asia. Kemajuan teknologi perkапalan dengan hadirnya kapal uap juga mempercepat arus transportasi, sehingga lalu lintas kapal menuju dan keluar Batavia semakin padat. Kondisi ini menuntut adanya fasilitas modern untuk menunjang aktivitas pelayaran jarak jauh. Hal tersebut tampak dari pembangunan Pelabuhan Tanjung Priok, penyediaan sarana angkutan umum, serta jaringan kereta api yang menghubungkan Batavia dengan daerah penghasil komoditas ekspor.²⁶

Perkembangan tersebut diikuti dengan penataan ruang kota yang melahirkan kawasan *Weltevreden* sebagai pusat baru Batavia. Kawasan ini berisi pertokoan, hotel, restoran, kafe, serta tempat hiburan di sekitar Noordwijk, Rijswijk, Harmoni, hingga Pasar Baru, dan menjadi simbol gaya hidup modern kolonial. Inisiatif pemindahan pusat kota dilakukan oleh Gubernur Jenderal H.W. Daendels yang membangun Istana Daendels (Witte Palais) serta lapangan besar seperti *Koningsplein* dan *Waterlooplein*. Lapangan tersebut awalnya berfungsi untuk parade militer dan upacara resmi, tetapi kemudian juga dimanfaatkan sebagai ruang publik, pasar malam, pameran, hingga pertunjukan hiburan.²⁷

Kawasan *Weltevreden* yang telah tumbuh sebagai pusat aktivitas sosial dan ekonomi inilah yang kemudian menjadi panggung utama dalam berbagai perayaan kenegaraan, termasuk peringatan 25 dan 40 tahun pemerintahan Ratu

²⁶ Ksatria Dwithama dan Taopik Tri Sutrisno, "Kajian Sejarah Perkembangan Kota Jakarta," dalam jurnal: *IONIC*, Vol. 1, No. 1 (2022): 22-23.

²⁷ G. Andika Ariwibowo, "Perkembangan Budaya Kosmopolitan di Batavia 1905-1942," dalam jurnal: *Handep*, Vol. 3, No. 1 (Desember 2019): 63-64, didownload melalui: 10.33652/handep.v3i1.66.

Wilhelmina yang diperingati dengan mengadakan Pasar Gambir. Pasar Gambir merupakan pasar malam pertama yang diselenggarakan pemerintah Hindia Belanda. Acara ini pertama kali digelar pada 1898 untuk merayakan penobatan Ratu Wilhelmina. Perayaan tersebut berlangsung meriah dengan menyulap Batavia menjadi kota penuh hiburan, Pelabuhan Tanjung Priok bersama kapal-kapalnya di hiasi lampu, gudang arang dihias, dan pesta kembang api digelar di *Koningsplein* yang terletak di depan Istana Negara saat ini. Sejak saat itu, Pasar Gambir menjadi tradisi tahunan yang rutin diadakan menjelang 31 Agustus, bertepatan dengan hari lahir Ratu Wilhelmina. Antusiam masyarakat Batavia terhadap penyelenggaraan pasar ini sangat tinggi, bahkan pada dekade 1920-an, ketika jumlah penduduk kota belum mencapai setengah juta jiwa, kawasan tersebut selalu dipadati pengunjung setiap kali perayaan berlangsung.²⁸ Tingginya minat masyarakat mendorong pemerintah kolonial untuk memperpanjang masa pelaksanaanya dari semula satu pekan menjadi dua pekan, yaitu dari akhir Agustus hingga awal September.²⁹ Salah satu wujud kemeriahan Pasar Gambir yang terekam dalam arsip kolonial dapat dilihat pada gambar berikut. (Lihat gambar 3.14 dan 3.15)

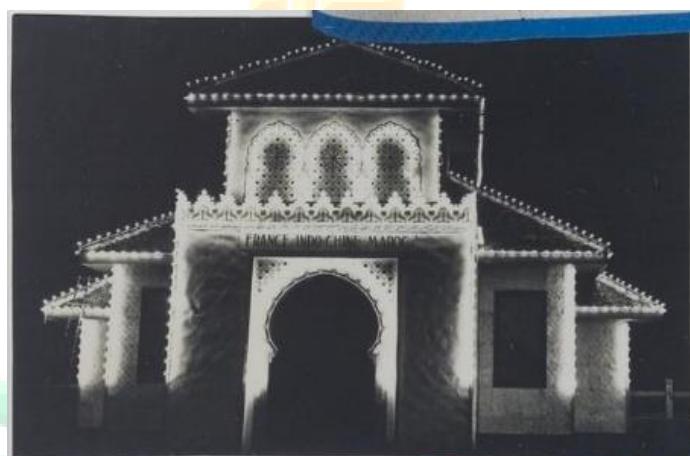
²⁸ Eka Satriawan Kusuma Wijaya, “Penciptaan Buku Referensi Situs Gapura Bajang Ratu Sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya Majapahit” (*Skripsi*: Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Teknologi dan Informatika, Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya, 2015), 36, didownload melalui: <https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/4671/1/10420100057-2015-STIKOMSURABAYA.pdf>.

²⁹ Retno Galih, “Pasar Gambir 1906-1942: Arena Ekonomi dan Rekreasi Masyarakat Kota Batavia” (*Skripsi*: Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015), 6-7, didownload melalui: <https://share.google/3Inor3W2sdmaRopql>.



Gambar 3. 14 Perayaan 25 Tahun Pemerintahan Ratu Wilhelmina di Pasar Gambir Tahun 1923

Sumber: kitlv.nl 33347 diakses pada 27 Agustus 2025



Gambar 3. 15 Gedung Pameran di Pasar Gambir Tahun 1938

Sumber: kitlv.nl 53294 diakses pada 27 Agustus 2025

Meskipun pada penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa Pasar Gambir terutama diselenggarakan untuk merayakan penobatan dan hari lahir Ratu Wilhelmina, terdapat sumber lain yang menunjukkan fungsinya lebih luas. Dua gambar diatas memperlihatkan bagaimana 1923 kawasan Batavia dihiasi lampu dalam rangka 25 tahun pemerintahan Ratu Wilhelmina, serta dekorasi gedung pameran di Pasar Gambir pada 1938. Informasi ini sejalan dengan pemberitaan *De Volkskrant* tanggal 8 September 1938 yang menginformasikan penggunaan lampu sorot dan antena oranye NIROM sebagai simbol keterhubungan Batavia

dengan Belanda pada perayaan 40 tahun pemerintahan sang ratu.³⁰ Dari sumber-sumber tersebut, dapat dipahami bahwa Pasar Gambir tidak hanya berfungsi untuk merayakan penobatan dan hari lahir Ratu Wilhelmina, tetapi juga menjadi bagian dari perayaan masa pemerintahannya.

Selain berfungsi sebagai perayaan politik, Pasar Gambir juga hadir sebagai ruang hiburan sekaligus pameran modern di Batavia, yang dibuka sejak pagi hingga larut malam. Di dalamnya dilengkapi ratusan stan, baik yang terbuka untuk perdagangan produk lokal dan impor, maupun stan tertutup yang menampilkan atraksi hiburan seperti pertunjukan seni, pemutaran film, hingga pameran untuk perusahaan dan instansi pemerintah. Di berbagai sudut arena berdiri pavilion serta menara yang menjadi penanda utama kawasan tersebut. Sistem tiket juga memperlihatkan adanya pembedaan sosial, di mana penduduk bumiputra membayar lebih murah dibandingkan warga Eropa, sementara beberapa atraksi tertentu masih memerlukan biaya tambahan.³¹

Sebagai ajang pasar malam terbesar pada masa kolonial, Pasar Gambir dengan cepat menjadi magnet sosial bagi masyarakat Batavia. Jumlah pengunjungnya bisa mencapai ratusan ribu orang setiap tahun, dan pada momen tertentu bahkan puluhan ribu orang hadir hanya dalam satu hari. Penataan ruang yang terencana menjadikan arena ini sebagai wadah interaksi lintas etnis dan kelas, sehingga menghadirkan suasana pergaulan kota yang modern dan beragam. Di dalamnya dipertontonkan beragam kesenian bumiputra yang

³⁰ NV De Volkskrant, "De Volkskrant", 08 September 1938, 2. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB12:000164006>.

³¹ Koesoemadinata, Pasar Malam, 48.

berdampingan dengan hiburan internasional, sementara puncak acara selalu ditandai dengan pesta kembang api yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat di ibu kota kolonial tersebut.³²

Dengan cara itu, penyelenggaraan Pasar Gambir tidak hanya berfungsi sebagai ajang rekreasi masyarakat Batavia, melainkan juga sebagai strategi politik kolonial untuk menguatkan posisi Kerajaan Belanda. Melalui perpaduan antara hiburan rakyat dan simbol-simbol modernitas, pemerintah Hindia Belanda berusaha membangun ruang perayaan yang menampilkan kekuasaan sekaligus merangkul keragaman budaya sebagai bentuk negosiasi politik dan legitimasi kekuasaan.³³

D. Jaarmarkt (Pasar Tahunan) dan Parade Militer di Surabaya

Pada masa kolonial, Surabaya berkembang pesat sebagai kota perdagangan dan industri yang ditopang oleh wilayah subur di sekitarnya. Potensi ekonomi yang besar membuat kota ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan bermiaga, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan yang semakin penting bagi pemerintah kolonial. Sejak tahun 1906, Surabaya ditetapkan sebagai *gemeente* dan kemudian mengalami peningkatan status menjadi *stadsgemeente* pada tahun 1926. Pada tahun 1923, pemerintahan Surabaya dipimpin oleh seorang *burgemeester* (wali kota), yakni Ir. G.J. Dijkerman. Secara administratif, wilayah kota terbagi ke dalam unit-unit yang disebut *wijk*

³² Ariwibowo, Perkembangan Budaya Kosmopolitan, 64-65.

³³ Koesoemadinata, Pasar Malam, 50.

atau lingkungan, yang masing-masing memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Dengan pembagian administratif tersebut, Surabaya menjelma menjadi kota modern dengan perkembangan yang cukup pesat pada awal Abad XX.³⁴

Perkembangan tersebut ditandai dengan munculnya berbagai kegiatan industri di Jawa, mulai dari pengolahan logam, mesin, tekstil, hingga industri perkebunan yang erat kaitannya dengan produksi untuk pasar internasional. Jawa Timur sendiri menjadi pusat utama perkebunan kopi dan terutama gula, yang sejak awal 1900-an menopang pertumbuhan Surabaya menjadi kota terbesar di Hindia Belanda. Di sekitar kota juga terdapat sejumlah pabrik gula penting, seperti Pabrik Waroe di Waru, Ketegang di Sepanjang, serta Ketintang di daerah Ketintang, yang memperkuat peranan Surabaya sebagai sentra manufakur dan perdagangan.³⁵

Bersamaan dengan bertumbuhnya industri dan semakin banyaknya penduduk Eropa yang menetap, pemerintah kolonial menyediakan fasilitas yang dianggap dapat menunjang kehidupan kota modern. Salah satunya adalah penyelenggaraan *Jaarmarkt*. Kegiatan ini pertama kali diadakan pada 1905 dan berakhir pada 1930 di kawasan Ketabang Utara, dengan memanfaatkan lahan luas yang disiapkan oleh pemerintah Hindia Belanda.³⁶ *Jaarmarkt* adalah pasar

³⁴ Purnawan Basundoro, *Sejarah Pemerintah Kota Surabaya Sejak Masa Kolonial Sampai Masa Reformasi 1906-2012* (Yogyakarta: Departemen Sejarah FIB UNAIR dan Elmatera Publishing, 2012), ix-17.

³⁵ Nasution, “*Jaarmarkt* di Surabaya Masa Pemerintahan Hindia-Belanda”, dalam jurnal: *AVATARA*, Vol. 1, No. 2 (2013): 2-3.

³⁶ Alamanda Fitri Arifah, “Dinamika Taman Hiburan Rakyat (T.H.R) Surabaya Tahun 1957-2003” (*Skripsi*: Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro Semarang, 2019), 1-2, didownload melalui: <https://share.google/Rfr2Jc7Spg6WIW8Yj>.

tahunan yang diadakan pemerintah kolonial Belanda yang berfungsi sebagai sarana pameran produk impor dan lokal, hiburan rakyat, sekaligus sumber pendapatan negara. Tradisi pasar tahunan tersebut kemudian dilekatkan dengan momen ulang tahun Ratu Wilhelmina yang jatuh pada 31 Agustus, sehingga hampir setiap kota besar di Hindia Belanda menggelar perayaan serupa. Di Surabaya, *Jaarmarkt* biasanya berlangsung pada bulan September hingga awal Oktober, sebagai bagian dari rangkaian peringatan tersebut.³⁷

Pada tahun 1923, *Jaarmarkt* di Surabaya diselenggarakan tidak hanya untuk memeriahkan ulang tahun sang ratu, tetapi juga dalam rangka menandai 25 tahun masa pemerintahannya. Surat kabar *De Indische Courant* memberitakan bahwa dalam acara tersebut Wali Kota Surabaya menyampaikan pidato resmi yang menekankan dua hal utama. Pertama, meskipun kondisi ekonomi Hindia Belanda saat itu masih dipengaruhi krisis dan ketidakstabilan, pemerintah dan masyarakat tetap menunjukkan kesetiaan kepada Kerajaan Belanda dengan menyelenggarakan kegiatan meriah seperti *Jaarmarkt*. Kedua, seperempat abad pemerintahan Ratu Wilhelmina dipandang telah membawa sejumlah kemajuan, seperti perkembangan infrastruktur, perdagangan, pendidikan, kesehatan, hingga peran masyarakat dalam pemerintahan.³⁸ Oleh karena itu, peringatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga merefleksikan pencapaian kolonial yang dipandang sebagai legitimasi kekuasaan Belanda di Hindia.

³⁷ Nasution, *Jaarmarkt* di Surabaya, 1-3.

³⁸ s.n., "De Indische courant", 01 September 1923, 2. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010277378>.

Selain berfungsi sebagai perayaan politik, *Jaarmarkt* di Surabaya tahun 1923 juga menjadi ruang pamer bagi perkembangan industri, hiburan, dan kuliner. Berbagai hiburan yang dihadirkan meliputi pertunjukan seni tradisional maupun modern, mulai dari Wayang Wong, Ludruk, Komedi Stambul, hingga kesenian daerah seperti Gandrung Bali, Reog Ponorogo, dan Sandur Madura. Sementara itu, kompetisi olahraga seperti sepak bola, tinju, tenis, basket, hingga atraksi ketangkasan dengan mobil dan sepeda motor turut meramaikan acara.³⁹ Di sisi lain, jajanan khas seperti Lontong Kikil, Soto, Rujak Cingur, Semanggi, Es Gandul Tali Merang, dan Es Puter, juga turut melengkapi suasana.⁴⁰ Perpaduan hiburan, olahraga, dan kuliner inilah yang menjadikan *Jaarmarkt* sebagai pusat keramaian besar dan menarik kehadiran beragam lapisan masyarakat.

Pengunjung yang datang tidak hanya terbatas pada warga kota Surabaya, tetapi juga rombongan dari sejumlah daerah di Jawa Timur, termasuk para bupati, kepala distrik, serta murid-murid sekolah guru dari Probolinggo dan Mojowarno. Kehadiran pelajar dari sekolah Bumiputra maupun sekolah Eropa menunjukkan bahwa acara ini melibatkan beragam lapisan masyarakat. Untuk memasuki arena, ditetapkan biaya masuk sebesar *f* 0,5 bagi orang Eropa dan Timur Asing, serta *f* 0,1 bagi penduduk pribumi.⁴¹ Dengan begitu, *Jaarmarkt* berfungsi bukan hanya sebagai ruang hiburan dan pameran, tetapi juga sebagai arena interaksi sosial lintas kelas yang memperlihatkan pola hubungan kolonial.

³⁹ Samidi, “Identitas Budaya Masyarakat Kota: Teater Tradisi di Kota Surabaya Pada Awal Abad XX,” dalam jurnal: *Indonesian Historical Studies*, Vol. 3, No. 1 (2019): 9.

⁴⁰ Nasution, *Jaarmarkt* di Surabaya, 6.

⁴¹ Samidi, Identitas Budaya Masyarakat, 8-9.

Setelah keramaian ini, Surabaya juga mengadakan parade militer yang menandai perayaan 50 tahun pemerintahan Ratu Wilhelmina.

Berdasarkan laporan *Nieuwe Courant*, rangkaian perayaan *jubileum* emas Ratu Wilhelmina di Surabaya dimulai sejak 31 Agustus 1948, bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Momentum ini dijadikan ganda dengan tidak hanya memperingati ulang tahun sang ratu, tetapi juga menandai 50 tahun masa pemerintahannya. Potret Wilhelmina dipajang di Emmapark sebagai pusat penghormatan, di mana masyarakat meletakkan bunga sebagai tanda kesetiaan. Dua hari kemudian, pada 4 September, potret itu diganti oleh gambar Ratu Juliana yang bertepatan dengan pengukuhan sebagai pengganti tahta. Acara di Surabaya turut diisi dengan pidato pejabat sipil dan militer, seperti Laksamana Muda A.S. Pinke (Komandan Angkatan Laut) dan Letnan Jenderal S.H. Spoor (Komanda Angkatan Darat). Seluruh rangkaian kegiatan diliput dan disiarkan oleh Radio Soerabaja, yang juga menyiarkan secara langsung beberapa bagian upacara dari Negeri Belanda, sehingga perayaan di Surabaya berlangsung bersamaan dengan perayaan resmi di tanah asal Kerajaan.⁴²

Program serupa juga dicatat oleh *Nieuwe Courant* yang lain. Media ini menekankan bahwa pada 31 Agustus, masyarakat Surabaya mengikuti siaran langsung parade militer dan penghormatan bunga yang dihubungkan dengan acara resmi perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina sekaligus *jubileum*-nya. Hari-hari berikutnya diisi dengan beragam pertunjukan, seperti teater *Comedia*,

⁴² A.M.A.C.A.B., “Nieuwe courant”, 26 August 1948, 3. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMNIOD04:000095245>.

konser piano, hingga pementasan *simfoni Beethoven* yang disiarkan pada 4 September, bertepatan dengan turunnya Ratu Wilhelmina dan naiknya Juliana ke tahta. Penyiaran tersebut bahkan menayangkan prosesi langsung dari Amsterdam, sehingga penduduk Surabaya dapat merasakan momentum ganda, yaitu ulang tahun dan *jubileum*, bersamaan dengan masyarakat Belanda di tanah air.⁴³ Salah satu wujud perayaan di Surabaya dapat dilihat melalui dokumentasi parade militer berikut. (Lihat gambar 3.16)



Gambar 3. 16 Parade Militer Perayaan Ulang Tahun Ratu Wilhelmina di Surabaya Tahun 1948

Sumber: kitlv.nl MLD266_041 diakses pada 22 September 2025

Gambar tersebut memperlihatkan suasana parade militer pada tahun 1948 di Surabaya sebagai bentuk penghormatan terhadap ulang tahun Ratu Wilhelmina. Keterangan lain datang dari surat seorang tentara yang dimuat dalam *Nieuwsblad van Friesland*. Ia menuturkan bagaimana sejak akhir Agustus 1948, Surabaya telah dipenuhi hiasan perayaan, berupa gerbang

⁴³ A.M.A.C.A.B., "Nieuwe courant", 30 August 1948, 2. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMNIOD04:000095286>.

kehormatan berangka 50, lampu berwarna-warni, dan karangan bunga. Pada 31 Agustus pagi, kota menggelar parade militer besar-besaran yang sekaligus dimaksudkan sebagai penghormatan ulang tahun Ratu Wilhelmina. Setelah itu, anak-anak sekolah mengadakan pesta rakyat di alun-alun kota dengan berbagai perlombaan. Malam harinya, pasar malam dan pertunjukan tari digelar terbuka untuk umum, sementara untuk kalangan tentara disediakan hiburan khusus di Flora.⁴⁴ Kesaksian ini menegaskan bahwa ulang tahun Ratu Wilhelmina dan *jubileum* pemerintahannya diperingati secara bersamaan, dirayakan meriah oleh masyarakat lintas golongan, baik Eropa maupun bumiputra.

Secara keseluruhan, rangkaian perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina di berbagai kota jajahan, mulai dari Karesidenan Besuki, Yogyakarta, Batavia, hingga Surabaya, memperlihatkan beragam bentuk kegiatan, seperti pementasan seni, pasar malam, jamuan resmi, hingga parade militer. Meskipun bentuk perayaannya berbeda, namun memiliki tujuan yang sama yaitu menampilkan kekuasaan kolonial dalam wujud perayaan yang seolah menyatukan masyarakat lintas golongan. Selain di empat wilayah tersebut, perayaan serupa juga berlangsung di kota-kota lain di Hindia Belanda. Melalui cara ini, pemerintah Belanda berusaha menunjukkan bahwa kekuasaan kolonial tetap kuat dan sah. Perayaan tersebut pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai hiburan dan seremoni, tetapi juga sebagai strategi politik untuk

⁴⁴ J. Hepkema, "Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's courant", 20 September 1948, 2. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010762078>.

meredam gejolak rakyat dan meneguhkan kembali legitimasi kekuasaan kolonial.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

DAMPAK PERAYAAN PEMERINTAHAN RATU WILHELMINA

TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DI HINDIA

BELANDA (1923-1948)

A. Dampak Politik

Secara politik, penyelenggaraan perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina merupakan upaya pemerintah kolonial dalam menanamkan legitimasi kekuasaan serta memperkuat kontrol terhadap masyarakat pribumi. Pemerintah Belanda memanfaatkan momen perayaan untuk menegaskan kekuasaan mereka yang sah di hadapan masyarakat jajahan melalui simbol monarki yang turut hadir dalam rangkaian acara. Simbol-simbol tersebut tampak, misalnya, pada potret Ratu Wilhelmina yang ditampilkan dalam kartu menu *gala dinner* pada perayaan di Yogyakarta,¹ bendera kerajaan yang dikibarkan di sepanjang jalan utama Kota Batavia,² lagu kebangsaan “*Wilhelmus*” yang dinyanyikan saat penobatan,³ serta upacara resmi yang dihadiri pejabat kolonial seperti pada perayaan di Besuki.

Dalam kerangka pemikiran Michel Foucault, perayaan semacam ini merupakan perwujudan dari praktik kekuasaan yang bekerja melalui wacana⁴

¹ Fajar Wijanarko, “Pistha Ageng: Perubahan Pola Jamuan Bangsawan Yogyakarta Tahun 1855-1939,” dalam jurnal: *Prajnaparamita*, Vol. 10, No. 1 (Agustus 2021): 54.

² Retno Galih, “Pasar Gambir 1906-1942: Arena Ekonomi dan Rekreasi Masyarakat Kota Batavia” (*Skripsi*: Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015), 50, didownload melalui: <https://share.google/3Inor3W2sdmaRopq1>.

³ G. L. Kepper, *Gedenkboek: Koningin Wilhelmina in haar Openbaar Leven*, ('S-Gravenhage: M. M. Couvee, t.th.), 12.

⁴ Abdullah Khozin Af., “Konsep Kekuasaan Michel Foucault,” dalam jurnal: *Toesofi*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2012): 140.

dan simbol-simbol makna, bukan sekedar melalui paksaan fisik tetapi melalui praktik budaya yang tampak wajar dan menyenangkan. Melalui cara ini, kekuasaan diterima secara alami oleh masyarakat tanpa menimbulkan kemungkinan penolakan,⁵ sebab ia hadir secara halus dan tersembunyi dalam bentuk ritual publik yang menciptakan kepatuhan dan pengakuan terhadap penguasa.

Perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina di Surabaya, menjadi salah satu contoh nyata bagaimana kekuasaan kolonial ditunjukkan melalui acara-acara publik yang dibuat megah. Pada tanggal 31 Agustus, Kota Surabaya dipenuhi hiasan dan gerbang megah bertuliskan angka 50, lampu warna-warni yang menerangi jalan-jalan, serta parade militer besar yang melibatkan seluruh satuan Angkatan Darat dan kendaraan tempur. Rangkaian acara tersebut kemudian dilanjutkan dengan pesta rakyat di alun-alun dan pertunjukan budaya yang diikuti oleh masyarakat pribumi dan Eropa.⁶ Kemeriahan ini tidak sekedar menjadi ajang hiburan, tetapi juga merupakan bentuk penerapan *disciplinary power* dalam arti Foucault, di mana kekuasaan bekerja secara halus melalui pengaturan ruang, simbol, dan ritual publik.⁷ Parade militer dan tata upacara yang tertib menggambarkan ketertiban dan kemajuan di bawah pemerintah

⁵ Martinus S. Barasa dan F.X. Armada Riyanto, "Analisis Teori Kekuasaan Michel Foucault atas Propaganda Media dalam Membangun Diskursus Politik," dalam jurnal: *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*, Vol. 6, No. 1 (Agustus 2023): 191, didownload melalui: 10.34007/jehss.v6i1.1785.

⁶ J. Hepkema, "Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's courant", September 1948, 2. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010762078>.

⁷ Abdil Mughis Mudhoffir, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik," dalam jurnal: *Masyarakat*, Vol. 18, No. 1 (2013): 85, didownload melalui: 10.7454/MJS.v18i1.1253.

kolonial, sehingga masyarakat diarahkan untuk menumbuhkan rasa kepatuhan dan pengakuan terhadap penguasa tanpa paksaan langsung.

Jika dilihat dari perspektif Foucault, praktik seremonial semacam ini mencerminkan mekanisme *govermentality* yaitu perpanjangan dari *disicilinatory power*,⁸ di mana negara kolonial mengatur masyarakat dengan menanamkan gagasan tentang kestabilan dan kemakmuran. Melalui berbagai simbol visual seperti parade, bendera kerajaan, dan partisipasi massal, pemerintah Belanda menegaskan legitimasi kekuasaannya serta memberikan tafsiran bahwa tatanan kolonial adalah sistem yang sah, beradab, dan membawa kemajuan bagi seluruh lapisan masyarakat Hindia Belanda.

Meskipun pemerintah kolonial menampilkan perayaan sebagai wujud kebersamaan antara penguasa dan rakyat, praktik penyelenggaranya tetap menunjukkan batas sosial antara masyarakat Eropa dan pribumi. Partisipasi masyarakat pribumi umumnya dibatasi sebagai penonton atau pelengkap seremoni, sementara peran utama dipegang oleh pejabat dan warga Eropa. Akibatnya, perayaan lebih berfungsi menampilkan kesan adanya kebersamaan sosial, namun sebenarnya justru memperkuat ketimpangan kolonial yang menempatkan Belanda sebagai pusat kekuasaan. Pola pemisah ini tampak dalam penyelenggaraan *Jaarmarkt* Surabaya, di mana diberlakukan perbedaan tarif karcis dan pemisah area stan makanan serta hiburan berdasarkan golongan sosial.⁹ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa meskipun perayaan tampak

⁸ Mudhoffir, Teori Kekuasaan, 86.

⁹ Nasution, “*Jaarmarkt* di Surabaya Masa Pemerintahan Hindia-Belanda”, dalam jurnal: *AVATARA*, Vol. 1, No. 2 (2013): 6.

inklusif, tatanan kolonial tetap dijaga melalui praktik pemisahan sosial yang menggambarkan kontrol politik.

Namun, praktik seremoni yang menonjolkan kemegahan dan ketimpangan tersebut justru mulai memunculkan kesadaran baru di kalangan masyarakat pribumi, terutama kelompok terdidik. Mereka mulai melihat bahwa di balik tampilan kemajuan dan kemakmuran yang dipertontonkan, terdapat hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara penjajah dan rakyat jajahan. Kesadaran ini kemudian menjadi awal munculnya sikap kritis terhadap legitimasi kolonial dan berkembangnya gagasan nasionalisme di tahun-tahun berikutnya. Pada akhirnya, perayaan yang dimaksudkan untuk memperkuat kekuasaan kolonial justru turut mendorong terbentuknya kesadaran politik di kalangan pribumi Hindia Belanda.

B. Dampak Ekonomi

Perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina juga membawa dampak pada aspek ekonomi masyarakat jajahan. Kegiatan perayaan yang dikemas melalui pasar dan pameran tahunan memperlihatkan bagaimana pemerintah Hindia Belanda berupaya menampilkan kekuasaan yang tampak makmur dan bermartabat di bawah pemerintahan kolonial.¹⁰ Melalui kegiatan seperti Pasar Gambir di Batavia dan *Jaarmarkt* (pasar tahunan) di Surabaya, perayaan tidak

¹⁰ Fabianus Hiapianto Koesoemadinata, “Pasar Malam Komidi Putar: Relasi Kuasa Dalam Dinamika *Fluid-Placemaking*” (*Disertasi: Program Ilmu Sasustra, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, 2022*), 44, didownload melalui: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920527952&lokasi=lokal>.

hanya menjadi ajang hiburan dan rekreasi, tetapi juga wadah perdagangan, konsumsi, serta promosi industri kolonial.

Pada awal Abad XX, Batavia berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan di Hindia Belanda. Dalam konteks tersebut, Pasar Gambir menjadi salah satu bentuk nyata dampak perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina terhadap kehidupan ekonomi di wilayah jajahan. Diselenggarakan pertama kali pada tahun 1898 untuk merayakan penobatan sang ratu di *Koningsplein* (sekarang Taman Monas), dan kemudian menjadi agenda tahunan setiap akhir Agustus hingga awal September.¹¹ Namun, penyelenggarannya tidak selalu berlangsung rutin, kegiatan pasar sempat terhenti pada 1907 akibat kesulitan keuangan yang dialami pemerintah Hindia Belanda dan *Geemente* Batavia. Upaya penyelenggaraan kembali dilakukan pada 1918 dan baru terlaksana pada 1921. Pada 1923, di bawah rancangan arsitek J.H. Antonisse, desain pasar dibuat lebih menarik dengan gapura bergaya rumah adat dan hiasan lampu listrik. Sejak saat itu, Pasar Gambir berkembang menjadi pasar yang lebih modern dengan berbagai aktivitas ekonomi di dalamnya.¹²

Kegiatan Pasar Gambir mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi di Batavia pada masa itu. Berbagai komoditas diperjualbelikan, mulai dari kebutuhan rumah tangga, makanan, hingga pameran industri produk lokal maupun impor seperti batik, topi, ukiran kayu, kerak telor, dan es kocok.¹³ Selain perdagangan, tersedia pula hiburan berbayar seperti pertunjukan wayang

¹¹ Galih, Pasar Gambir, 6-7.

¹² Galih, Pasar Gambir, 61-62.

¹³ Galih, Pasar Gambir, 84-90.

wong, musik militer, pertandingan sepak bola, dan pemutaran film yang berlangsung sejak pagi hingga malam,¹⁴ dengan tarif masuk 25 sen bagi warga Eropa dan 10 sen bagi penduduk pribumi.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa Pasar Gambir memperlihatkan bagaimana perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan sekaligus mempertahankan struktur sosial kolonial melalui pengaturan akses ekonomi yang berbeda antar golongan.

Perusahaan dan lembaga pemerintah kolonial Eropa turut berpartisipasi dalam Pasar Gambir. Perusahaan Belanda Philips menjadi sponsor penerangan malam hari, sementara N.V. Faroka dari Belgia membuka stan rokok dan memberikan gratis sempel produk kepada pengunjung. Pameran industri menampilkan beragam pameran mesin dan otomotif, yang pada 1937 berkembang menjadi 2 ruang besar berisi alat-alat industri, seperti logam, kulit, tenun, batik, hingga kerajinan tanduk. Beberapa departemen pemerintahan, seperti *Marine* dan *Economische Zaken*, menampilkan peralatan militer, kapal, pesawat, serta teknologi industri terbaru.¹⁶ Keterlibatan pemerintah kolonial dan kalangan swasta, menunjukkan adanya kepentingan ekonomi di balik perayaan tersebut, di mana momentum politik dimanfaatkan untuk memperluas pasar dan menguatkan penguasaan ekonomi Belanda di Hindia.

¹⁴ Muhammad Imam Hibatullah dan Daya Negri Wijaya, “Gaya Hidup Masyarakat di Kawasan *Weltevreden*, Batavia Tahun 1900-1942”, dalam jurnal: *HISTORIA*, Vol. 6, No. 2 (Oktober 2023): 145, didownload melalui: <https://ejournal.upi.edu/index.php/historia>.

¹⁵ Koesoemadinata, Pasar Malam, 48.

¹⁶ Galih, Pasar Gambir, 84-85.

Untuk melihat perkembangan aktivitas ekonomi Pasar Gambir secara lebih konkret, berikut disajikan data mengenai jumlah pengunjung dan pendapatan yang diperoleh sepanjang tahun 1923 hingga 1935. (Lihat tabel 4.1 dan 4.2)

Tabel 4. 1 Jumlah Pengunjung dan Pendapatan Pasar Gambir 1923-1926

Tahun	Pengunjung	Pendapatan
1923	370.243	f 18.375,21
1924	329.972	f 9.259,21
1925	314.993	f 11.438,19
1926	375.965	f 34.710,25

Sumber: Surat Kabar *Bataviaasch Nieuwsblad* 27 Agustus 1927, hal. 15.

Tabel 4. 2 Jumlah Pengunjung dan Pendapatan Pasar Gambir 1927-1934

Tahun	Pengunjung	Pendapatan
1927	375.081	f 99.962,70
1928	464.210	f 119.306,80
1929	431.000	f 115.319,00
1930	487.382	f 123.415,15
1931	399.105	f 100.924,10
1932	355.451	f 98.440,25
1933	346.687	f 86.731,85
1934	292.000	f 72.000,00
1935	306.000	f 75.000,00

Sumber: Galih 2015, hal. 67.

Tabel mengenai jumlah pengunjung dan pendapatan Pasar Gambir tahun 1923-1935 menunjukkan fluktuasi aktivitas ekonomi yang mencerminkan naik dan turunnya daya beli dan minat masyarakat kolonial di Batavia. Pasar gambir menjadi pusat perputaran ekonomi, di mana perdagangan, promosi industri, dan konsumsi masyarakat berlangsung secara masif. Meskipun tidak terdapat data untuk periode 1936-1940, pola pasang surut diperkirakan masih terjadi. Pada 1937, penyelenggarannya mencapai skala terbesar dengan perluasan area hingga 14.000 m² dan peningkatan ruang stan menjadi 2.812 m², menandakan upaya pemerintah kolonial untuk mempertahankan keberlangsungan kegiatan ekonomi melalui ajang tersebut. Aktivitas ekonomi ini terus berlangsung hingga 1942,¹⁷ sebelum akhirnya berakhir seiring runtuhnya pemerintahan Hindia Belanda akibat pendudukan Jepang di wilayah jajahan tersebut.¹⁸

Bagi masyarakat lokal, penyelenggaraan Pasar Gambir turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi sehari-hari. Banyak penduduk pribumi memperoleh kesempatan kerja sementara sebagai pedagang, pelayan, penyedia jasa hiburan, penjaga parkir, maupun pemandu dan penerjemah bagi turis asing.¹⁹ Kegiatan tersebut membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi rakyat kecil. Dari sini dapat dilihat bahwa Pasar Gambir tidak hanya menjadi ajang hiburan, promosi industri, dan sumber pemasukan kas negara, tetapi juga wadah penting bagi tumbuhnya ekonomi rakyat di Batavia.

¹⁷ Galih, Pasar Gambir, 68-69.

¹⁸ Koesoemadinata, Pasar Malam, 49.

¹⁹ Galih, Pasar Gambir, 91-92.

Perkembangan ekonomi yang tampak di Batavia melalui Pasar Gambir juga terjadi di Surabaya. Pada dekade 1920-an, kota ini mengalami kemajuan pesat di berbagai sektor, seperti transportasi, industri, dan perdagangan, yang menjadikannya pusat ekonomi penting di wilayah timur Hindia Belanda. Perubahan status Surabaya menjadi *gemeente* turut mendorong pembangunan infrastruktur perkotaan, termasuk peningkatan jumlah pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat.²⁰ Dalam konteks inilah kemudian muncul penyelenggaraan *Jaarmarkt* (pasar tahunan) Surabaya, yang menjadi salah satu bentuk aktivitas ekonomi modern sekaligus bagian dari perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina.

Penyelenggaraan *Jaarmarkt* sangat erat kaitannya dengan perayaan ulang tahun sekaligus pemerintahan Ratu Wilhelmina, yang umumnya berlangsung pada bulan September hingga awal Oktober.²¹ Untuk pertama kalinya, *Jaarmarkt* diselenggarakan di Surabaya pada tahun 1905. Pemerintah Hindia Belanda menjadi penyelenggara utama kegiatan tersebut dengan menyediakan area pameran yang luas di kawasan Ketabang Utara. Tujuan utama pameran ini ialah menampilkan berbagai hasil produksi masyarakat kota setempat.²² Pada awalnya, *Jaarmarkt* diprakarsai oleh Mr. Jasper dengan dukungan dana pemerintah sebesar *f* 3.500 untuk pembangunan kios-kios sederhana dari

²⁰ Muhammad Lingga Andana, Izza Yuspriana Afhimma, dan Silvia Nurul Ashiva, “Perkembangan Tata Kota Surabaya Pada Tahun 1870-1940”, dalam jurnal: *HISTORIOGRAPHY*, Vol. 1, No. 2 (2021): 150-152.

²¹ Nasution, *Jaarmarkt* di Surabaya, 3.

²² Alamanda Fitri Arifah, “Dinamika Taman Hiburan Rakyat (T.H.R) Surabaya Tahun 1957-2003” (*Skripsi*: Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro Semarang, 2019), 1-2, didownload melalui: <https://share.google/Rfr2Jc7Spg6WIW8Yj>.

bambu. Meskipun sempat diragukan, acara perdana ini justru meraih kesuksesan besar dengan pendapatan tiket mencapai *f* 14.000 dan hasil restoran *f* 10.000. Keuntungan bersih sekitar *f* 20.500 tidak hanya menutupi modal, tetapi juga digunakan untuk mendirikan sekolah Perempuan pribumi Mardi Kenyo. Keberhasilan ini menjadikan *Jaarmarkt* sebagai kegiatan tahunan yang berperan penting dalam menggerakkan ekonomi lokal serta menambah pendapatan pemerintah kolonial.²³ Kesuksesan penyelenggaraan *Jaarmarkt* berlanjut hingga dekade 1930-an. Meskipun kondisi perekonomian sempat melemah akibat krisis malaise pada awal dekade tersebut, *Jaarmarkt* tetap mampu berlangsung pada tahun-tahun selanjutnya.²⁴

Beragam aktivitas ekonomi berlangsung selama penyelenggaraan *Jaarmarkt*. Untuk stan perdagangan menampilkan berbagai produk unggulan, seperti hasil kerajinan, batik, dan barang-barang impor, sedangkan stan hiburan menampilkan pertunjukan dari beragam golongan masyarakat (Eropa, Timur Asing, dan pribumi), seperti musik kerongcong, wayang, reog, ludruk, dansa, pesta kembang api, hingga atraksi sulap. Selain itu, tersedia beragam permainan, seperti komedi putar hingga tong setan yang manarik perhatian pengunjung.²⁵ Pada tahun 1923, kegiatan ini semakin berkembang dengan adanya pertandingan olahraga seperti sepak bola, atraksi ketangkasan, tinju, dan tenis.²⁶ *Jaarmarkt* sekaligus menjadi ajang industri lokal, yang menampilkan

²³ Nasutio, *Jaarmarkt di Surabaya*, 4.

²⁴ Arifah, *Dinamika Taman Hiburan*, 2.

²⁵ Nasutio, *Jaarmarkt di Surabaya*, 4-5.

²⁶ Samidi, “Identitas Budaya Masyarakat Kota: Teater Tradisi di Kota Surabaya Pada Awal Abad XX,” dalam jurnal: *Indonesian Historical Studies*, Vol. 3, No. 1 (2019): 9.

hasil kerajinan dari berbagai daerah, seperti kuningan dan tikar Gresik, sandal kulit dan keris Madura, serta batik dan ukiran dari Jepara dan Yogyakarta, yang menunjukkan daya saing industri pribumi terhadap produk impor. Beragam makanan turut menambah semarak kegiatan ini, mulai dari jajanan rakyat seperti es puter, semanggi, dan lontong kikil hingga hidangan Eropa seperti es sirup dan roti yang bermerek *Hellendoorn* dan *De Korenschoof* yang disajikan di stan-stan mewah.²⁷ Melalui kegiatan tersebut, selain menjadi ruang interaksi sosial antar golongan, *Jaarmarkt* berperan dalam menggerakkan sirkulasi ekonomi lokal melalui perdagangan dan konsumsi yang memberikan keuntungan bagi pemerintah kolonial.

Jaarmarkt dibuka secara umum bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan asal-usul mampun status sosial. Acara ini menarik perhatian luas, tidak hanya dari penduduk Kota Surabaya, tetapi juga dari berbagai daerah di Jawa Timur. Para pengunjung datang secara berkelompok, meliputi kalangan pejabat seperti bupati dan kepala distrik, serta pelajar dari *kweekschool* (sekolah guru) di Probolinggo dan Mojowarno, maupun sekolah Bumiputra dan Eropa.

Penyelenggara menetapkan tarif masuk yang berbeda berdasarkan golongan, yakni sebesar 0,5 *f* untuk orang Timur Asing dan Eropa, serta *f* 0,1 bagi pengunjung Bumiputra.²⁸ Perbedaan harga tiket ini sekaligus menunjukkan adanya stratifikasi sosial-ekonomi yang tetap dipertahankan dalam ruang hiburan kolonial.

²⁷ Nasution, *Jaarmarkt* di Surabaya, 5-6.

²⁸ Samidi, Identitas Budaya Masyarakat, 8-9.

Adanya *Jaarmarkt* Surabaya membawa dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Timur. Kegiatan ini mendorong arus perdagangan antar daerah, memperkenalkan produk lokal kepada kalangan Eropa dan Timur Asing, serta membuka peluang bagi industri rakyat seperti batik, kerajinan, dan makanan untuk berkembang dalam sistem pasar kolonial. Selain itu, meningkatnya mobilitas penduduk selama acara turut menggerakkan ekonomi jasa, seperti transportasi, perhotelan, dan kuliner, yang memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat setempat. Bagi pemerintah kolonial, keberhasilan penyelenggaraan *Jaarmarkt* memperkuat stabilitas ekonomi di bawah pemerintahan Ratu Wilhelmina. Karena itu, baik melalui Pasar Gambir di Batavia maupun *Jaarmarkt* di Surabaya, terlihat bahwa perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina tidak hanya berfungsi sebagai bentuk legitimasi politik, tetapi juga sebagai sarana untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dan memperkuat penguasaan ekonomi kolonial di Hindia Belanda.

C. Dampak Sosial dan Budaya

Dampak perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat jajahan. Melalui berbagai bentuk upacara, arak-arakan, dan pertunjukan seni, pemerintah kolonial berupaya menampilkan kekuasaannya serta memperkuat legitimasi di hadapan rakyat. Dalam kerangka kekuasaan kolonial, praktik perayaan ini menjadi bagian dari strategi penampilan kekuasaan, di mana kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui kekuatan militer dan administrasi, tetapi juga melalui

simbol-simbol budaya dan praktik sosial yang menanamkan rasa tunduk terhadap penguasa.²⁹ Dengan begitu, perayaan tersebut berfungsi sebagai alat untuk memperkuat legitimasi kolonial di hadapan masyarakat pribumi.

Di berbagai wilayah Hindia Belanda, perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina diwujudkan dalam beragam bentuk kegiatan budaya. Di Karesidenan Besuki, misalnya, perayaan pemerintahan sang ratu turut memunculkan proses akulturasi antara budaya lokal, kolonial, dan komunitas-komunitas pendatang. Beragam kegiatan digelar, seperti aduan sapi, pertunjukan wayang wong, tarian arab (tari Zapin) dan bentuk kegiatan lainnya. (Lihat gambar 4.1, 4.2 dan 4.3)



Gambar 4. 1 Aduan Sapi di Jember Tahun 1923

Sumber: kitlv.nl 38982 diakses pada 19 Oktober 2025

²⁹ Rosmah Tami, dkk, Hegemoni: Negosiasi dan Konsensus Produk Budaya Indonesia (Makassar: Alauddin University Press, 2021), 35.



Gambar 4. 2 Wayang Wong di Jember Tahun 1923

Sumber: kitlv.nl 38990 diakses pada 19 Oktober 2025



Gambar 4. 3 Tarian Arab di Situbondo Tahun 1923

Sumber: kitlv.nl 38977 diakses pada 19 Oktober 2025

Tradisi aduan sapi yang banyak ditemukan di wilayah Jember utara, menggambarkan identitas budaya masyarakat Madura yang bermukim di kawasan itu.³⁰ Gambar kegiatan yang terlihat diatas tidak hanya menjadi hiburan rakyat, tetapi juga memperlihatkan bagaimana unsur budaya lokal diberi ruang dalam perayaan yang bernuasa kolonial. Sementara itu, pementasan wayang wong menggambarkan bentuk adaptasi kesenian

³⁰ Sutjitro, “Aduan Sapi: Studi Tentang Perubahan Fungsi Aduan Sapi Pada Masyarakat di Kabupaten Jember” (*Tesis*: Airlangga, 2003), 2-3, didownload melalui: <http://lib.unair.ac.id>.

tradisional dengan unsur teater Barat. Pergeseran bentuk panggung, kostum, hingga tata dekorasi dalam pertunjukan memperlihatkan adanya pengaruh estetika kolonial terhadap seni tradisional Jawa-Madura.³¹ Di sisi lain, tarian Arab (tari zapin) yang ditampilkan oleh komunitas Arab-Melayu di Situbondo, yang menunjukkan pengaruh budaya pendatang di wilayah pesisir pada tahun 1881.³² Berdasarkan pengamatan terhadap gambar diatas dan kesesuaian dengan sumber pustaka, gerak serta busana penari memperlihatkan ciri khas tari Zapin, yaitu penekanan pada gerak kaki dengan keseimbangan tangan. Tarian ini mencerminkan perpaduan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya masyarakat Melayu³³ yang hidup berdampingan dengan tradisi lokal di Besuki. Ketiga bentuk kegiatan tersebut menggambarkan bahwa perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina di Karesidenan Besuki menjadi medium pertemuan berbagai unsur budaya lokal, kolonial, dan pendatang yang memperlihatkan hubungan sosial masyarakat pada masa Hindia Belanda.

Di Yogyakarta, perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina turut memperkuat akulturasi budaya antara bangsawan Jawa dan pejabat kolonial. Tradisi jamuan makan di Keraton menjadi wujud nyata percampuran tersebut. Sejak masa Sri Sultan Hamengku Buwono V, bahan pangan dan minuman untuk

³¹ Saidatun Nisak, "Akulturasi Budaya Timur Asing, Eropa dan Pribumi di Jember Tahun 1859-1942" (*Skripsi: Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, FUAIH, UIN KHAS Jember, 2025*), 67-68, didownload melalui: <https://share.google/OmYJFeftv6mAqnKD0>.

³² Alfin Rhizka Firdausya, Sugiyanto, dan Sumardi, "Perkembangan Kehidupan Sosial dan Kebudayaan Masyarakat Keturunan Etnis Arab-Madura di Kampung Arab Besuki Kabupaten Situbondo Tahun 1881-2014" (Artikel Ilmiah Mahasiswa: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember, 2015), 5.

³³ Sulistiyo Dwi Saputra, "Tari Zapin di Palembang (Studi Atas Bentuk, Perkembangan dan Karakteristiknya)" (*Tesis Skripsi: Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Pascasarjana, UIN Raden Fatah Palembang, 2019*), 37, didownload melalui: <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/17637>.

jamuan diperoleh dari pemasok Eropa, sehingga cita rasa Barat mulai hadir dalam hidangan istana. Pada masa-masa berikutnya, menu seperti selat, semur, dan roti menjadi bagian dari santapan kenegaraan. Dalam perayaan pemerintahan Ratu Belanda, Sultan menggelar jamuan makan dengan tata santap dan etiket bergaya Barat bersama pejabat kolonial.³⁴ (Lihat gambar 4.4).



Gambar 4. 4 Jamuan Rijsttafel di Keraton Yogyakarta Tahun 1938
Sumber: Wijanarko, 2021: 12.

Pada gambar tersebut tampak meja makan dengan peralatan jamuan ala Eropa dan hidangan bergaya *rijsttafel*. Di belakang Gubernur dan Sultan berdiri abdi dalem (Kanca Sewidak) yang bertugas melayani tamu. Dari kebiasaan tersebut menunjukkan proses akulturasi yang tidak hanya terjadi dalam ranah kuliner, tetapi juga dalam tata perilaku dan gaya hidup bangsawan keraton.³⁵ Kegiatan tersebut menjadi sarana pertemuan dua kebudayaan besar yang saling mempengaruhi dalam menciptakan identitas sosial baru di lingkungan istana Jawa.

³⁴ Fajar Wijanarko, “Abdi Dalem *Encik* dan Tradisi Jamuan *Rijsttafel* di Keraton Yogyakarta”, dalam jurnal: *Bandar Maulana*, Vol. 26, No. 1 (Oktober 2021): 11-12.

³⁵ Wijanarko, Abdi Dalem *Encik*, 12.

Selain di dua wilayah tersebut, perayaan serupa juga berlangsung di berbagai kota lain di Hindia Belanda. Setiap daerah menampilkan kekhasan budaya setempat, misal salah satu contohnya Surakarta mengadakan tradisi *Tedhak Loji* dalam peringatan keempat puluh tahun pemerintahan Ratu Wilhelmina.³⁶ Tradisi tersebut menunjukkan bentuk perayaan yang berakar pada adat lokal tanpa mengalami proses akulturasi dengan budaya kolonial. Sementara di beberapa wilayah lain, keterlibatan kesenian lokal dalam perayaan kolonial justru memperlihatkan adanya proses akulturasi budaya yang terjadi di bawah pengaruh kekuasaan Belanda. Namun, perlu digarisbawahi bahwa akulturasi tersebut berlangsung secara tidak seimbang, karena budaya pribumi kerap ditempatkan sebagai unsur pelengkap dalam upacara kolonial, bukan wujud yang sejajar.

Dari sisi sosial, perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina menciptakan ruang pertemuan antara masyarakat Eropa, Timur Asing, dan pribumi dalam suasana yang tampak meriah dan tanpa adanya perbedaan kelas. Namun di balik itu, hubungan sosial yang terbentuk tetap menunjukkan adanya tingkatan dan penguasaan dalam masyarakat kolonial. Masyarakat pribumi diberikan ruang partisipasi terbatas, terutama sebagai pengisi hiburan atau penyelenggara kegiatan, sementara masyarakat Eropa menempati posisi sebagai penyaksi dan penilai kebudayaan lokal. Salah satu bentuknya dapat dilihat melalui permainan panjat pinang yang populer pada masa kolonial. Permainan ini sering diadakan

³⁶ Joko Daryanto, “Karawitan Keraton Surakarta Dari Panembrama Hingga Retnatama” (*Disertasi: PGSD, Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, 2020*), 66, didownload melalui: <https://eprints.uns.ac.id>.

dalam berbagai perayaan oleh kalangan Belanda,³⁷ termasuk dalam perayaan 25 tahun pemerintahan Ratu Wilhelmina di Alun-alun Situbondo. (Lihat gambar 4.5).



Gambar 4. 5 Perayaan (Panjat Pinang) di Alun-alun Situbondo Tahun 1923

Sumber: kitlv.nl 38978 diakses pada 19 Oktober 2025

Perlombaan panjat pinang pada perayaan tersebut diikuti oleh pribumi dengan hadiah berupa barang-barang mewah yang bergantungan, seperti tampak pada gambar diatas, sementara orang Eropa menontonnya sebagai hiburan. Dalam konteks kolonial, permainan ini mencerminkan ketimpangan sosial antara penguasa dan yang dikuasai, serta memperlihatkan bagaimana praktik hiburan rakyat dapat dimanfaatkan untuk meneguhkan kendali kolonial secara halus. Namun bagi masyarakat pribumi, permainan ini menjadi wadah untuk menunjukkan kerja keras, kebersamaan, dan solidaritas antarindividu.³⁸ Panjat pinang kemudian bertransformasi menjadi tradisi yang terus dilestarikan

³⁷ Fandy Hutari, Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Kolonial (D.I. Yogyakarta: INSISTPress, 2017), 180.

³⁸ Hutari, Hiburan Masa Lalu, 181.

hingga kini, terutama dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, yang menandakan terjadinya perubahan makna dari praktik kolonial menjadi wujud jati diri dan semangat nasional. Kondisi ini menunjukkan bagaimana kekuasaan kolonial bekerja secara halus melalui praktik sosial dan budaya, membentuk pola perilaku masyarakat yang semula diarahkan oleh kepentingan kolonial namun kemudian dimaknai ulang oleh masyarakat pascakolonial.

Meskipun pada masa kolonial banyak praktik budaya yang memperlihatkan ketimpangan sosial, sejumlah bentuk perayaan tersebut juga meninggalkan warisan budaya yang bertahan hingga menjelang akhir kekuasaan Belanda di Hindia. Tradisi seperti pasar malam, pementasan seni rakyat, dan pesta kota terus diselenggarakan hingga dekade 1940-an. Dengan demikian, perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina tidak hanya memperlihatkan kekuasaan kolonial, tetapi juga ikut membentuk jenis hiburan dan kehidupan sosial yang mulai berubah ke arah masyarakat perkotaan menjelang masa kemerdekaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina di Hindia Belanda merupakan wujud strategi politik pemerintah kolonial dalam mempertahankan legitimasi kekuasaan di tengah meningkatnya kesadaran nasional masyarakat pribumi. Latar belakang diadakannya perayaan ini tidak terlepas dari upaya pemerintah Belanda menampilkan gambaran kerajaan yang kuat dan berwibawa melalui sosok Ratu Wilhelmina, sekaligus membangun gambaran stabilitas serta kemakmuran di bawah pemerintahan kolonial. Di tengah ketimpangan sosial-ekonomi dan munculnya berbagai perlawanan rakyat, perayaan menjadi sarana dalam menumbuhkan rasa tunduk dan menenangkan ketegangan politik.

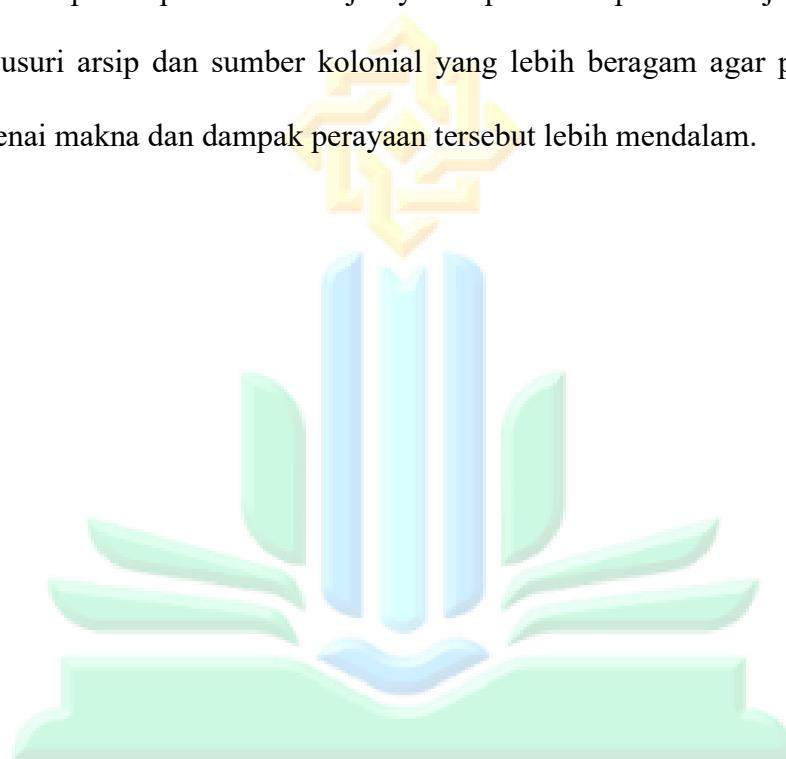
Pelaksanaan perayaan di berbagai wilayah Hindia Belanda, memperlihatkan fungsi politik dan budaya yang saling berkaitan. Di Karesidenan Besuki, hiburan seperti aduan sapi dan pertunjukan wayang wong berpadu dengan pesta dansa ala Eropa sebagai bentuk pengaruh kolonial terhadap budaya lokal. Di Yogyakarta, jamuan resmi dan pertunjukan seni keraton menunjukkan cara Belanda menjalin hubungan dengan kekuasaan tradisional Jawa. Sementara itu, Pasar Gambir di Batavia dan *Jaarmarkt* di Surabaya menampilkan bentuk kemajuan kolonial melalui pameran industri, penerangan listrik, dan parade militer yang memperkuat kekuasaan Belanda di mata publik.

Perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina membawa dampak politik, ekonomi, dan sosial-budaya yang saling terkait. Dari sisi politik, perayaan berfungsi sebagai alat pengaruh untuk memperkuat dan mengukuhkan kekuasaan kolonial di tengah berbagai pergolakan daerah. Dalam bidang ekonomi, kegiatan perayaan seperti pasar dan pameran industri mendorong aktivitas perdagangan serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Secara sosial-budaya, perayaan melahirkan budaya baru dalam masyarakat melalui percampuran antara unsur lokal dan kolonial. Berbagai hiburan seperti pasar malam dan panjat pinang yang awalnya menjadi bagian dari acara resmi kolonial kemudian berkembang menjadi tradisi rakyat yang berlangsung sampai masa kemerdekaan.

Secara keseluruhan, perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina di Hindia Belanda tidak hanya mencerminkan upaya pemerintah kolonial dalam menanamkan kekuasaan melalui simbol dan budaya, tetapi juga secara tidak langsung memunculkan dinamika sosial dan politik yang kelak menjadi landasan bagi tumbuhnya kesadaran akan posisi dan peran penduduk pribumi dalam sistem kekuasaan kolonial.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam ketersediaan sumber primer terkait pelaksanaan perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina di berbagai daerah Hindia Belanda. Oleh karena itu, diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas kajian dengan menelusuri arsip dan sumber kolonial yang lebih beragam agar pemahaman mengenai makna dan dampak perayaan tersebut lebih mendalam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Arsip:

“*Staatsblad Van Nederlandsch Indie* No. 16, Tanggal 9 Januari,” 1819.

Surat Kabar:

- A.M.A.C.A.B. “Nieuwe courant.” 26 August 1948.
<https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMNIOD04:000095245>.
- A.M.A.C.A.B. "Nieuwe courant." 30 August 1948.
<https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMNIOD04:000095286>.
- Hallermann, J. "De Sumatra post." 21 September 1923.
<https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011023400>.
- Hepkema, J. "Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's courant." 20 September 1948.
<https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010762078>.
- s.n. "De Indische courant." 01 September 1923.
<https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010277378>.
- Volkskrant, NV De. "De Volkskrant." 08 September 1938.
<https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB12:000164006>.

Buku:

- Abdurahman, Dudung. Metodelogi Penelitian Sejarah Islam. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011.
- Afidah, Dahimatul. Diktat Metodelogi Penelitian Sejarah. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.
- Azhara, Bambang Muhamad Fasya dan Desita Dwi Utami. “Pemberitaan Seremoni Keraton Yogyakarta di Surat Kabar Yang Terhimpun Dalam Situs Delpher (1923-1940),” dalam Masami Okabe, *International Symposium on Javanese Culture*. Kraton Yogyakarta: 2024.
- Basundoro, Purnawan. Sejarah Pemerintah Kota Surabaya Sejak Masa Kolonial Sampai Masa Reformasi 1906-2012. Yogyakarta: Departemen Sejarah FIB UNAIR dan Elmatera Publishing, 2012.
- Herlina, Nina. Metode Sejarah. Bandung: Satya Historika, 2020.
- Hutari, Fandy. Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Kolonial. D.I. Yogyakarta: INSISTPress, 2017.
- Izzah, Latifatul., Suharto, dan Neneng Afiah. “Puncak Keemasan Budaya Masyarakat Bondowoso Era Raden Bagoes Assra Sampai Era Kolonial,” dalam Novi Anoegrajekti, Heru S.P. Saputra, Titik Maslikatin, dan Sudartomo

- Macaryus, Sastra dan Perkembangan Media. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2018.
- Japikse, N. *De Geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau*. Den Haag: Zuid-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1948.
- Kepper, G. L. *Gedenkboek: Koningin Wilhelmina in haar Openbaar Leven*. 's-Gravenhage: M. M. Couvee, t.th.
- Kepper, G. L. *Wilhelmina: Koningin der Nederlanden Populair geschetst*. Rotterdam: Nijgh & van Ditmar, 1898.
- Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018.
- Marihandono, Djoko., Nur Khozin, Dri Arbaningsing, dan Yuda B. Tangkilisan. Sisi Lain Kartini. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.
- Nawiyanto. Perekonomian Karesidenan Besuki Masa Kedudukan Jepang. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2019.
- Nurisyana Arkanti, Aulia., Dinda Lusiana, Dwidha Surya Prakasa, Fitri Yuli Angraini, Hadyan Fikri Rosyadi, Inggar Rahmi Irwanti, dan Intan Ramadhanti. Sejarawan Dalam Pusaran Keistimewaan: Biografi Djoko Suryo. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Sekolah Vokasi Program Studi Kearsipan, 2018.
- Ohorella, G. A. dan Restu Gunawan. Sejarah Lokal Peranan Rakyat Besuki Jawa Timur Pada Masa Perang Kemerdekaan 1945-1950. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001.
- Padiatra, Aditia Muara. Ilmu sejarah: Metode dan Praktik. Gresik: JSI Press, 2020.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. Sejarah Nasional Indonesia IV: Kemunculan Penjajah di Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Regicola. *Koningin Wilhelmina: Schetsen uit haar leven. Voor de Nederlandsche Jeugd*. 's-Hertogenbosch: G. Mosmans Zoon, 1901.
- Ricklefs, M. C. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Sadono, Bambang., Tb Hasanuddin, Rambe Kamarul Zaman, Martin Hutabarat, dan Tb. Soenmandjaja. Pertanggungjawaban Kepala Pemerintahan dalam Preferensi Pemerintahan di Beberapa Negara. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017.
- Sari, Annita. Dahlan, Ralph August Nicodemus Tuhumury, Yudi Prayitno, Willem Hendry Siegers, dan Supiyanto. Anastasia Sri Werdhani. Dasar-dasar Metodologi Penelitian. Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023.
- Siri, Hasnani. Sejarah Pergerakan Nasional. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.

- Sugiarnik, Ira. "Gubernur Jenderal Hindia-Belanda dan Kebijakannya Pada Tahun 1900-1945 Serta Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi," dalam SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah. Lubuklinggau: LP4MK & Prodi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Silampari, 2022.
- Sukardi, Heru., Soetjipto, Suwarno, dan Bambang S.S. Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Jawa Timur. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1982.
- Suratmin., Suhartono, Suharyanto, dan Suhatno. Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jakarta: Proyek IDSN, 1990.
- Suwando, Bambang. Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978.
- Tami, Rosmah., Zurmailis, Novi Yulia, dan Andi Nadhirah. Hegemoni: Negosiasi dan Konsensus Produk Budaya Indonesia. Makassar: Alauddin University Press, 2021.
- t.p. *De Regeering van Koningin Wilhelmina: Hare Ihuldigung, Hare Eerste Regeeringsjaren. Hare Verloving*. Rotterdam: Mucha & Ditmar, t.th.
- t.p. *Officieel Gedenkboek van de Feestelijke Ontvangst en de Inhuldiging van hare Majesteit Koningin Wilhelmina Helena Pauline Maria binnen Amsterdam in 1898*. Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, 1898.
- Zuhdi, Susanto., Achmad Sunjayadi, Dita Putri Prameswati, Ghatal Satya Mohammad, dan Fajar Nur Alam. Seabad Rakyat Indonesia Berparlemen: Sejarah DPR RI. Jakarta Pusat: Biro Pemberitaan Parlemen, 2021.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

- Agustiningrum, Eka. "Pemanfaatan Kembali *Lost Space* di Ex-Kawasan Pusat Kegiatan Karesidenan Besuki Kabupaten Bondowoso." *Skripsi*: Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, 2015. Didownload melalui: <https://share.google/QWmpbIWVwQD46PvkE>.
- Arifah, Alamanda Fitri. "Dinamika Taman Hiburan Rakyat (T.H.R) Surabaya Tahun 1957-2003." *Skripsi*: Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro Semarang, 2019. Didownload melalui: <https://share.google/Rfr2Jc7Spg6WIW8Yj>.
- Arliana, Pradita. "Pendidikan Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda di Karesidenan Besuki 1901-1942." *Skripsi*: Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember, 2020. Didownload melalui: <https://share.google/pafdq116R5Vlzy5of>.
- Asyakri Hasbullah, Muh. "Pengaruh Budaya Jawa Terhadap Hubungan Antara Indonesia dan Suriname." *Skripsi*: Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas

- Muhammadiyah Yogyakarta, 2021. Didownload melalui: <https://etd.ums.ac.id/id/eprint/6732/>.
- Cahyati, Ani. "Konstruksi Pengetahuan Tentang Mitologi Perang Bubat Dalam Membentuk Stereotipe Masyarakat Jawa Dan Sunda di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap." *Skripsi*: Program Studi Sejarah, FKIP, Universitas Siliwangi, 2020.
- Daryanto, Joko. "Karawitan Keraton Surakarta Dari Panembrama Hingga Retnatama." *Disertasi*: PGSD, Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, 2020. Didownload melalui: <https://eprints.uns.ac.id>.
- Dewi, Nurmaya. "Romantika Tiga Zaman Kehidupan Masyarakat Keturunan Etnis Tionghoa di Kota Bandung." *Skripsi*: Departemen Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2015. Didownload melalui: https://repository.upi.edu/20176/1/S_SEJ_0900882_Title.pdf.
- Febriyanto, Nur. "Perjuangan Politik K.H. Ahmad Dahlan Dalam Muhammadiyah di Yogyakarta 1912-1923." *Skripsi*: Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017. Didownload melalui: <https://share.google/3qsyEDMX5MNCGR2K>.
- Galih, Retno. "Pasar Gambir 1906-1942: Arena Ekonomi dan Rekreasi Masyarakat Kota Batavia." *Skripsi*: Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015. Didownload melalui: <https://share.google/3Inor3W2sdmaRopq1>.
- Koesoemadinata, Fabianus Hiapianto. "Pasar Malam Komidi Putar: Relasi Kuasa Dalam Dinamika *Fluid-Placemaking*." *Disertasi*: Program Ilmu Sasustra, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, 2022. Didownload melalui: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920527952&lokasi=lokal>.
- Laely, Nur. "Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di *Onderafdeling Bonthain* 1905-1942." *Doctoral Dissertation*: Pendidikan IPS, Kekhususan Pendidikan Sejarah Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar, 2018. Didownload melalui: <https://share.google/WTS2tIpbSucgdUbKC>.
- Nisak, Saidatun. "Akulturasi Budaya Timur Asing, Eropa dan Pribumi di Jember Tahun 1859-1942." *Skripsi*: Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, FUAH, UIN KHAS Jember, 2025. Didownload melalui: <https://share.google/OmYJFeftv6mAqnKD0>.
- Nur Hidayat, Esa. "Perjuangan Soewardi Soerjaningrat Dalam Bidang Pers Tahun 1912-1920." *Skripsi*: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, 2006. Didownload melalui: <https://share.google/bqmp5ja0RNWwajkBP>.
- Pebrianti. "Dampak Penerapan Politik Ethis Dalam Kehidupan Masyarakat Palembang Tahun 1900-1942." *Skripsi*: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019. Didownload melalui: https://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/3344/1/352014010_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf.

- Rabbani, Muhammad Rafi. "Pengaruh Peristiwa Skandal Donner Terhadap Situasi Politik di Kabupaten Madiun 1899-1902." *Skripsi*: Program Studi Sejarah, FKIP, Universitas Siliwangi, 2014. Didownload melalui: <https://repository.unsil.ac.id/>.
- Saputra, Sulistiyo Dwi. "Tari Zapin di Palembang (Studi Atas Bentuk, Perkembangan dan Karakteristiknya)." *Tesis Skripsi*: Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Pascasarjana, UIN Raden Fatah Palembang, 2019. Didownload melalui: <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/17637>.
- Sobari, Bernas. "Partai Politik dan Pergerakan Nasional di Hindia Belanda Awal Abad XX." *Skripsi*: Universitas Indonesia, 2008.
- Sutjito. "Aduan Sapi: Studi Tentang Perubahan Fungsi Aduan Sapi Pada Masyarakat di Kabupaten Jember." *Tesis*: Airlangga, 2003. Didownload melalui: <http://lib.unair.ac.id>.
- Wijaya, Eka Satriawan Kusuma. "Penciptaan Buku Referensi Situs Gapura Bajang Ratu Sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya Majapahit." *Skripsi*: Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Teknologi dan Informatika, Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya, 2015. Didownload melalui: <https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/4671/1/10420100057-2015-STIKOMSURABAYA.pdf>.

Jurnal:

- Achmad Hidayat, Asep., Muhammad Fikri Arsyad, Yan Nurcahya, dan M Kautsar Thariq Syah. "Masa Kolonialisme Kawasan Asia Tenggara." Dalam jurnal: *Sharia*, Vol. 1. No. 2 (2024): 1-2. Didownload melalui: 10.59757/sharia.v1i2.39.
- Ady, Satriadi. "Formal Analysis of Wilhelmina Statue Collection of Makassar City Museum." Dalam jurnal: *Pakarena*, Vol. 6, No. 2, (2021): 156. Didownload melalui: 10.26858/p.v6i2.26333.
- Af, Abdullah Khozin. "Konsep Kekuasaan Michel Foucault." Dalam jurnal: *Toesofi*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2012): 140.
- Agustin, Sari Monik. "Foucault dan Komunikasi (Telaah Konstruksi Wacana dan Kuasa Foucault Dalam Lingkup Ilmu Komunikasi)." Dalam jurnal: *Ilmu Komunikasi*, Vol. 7, No. 3 (September-Desember 2009): 202. Didownload melalui: www.pdffactory.com.
- Aisyah, Siti., Herlin Syahdina Lubis, Muhammad Basri, Seri Rezjeki Wardani Tamba, dan Mauliza Nabila. "Situasi dan Kondisi Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia Ketika Belanda Datang." Dalam jurnal: *Tashdiq*, Vol. 1, No. 2 (2023): 2. Didownload melalui: 10.333/Tashdiq.v1i1.571.
- Akadun. "Perkembangan Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pada Era Pemerintahan Hindia Belanda." Dalam jurnal: *Civius*, Vol. 10, No. 1 (Juni 2010): 5.

- Andika Ariwibowo, G. "Perkembangan Budaya Kosmopolitan di Batavia 1905-1942." Dalam jurnal: *Handep*, Vol. 3, No. 1 (Desember 2019): 63-64. Didownload melalui: 10.33652/handep.v3i1.66.
- Arifin, Faizal. "Eksistensi Gerakan Freemasonry di Karawang, 1926-1942." Dalam jurnal: *Alwatzikhoebillah*, Vol. 4, No. 1 (2018): 52.
- Barasa, Martinus S. dan F.X. Armada Riyanto. "Analisis Teori Kekuasaan Michel Foucault atas Propaganda Media dalam Membangun Diskursus Politik." Dalam jurnal: *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*, Vol. 6, No. 1 (Agustus 2023): 191. Didownload melalui: 10.34007/jehss.v6i1.1785.
- Dwithama, Ksatria dan Taopik Tri Sutrisno. "Kajian Sejarah Perkembangan Kota Jakarta." Dalam jurnal: *IONIC*, Vol. 1, No. 1 (2022): 22-23.
- Fachrurozi, Miftahul Habib. "Politik Etis dan Bangkitnya Kesadaran Baru Pers Bumiputra." Dalam jurnal: *Bihari*, Vol. 2, No. 1 (2019): 19.
- Hasan, M. Nur. "Corak Budaya Birokrasi Pada Masa Kerajaan, Kolonial Belanda Hingga di Era Desentralisasi Dalam Pelayanan Publik." Dalam jurnal: *Hukum*, Vol. 28, No. 2 (2012): 1078.
- Hestiliani, Teti. "Secentralisatie Wet Van Nederland Indies 1903." Dalam jurnal: *ISTORIA*, Vol. 15, No. 2 (2019): 212.
- Hibatullah, Muhammad Imam dan Daya Negeri Wijaya. "Gaya Hidup Masyarakat di Kawasan Weltevreden, Batavia Tahun 1900-1942." Dalam jurnal: *HISTORIA*, Vol. 6, No. 2 (Oktober 2023): 145. Didownload melalui: <https://ejournal.upi.edu/index.php/historia>.
- Krisnadi, Asrumi, dan Supiastutik. "The Existence of Jember Fashion Carnaval (Jfc) in Jember Regency-Indonesia 2003-2021." Dalam jurnal: *International Journal of Social Science and Human Research*, Vol. 6, No. 8 (Agustus 2023): 4947. Didownload melalui: 10.47191/ijsshr/v6-i8-45, Impact factor- 6.686.
- Kusuma, Hendra. "Situs Kota Tua di Batavia (1619-1942) Sebagai Bahan Ajar Mata Pelajaran Sejarah Peminatan." Dalam jurnal: *KRINOK*, Vol. 3, No. 3 (2021): 111. Didownload melalui: 10.22437/krinok.v3i3.39329.
- Lingga Andana, Muhammad., Izza Yuspriana Afhimma, dan Silvia Nurul Ashiva. "Perkembangan Tata Kota Surabaya Pada Tahun 1870-1940." Dalam jurnal: *HISTORIOGRAPHY*, Vol. 1, No. 2 (2021): 14.
- Ma'as, Ayu Amalya dan Dewi Yuliati. "Diplomasi Kebudayaan antara Keraton Yogyakarta dan Pemerintah Kolonial Belanda Pada Masa Pemerintahan Sultan Hamengku Buwana VIII, 1921-1939." Dalam jurnal: *Historiografi*, Vol. 1, No. 2 (2020): 144-145.
- Mudhoffir, Abdil Mughis. "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik." Dalam jurnal: *Masyarakat*, Vol. 18, No. 1 (2013): 1. Didownload melalui: 10.7454/MJS.v18i1.1253.
- Muhasabah, Nastiti., Subaryana, dan YB Jurahman. "Politik Etis dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Politik di Hindia Belanda." Dalam jurnal: *RINONTJE*, Vol. 2, No. 1 (April 2021): 13.
- Nasution. "Jaarmarkt di Surabaya Masa Pemerintahan Hindia-Belanda." Dalam jurnal: *AVATARA*, Vol. 1, No. 2 (2013): 1.

- Nurhakim, Habib Akbar Nurhakim., Annas Ma'ruf Pramuharam, dan Muhammad Iqbal Birsyada. "Dari Sekolah Kolonial (*Kweekschool*) ke Gerakan Nasional: Politik Etis dan Pengaruhnya terhadap Transformasi Sosial di Indonesia." Dalam jurnal: *Sejarah Citra Lekha*, Vol. 9, No. 2 (2024): 167. Didownload melalui: <https://doi.org/10.14710/jscl.v9i2.46789>.
- Nuriansyah, Jati Saputra., Intan Aninditya, Moh. Yopi Putra Ramadhani, Hastrida, Firdaus Iva, dan Rizqy Syahrul Romadhon. "Dari Besuki ke Bondowoso: Perkembangan Kawasan *Frontier* Terakhir di Jawa 1800-1930." Dalam jurnal: *Historiography*, Vol. 2, No. 4 (Oktober 2022): 475-478.
- Pasaribu, Tiara Niammusyafah Pasaribu., Juan Carlos Ginting, dan Adinda Dwi Saputri. "Dampak Kebijakan Politik Etis Belanda Terhadap Masyarakat Indonesia." Dalam jurnal: *AR RUMMAN*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2024): 603.
- Protoschky, Susie. "Photography and the Making of a Popular, Colonial Monarchy: The Netherlands East Indies during Queen Wilhelmina's Reign 1898-1948." *BMGN-Low Countries Historical Review*, Vol. 130-4 (2015): 3.
- Ramaadhan. Agung dan Yulia Sofiani. "Politik Reaksioner: Reaksi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda Terhadap Gerakan Radikal di Bandung Pada Tahun 1920-1927." Dalam jurnal: *Bihari*, Vol. 4, No. 2 (2021): 137-138.
- Rosadi, Khaesyar Nisfhan Akbar., dan Eric Pradana Putra. "Stratifikasi Sosial: Penonton Bioskop di Hindia Belanda Awal Abad Ke-20". Dalam jurnal: *Pangadereng*, Vol. 9, No. 2, (Desember 2024): 171. Didownload melalui: 10.36869/pjhpish.v9i2.380.
- Samidi. "Identitas Budaya Masyarakat Kota: Teater Tradisi di Kota Surabaya Pada Awal Abad XX." Dalam jurnal: *Indonesian Historical Studies*, Vol. 3, No. 1 (2019): 9.
- Simarmata, Diva Nancy Audissa., Duana Angel Simanjuntak, Rendi Rianto Simarmata, dan Rosmaida Sinaga. "The Role of the Volksraad in the Dutch East Indies Period." Dalam jurnal: *Nasional Holistic Science*, Vol. 4, No. 1 (April 2024): 141. Didownload melalui: <https://jurnal.larisma.or.id/index.php/HS>.
- Sulistiwati, Irma. "Gejolak Politik dan Ekonomi Afrika Pasca Perang Dunia II." Dalam jurnal: *ISTORIA*, Vol. 17, No. 1 (2021): 2. Didownload melalui: <https://journal.uny.ac.id/index.php/istoria>.
- Syarif, M. "Politik Etis Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Pesantren." Dalam jurnal: *inovatif*, (Februari 2019): 13-14. Didownload melalui: <https://doi.org/10.55148/inovatif.v5i1.94>.
- Syarifuddin., Irene Maria, dan Magraini. "Eksistensi Telok Abang Sebagai Tradisi Agustusan di Kota Palembang, Sumatera Selatan Tahun 2010-2020." Dalam jurnal: *Widya Winayata*, Vol. 10, No. 2, (Agustus 2022): 86. Didownload melalui: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPS>.
- Thohir, Ajid dan Bambang Muhammad Fasya Azhara. "Pengaruh Islam dan Eropa Dalam Budaya Kuliner di Keraton Yogyakarta dan Surakarta Abad ke-19 dan ke-20 Masehi." Dalam jurnal: *Kawistra*, Vol. 12, No. 2 (Agustus 2022): 224. Didownload melalui: <https://doi.org/10.22146/kawistara.70935>.

- Tricahyono, Danan. "Buruh Dalam Sejarah Indonesia: Studi Tentang Aktivitas Buruh Pada Masa Pemerintah Kolonial Belanda Periode 1870-1942." Dalam jurnal: *ISTORIA*, Vol. 16, No. 2 (September 2020): 8. Didownload melalui: <https://journal.uny.ac.id/index.php/istoria>.
- Wihardyanto, Dimas., Ahmad Sarwadi, dan Achmad Djunaedi. "*The Development of the Dutch Colonial Settlement in the City of Yogyakarta after the Implementation of the Decentralisatie Wet Policy (1903-1942)*." Dalam jurnal: *Arsitektur*, Vol. 13, No. 2 (Juli 2023): 167. Didownload melalui: <http://dx.doi.org/10.36448/ja.v13i2.2833>.
- Wijanarko, Fajar. "Abdi Dalem Encik dan Tradisi Jamuan *Rijsttafel* di Keraton Yogyakarta." *Jurnal Sejarah Kebudayaan*, Vol. 26, No. 1 (Oktober 2021): 11-12.
- Wijanarko, Fajar. "Pistha Ageng: Perubahan Pola Jamuan Bangsawan Yogyakarta Tahun 1855-1939." Dalam jurnal: *Prajnaparamita*, Vol. 10, No. 1 (Agustus 2021): 53.

Artikel Internet:

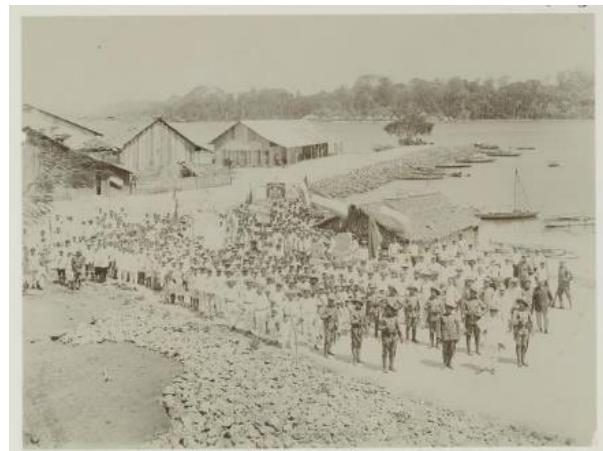
t.p.. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus versi online/daring (dalam jaringan)." Diakses pada 28 September 2025. <https://kbbi.web.id/yubileum>.

Terjemahan Al-Qur'an:

Departemen Agama RI. Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

LAMPIRAN



Gambar. Perayaan Pemerintahan Ratu Wilhelmina di Maluku Tahun 1923

Sumber: kitlv.nl 27449 diakses pada 23 Oktober 2025.



Gambar. Perayaan 25 Tahun Pemerintahan Ratu Wilhelmina di Selayar

Tahun 1923

Sumber: kitlv.nl 6393 diakses pada 23 Oktober 2025.



Gambar. Kendaraan Hias di Garut Tahun 1923

Sumber: [kitlv.nl 183106](http://kitlv.nl/183106) diakses pada 23 Oktober 2025.



Gambar. Perayaan Pemerintahan Ratu Wilhelmina di Bandung Tahun 1923

Sumber: [kitlv.nl 13191](http://kitlv.nl/13191) diakses pada 23 Oktober 2025.

J E M B E R



**Gambar. Foto Bersama Pejabat Pemerintah dan Kepala Daerah Aceh Tahun
1938**

Sumber: kitlv.nl 33815 diakses pada 23 Oktober 2025.



Gambar. Tarian Kuda Buluh di Babo, Nugini Barat, Tahun 1938

Sumber: kitlv.nl 140555 diakses pada 23 Oktober 2025.

Lima Poeloeh Tahoen

IMA POELOEH tahoen adalah soeatoe wakoe jang jama, setengah abad biasa diseboetkan oesia rata-rata dari manoesia. Apabila seorang begitoe beroentoeng dapat merajakan joebilioem lima poeloeh tahoen, betoel-betoel beralasan djika orang mengatakan soeatoe pesta **keemasan**. Dan tiap-tiap orang mengibarkan bendera, memakai pakaian-pakaian jang terbaik dan orang datang mempersembahkan pernyataan selamatnya.

Betapa lebih banjak alasannya lagi oentoe berboeat begitoe, apabila joebilioem keemasan ini mengenai soeatoe joebilioem pemerintahan seorang Ratoe jang dalam lima poeloeh tahoen telah memerintah negara dan rakjat dengan penoeh kebijaksanan, kesolehan dan keadilan. Betapa soenggoeh lebih-lebih beralasan lagi, apabila Ratoe ini adalah soeatoe Ratoe, jang djoestroe dalam tahoen² jang penoeh dengan oedjian-oedjian jang getir — tahoen-tahoen perangan demikianlah halnya — telah memperkenalkan dirinya sebagai soeatoe Poeteri Bangsawan dengan ketjakapan² jang loear biasa.

Karena itoe kamipoen akan mengibarkan bendera, kami akan berdandan dengan pakai-an kami jg. terbaik, dan kami akan menghiasi penerbitan madjallah kami jg. loear biasa ini dengan warna-warna, jang begitoe ditintai oleh kita semoea.

Nomor joebilioem ini, disamping gambar-gambar jang banjak djoemlahnya dan beberapa boeah karangan, djoega memoat beberapa boeah bahan-bahan keterangan bagi Toean, jang dapat diboeat bahan karangan berkenaan dengan joebilioem ini. Disini kami persembahkan penghormatan dan rasa terima kasih kami kepada S. B. Ratoe Wilhelmina.

Semoga Jang Maha Koeasa mengoernikan berkat dan masih banjak lagi tahoen-tahoen jang makmoer padaNja.

Hormat kami,
Redaksi.

Gambar. Koran Peringatan 50 Tahun Pemerintahan Ratu Wilhelmina, 1948

Sumber: Pandji Ra'jat, Senin 30 Agustus 1948, 77.

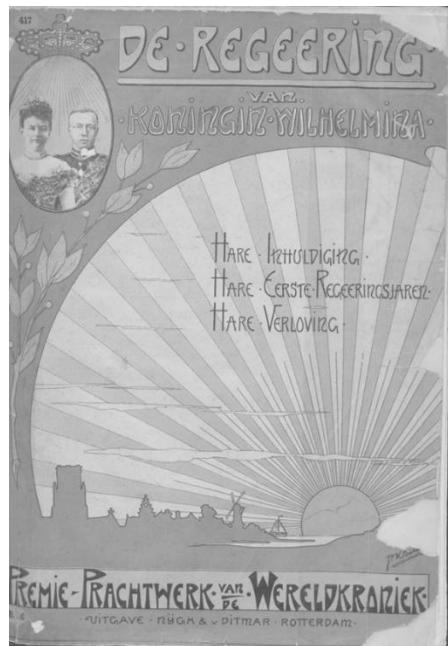
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar. Souvenir Peringatan 50 Tahun Pemerintahan Ratu Wilhelmina,
1948

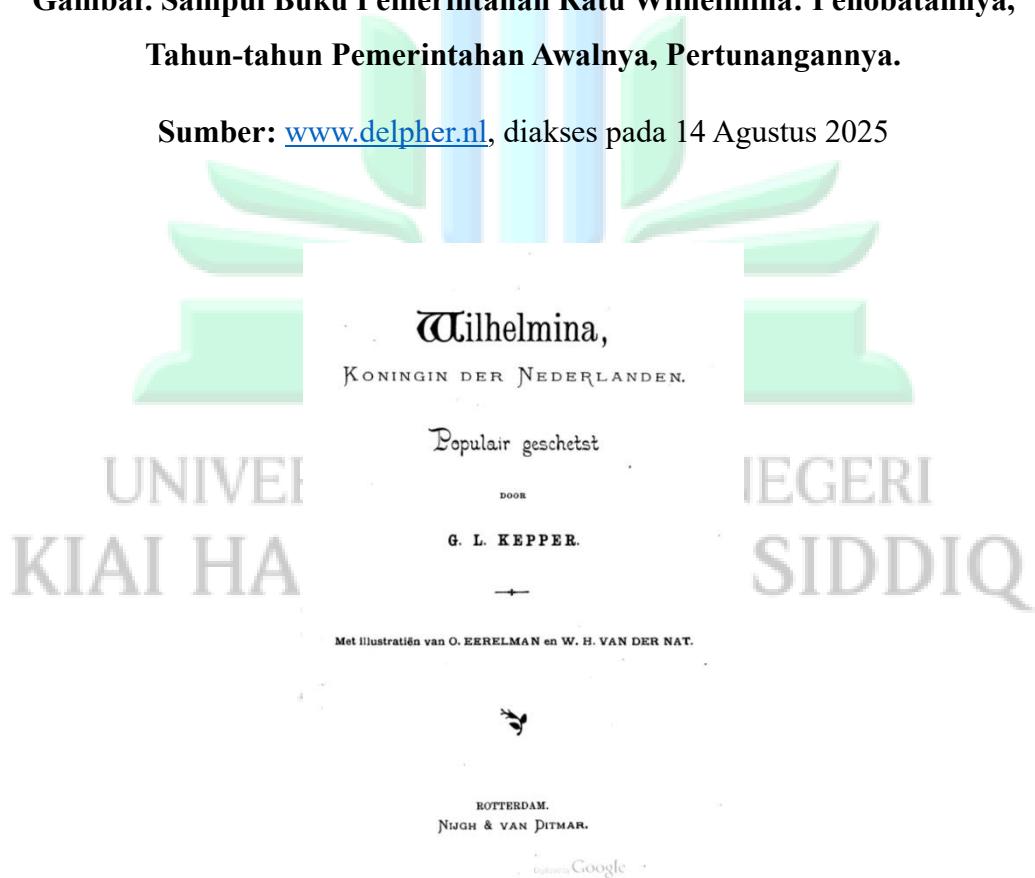
Sumber: <https://share.google/MMQYk7VduX7s0TVR0>, diakses pada 30
Oktober 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar. Sampul Buku Pemerintahan Ratu Wilhelmina: Penobatannya, Tahun-tahun Pemerintahan Awalnya, Pertunangannya.

Sumber: www.delpher.nl, diakses pada 14 Agustus 2025



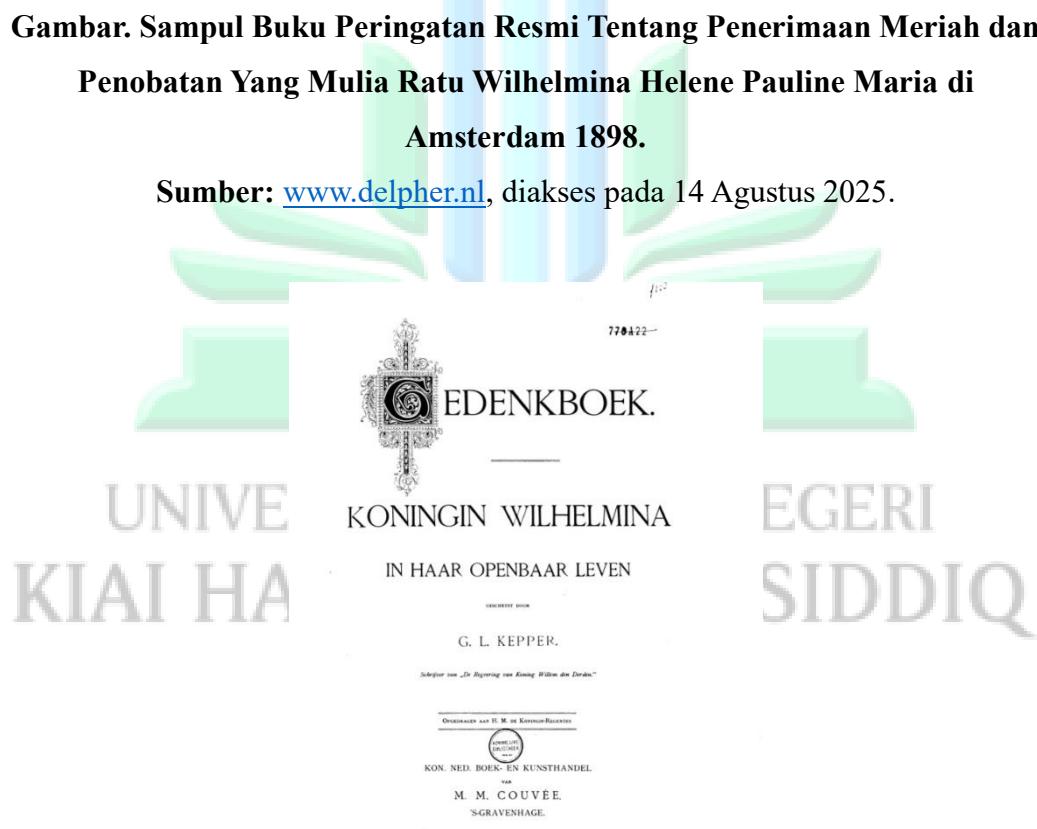
Gambar. Sampul Buku Wilhelmina Ratu Belanda Dalam Gambaran Populer.

Sumber: www.delpher.nl, diakses pada 14 Agustus 2025.



Gambar. Sampul Buku Peringatan Resmi Tentang Penerimaan Meriah dan Penobatan Yang Mulia Ratu Wilhelmina Helene Pauline Maria di Amsterdam 1898.

Sumber: www.delpher.nl, diakses pada 14 Agustus 2025.



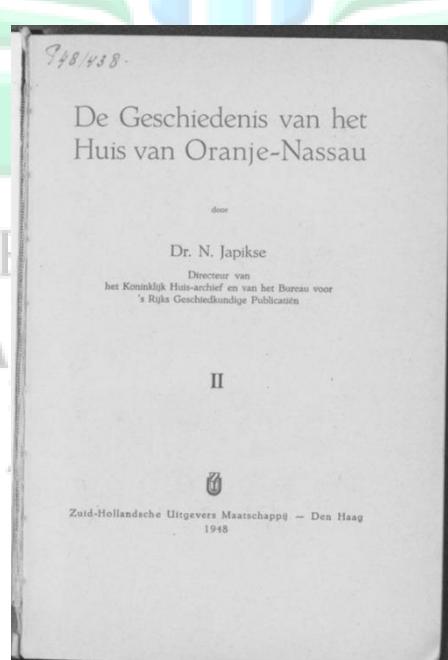
Gambar. Sampul Buku Kenangan Ratu Wilhelmina Dalam Kehidupan Publiknya.

Sumber: www.delpher.nl, diakses pada 14 Agustus 2025.



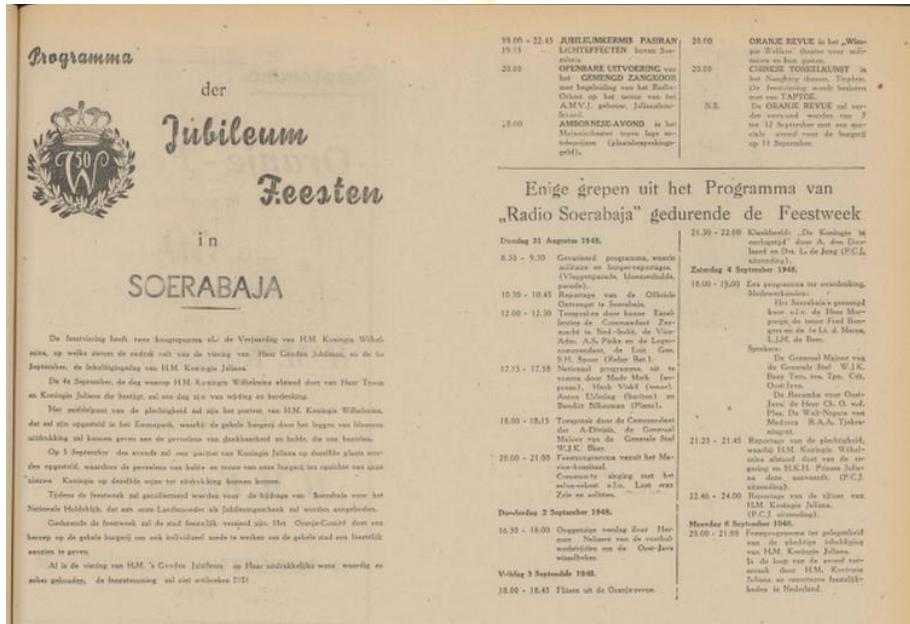
**Gambar. Sampul Buku Ratu Wilhelmina, Gambaran dari Kehidupannya.
Untuk Pemuda Belanda.**

Sumber: www.delpher.nl, diakses pada 14 Agustus 2025.



Gambar. Sampul Buku Sejarah Keluarga Oranje-Nassau.

Sumber: www.delpher.nl, diakses pada 14 Agustus 2025.



Gambar. Koran Program Perayaan Jubileum di Surabaya

Sumber: Nieuwe Courant, 26 August 1948, 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar. Koran Program Radio untuk Pekan Perayaan

Sumber: Nieuwe Courant, 30 August 1948, 2.

Ook in Indië vierde men feest

Niet alleen in Nederland heeft men het jubileum van koningin Wilhelmina en de daarop gevolgde troonswisseling feestelijk gevierd. Ook in Indonesië heeft men daaraan meegedaan. We kregen inzage van een brief, uit Malang, gesonden door een Friese militair aan een meisje te Heerenveen, waarin hij over de feestweek in Indië het volgende schrijft:

Bij jullie in Heerenveen was natuurlijk veel versierd, zoals in heel Nederland, maar dat kunnen ze in Indië ook; dat heb ik de laatste dagen wel gezien, want voor de feestdagen waren ze in de stad al bezig om erepoorten te maken enz.

Op 30 Aug. moest ik voor dienst naar Soerabaja met de wagen en overal langs de weg zag je de mensen druk bezig om de lastige hand te leggen aan de versiering voor de volgende dag. Voor lederkampong-ingang stond een ereboog met een 50 erin. De een was eenvoudiger dan de ander, maar daar gaan het niet in de eerste plaats om. De stad Soerabaja deed me denken aan Amsterdam; daar was 't druk, zoals ik het haast nog nooit heb gezien. Mensen van allerlei landstaard krioelde er doorheen. 't Leek net een groot vieren meerennet, doch Malang spande, wat de versiering betreft, wel de kroon, want langs al de grote wegen waren palen in de trottoirs gezet op een afstand van plm. 5 meter, waartussen dikke slingers hingen, gevlochten van groen en bloemen.

's Avonds brandden er allerlei gekleurde lichtjes, die 't geheel tot een complete lichtstad maakten.

De 31 Aug.-dag werd begonnen met een militaire parade, waarin alle onderdelen van de Landmacht deelnamen en waar allerlei gevechtswagens lo mireden.

Hierne hadden de schoolkinderen feest op 't alleen-alleen, het grote stadhuisplein, waarbij ze met allerlei spelletjes elkaar bekämpften om de eerste prijs te bemachtigen.

Een prachtig gezicht, al die zwarte kinderen te zien met hun feestpakje aan. Ze hadden schik voor drie n wij als toeschouwers niet minder, want ze zijn zo vug als ratten.

's Avonds was er Pasar-Malang, een soort kermis, op 'tzelfde veld, waar duizenden mensen zich verdrongen voor de diverse tenten en kraampjes. In een openlucht-theater werden Indische dansen uitgevoerd door Javanees in prachtig gekleurde kleding en voor de militairen was er een bonke avond in Flora.

Hoe de feestelijkheden in Holland zijn verlopen kan ik nog niet weten, maar hier zijn ze met groot enthousiasme gevierd door jong en oud, door blank en bruin.

Gambar. Koran Di India Pun Merayakan

Sumber: Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's Courant, 20 September 1948, 2.

Feest in den Kraton.

Vrijdag werd naar de *Pr. bode* meldt door Z. H. den Sultan van Djokjakarta, ter herinnering aan het 25-jarig regeeringsjubileum van H. M. Koningin Wilhelmina, aan genoodigden een diner aangeboden in den Krator. Onder de aanwezigen behoorde ook de heer van der Jagt, resident van Kedoe.

Tegen negen uur nam het diner een aanvang. De tafels en de eetzaal waren versierd in oranje-blanje-bleu, eenvoudig en toch bizarnder smaakvol. Nadat de gasten de voor hen bestemde plaatsen hadden ingenomen, bracht Z. H. de Sultan de gebruikelijke toosten uit. Even daarna nam de resident van Djokja het woord om Z.H. den Sultan, namens de burgerij van Djokja, dank te zeggen voor de gastvrije wijze waarop zij in den Kraton worden ontvangen en onthaald en zijn grote bewondering te uiten voor de schitterende vertolking van de opgevoerde lakons, de bewonderenswaardige dansen en de sprookjesachtige aankleding van het geheel. Hierna bracht hij een dronk uit op Z. H. den Sultan, waarmee alle gasten van ganscher harte instemden.

Na afloop van het diner werd gelegenheid tot dansen geboden, waarvan een zeer druk gebruik werd gemaakt. Eerst om drie uur werd het bal beëindigd en begaf het gezelschap zich naar den Bangsal Kentjono, om het slot van de wajangvoorstelling bij te wonen.

Het was toen ongeveer vier uur geworden, voor de gasten aan naar huis gaan dachten.

Den geheelen avond heerschte er een prettige gemanneerde stemming, het geheel was een waardig slot van de voorafgaande dagen.

Gambar. Koran Pesta di Istana

Sumber: De Sumatra Post, 21 Desember 1923, 5.

J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainiah
NIM : 211104040008
Program Studi : Sejarah dan Peradaban Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikuip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 12 Oktober 2025

Saya yang menyatakan



BIOGRAFI PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Zainiah
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 17 Januari 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Rengganis, Kembang, Bondowoso,
Bondowoso.
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi : Sejarah dan Peradaban Islam
NIM : 211104040008

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri Kembang 02 Bondowoso
2. SMP/MTs : MTs Negeri 02 Bondowoso
3. SMA/SMK/MA : MA Negeri Bondowoso